

Milik Depdikbud  
Tidak Diperdagangkan



# **PERANAN DESA DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN DI SUMATERA BARAT 1945 -- 1950**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
JAKARTA  
1998**

Milik Depdikbud  
Tidak Diperdagangkan



# **PERANAN DESA DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN DI SUMATERA BARAT 1945--1950**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
JAKARTA  
1998**



## PERANAN DESA DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN DI SUMATERA BARAT 1945--1950

Penulis : Mohammad Iskandar  
Yulinar Said  
Triana Wulandari

Penyunting : Mohammad Iskandar

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional  
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat  
Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan

Jakarta 1998

Edisi I 1998

Dicetak oleh : CV. EKA DHARMA

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya projek ini di kemudian hari.



Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Sedyawati', written over a horizontal line.

**Prof. Dr. Edi Sedyawati**

**NIP. 130 202 962**

## PENGANTAR

*Peranan Masyarakat Desa Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945--1950*, ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/penulisan yang diselenggarakan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1996/1997.

Buku ini menguraikan tentang partisipasi dan peran serta masyarakat desa di daerah Sumatera Barat dan keterlibatan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan RI yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Mereka itu adalah tokoh masyarakat, para ulama, santri bahkan petani yang tindakannya dinilai mengorbankan semangat para pejuang pada masa mempertahankan proklamasi tersebut.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah informasi kesejarahan mengenai peran serta masyarakat dalam periode perjuangan kemerdekaan dan dalam perjalanan bangsa Indonesia pada umumnya.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah sejarah Indonesia dan memberi informasi yang memadai bagi mereka



yang berminat pada kajian pedesaan. Disamping itu diharapkan dapat menjadi bahan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat terutama generasi penerus bangsa.

Jakarta, September 1998

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan  
Dokumentasi Sejarah Nasional**



**G.A. Ohorella**

NIP. 130 370 094

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>Sambutan</b> .....  | v       |
| <b>Pengantar</b> .....   | vii     |
| <b>Daftar Isi</b> .....  | ix      |
| <b>Bab I Pendahuluan</b>   |         |
| 1.1 Latar .....  | 1       |
| 1.2 Tujuan Penulisan .....                                       | 5       |
| 1.3. Ruang Lingkup .....   | 6       |
| 1.4. Metode dan Metodologi Penulisan .....                       | 7       |
| <b>Bab II Selintas Sumatera Barat</b>                            |         |
| 2.1 Iklim dan Geografi .....                                     | 11      |
| 2.2 Stratifikasi Sosial dan Mata Pencaharian .....               | 13      |
| 2.3 Perkembangan Singkat Daerah Administrasi .....               | 19      |
| <b>Bab III Masa Transisi</b>                                     |         |
| 3.1 Sekitar Proklamasi Kemerdekaan .....                         | 33      |
| 3.2 Pembentukan Lembaga Pemerintah Badan<br>Kelaskaran .....     | 42      |
| 3.3 Aksi Pengibaran Bendera Merah Putih dan Aksi<br>Daulat ..... | 53      |
| 3.4 Masalah Volksfront (Persatuan Perjuangan) .....              | 56      |



|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| <b>Bab IV</b> | <b>Jatuhnya Kota-Kota RI di Sumatera Barat</b>            |     |
| 4.1           | Kedatangan Tentara Sekutu/Belanda di Sumatera Barat ..... | 69  |
| 4.2           | Agresi Militer Belanda .....                              | 80  |
| 4.3           | Daerah Sub Komando A .....                                | 89  |
| 4.4           | Daerah Sub Komando B .....                                | 91  |
| 4.5           | Daerah Sub Komando C .....                                | 93  |
| 4.6           | Daerah Pertempuran Lainnya .....                          | 93  |
| <b>Bab V</b>  | <b>Peranan Desa Dalam Perang Gerilya</b>                  |     |
| 5.1           | Pembentukan Basis Gerilya .....                           | 101 |
| 5.2           | Pembentukan Jaringan Pertahanan (Logistik) .....          | 106 |
| 5.3           | Peristiwa di Situjuh .....                                | 111 |
| 5.4           | Pertempuran di Cubadak Air .....                          | 113 |
| 5.5           | Pertempuran Sungai Puar .....                             | 114 |
| 5.6           | Pertempuran Sungai Jambu dan Sikaldi .....                | 116 |
| <b>Bab VI</b> | <b>Epilog</b> .....                                       | 121 |
|               | <b>Daftar Pustaka</b> .....                               | 127 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *1.1 Latar*

Perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan dalam kurun waktu 1945--1949 telah melibatkan hampir seluruh lapisan sosial masyarakat, mulai dari lapisan atas sampai bawah, mulai dari kota sampai ke pelosok desa. Perjuangan ini, yang sering sekali disebut sebagai perang kemerdekaan, atau revolusi kemerdekaan, mulanya meletus di daeran perkotaan. Dalam perkembangannya kemudian, terutama setelah terjadinya agresi militer Belanda yang pertama tahun 1946--1947, perjuangan kemerdekaan itu juga berkembang dan melibatkan desa-desa. Bahkan desa-desa itulah yang kemudian dijadikan sebagai basis perjuangan, khususnya dalam kaitannya dengan perang gerilya. Namun perlu ditegaskan di sini, yang dimaksudkan sebagai basis perjuangan di sini tidak semata-mata tertuju pada aspek militer seperti sebagai daerah konsentrasi kekuatan tentara *republikein* atau tentara *kiblik*, melainkan juga dalam arti sebagai sumber dukungan *logistik*, dapur umum, dukungan moral, dan lain sebagainya.

Jika ditinjau dari segi persenjataannya, kekuatan tentara *republikein* ini, sejak awalnya bahkan sampai berakhirnya perang kemerdekaan boleh dikatakan kalah dari segi kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan yang dimiliki pihak Belanda/NICA. Hal inilah antara lain yang menyebabkan terjadinya kekalahan demi



kekalahan dalam bulan-bulan atau tahun awal peperangan antara pihak Indonesia melawan Belanda. Selain persenjataan yang relatif lebih jelek itu, taktik dan strateginya juga tidak mendukung alias tidak cocok dengan kondisi persenjataan pihak RI. Semula pihak Indonesia menganut sistem frontal dengan garis liniernya yang mengenal garis demarkasi sebagai tapal batas daerah "kita" dan daerah "musuh". Setelah beberapa bulan bertempur pimpinan tentara waktu itu, khususnya di daerah Jawa Barat, mengubah "filosofi perang" yang dianutnya itu ke suatu sistem yang mereka namakan "*werhkreise*", yaitu sistem lingkaran dengan kantong-kantong gerilya, di mana dalam sistem ini tidak dikenal garis demarkasi atau garis depan (front) yang linier. Dengan sistem ini semua sudut atau garis luar lingkaran dianggap front alias garis depan. Jika musuh lemah, tentara kita datang menyerang, sedangkan jika kita lemah, kita menghindar, tapi terus mengganggu kedudukan musuh. Dalam sistem ini, seperti telah diungkapkan oleh penemunya, yaitu A.H. Nasution, tentara dan rakyat menyatu bagaikan ikan dan air.<sup>1</sup> Artinya rakyat mendukung perjuangan tentara secara pro-aktif dalam berbagai bentuk dan cara, seperti memberi samaran agar tentara tidak terdeteksi oleh pihak Belanda, atau memberikan dukungan logistik dan pengobatan serta perawatan.

Demikian pula halnya di daerah Sumatera Barat, pada mulanya pusat kekuatan angkatan perang kaum *republikein* berada di pusat kota, antara lain di kota Padang dan Bukittinggi. Pembentukan-pembentukan Barisan Keamanan Rakyat (BKR), dan badan-badan perjuangan lainnya, juga berpusat di perkotaan. Namun dalam perkembangan kemudian karena kalah dalam persenjataan baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, maka pasukan Republik Indonesia di Sumatera Barat ini terpaksa harus mengalihkan basisnya ke daerah pedesaan yang dianggap relatif aman. Hal ini terutama terjadi setelah terjadinya agresi militer Belanda yang pertama.

Sebenarnya keterlibatan masyarakat pedesaan, Sumatera Barat dalam melawan kekuatan asing dalam arti kekuatan Belanda bukanlah masalah baru. Hampir seratus tahun sebelumnya, hampir semua pedesaan di wilayah ini, khususnya daerah Bonjol terlibat dalam perlawanan melawan kekuatan Kolonialis Belanda. Meskipun pada mulanya perang di daerah itu merupakan dampak dari pertentangan

pemikiran dalam masalah praktek keagamaan antara golongan reformis (Imam Bonjol d.k.k.) melawan kaum Adat. Namun dengan ikut campurnya kekuatan Belanda, maka pertentangan itu berubah menjadi perlawanan terhadap kekuatan asing yang ingin merampas kemerdekaan rakyat daerah Sumatera Barat.<sup>2</sup>

Setelah Belanda berhasil mengalahkan kekuatan Imam Bonjol, pemerintah Belanda berusaha merangkul para penguasa adat agar berpihak kepadanya. Pada tahun 1914 misalnya, diberlakukan Ordonansi Nagari 1914 yang membatasi keanggotaan dewan nagari pada "penghulu inti", yaitu mereka yang diakui pemerintah sebagai "penghulu pucuk". Hanya mereka inilah yang diperbolehkan memegang kekuasaan di nagari. Artinya para pemangku adat ini mempunyai kekuasaan penuh selama mereka berdiri di pihak pemerintah penjajah Belanda.

Namun semangat pembaruan yang dicanangkan Imam Binjol, pemerintah Belanda kawan-kawannya, rupanya tidak dapat dibendung begitu saja. Apalagi dengan munculnya sekolah-sekolah modern pada awal abad ke-20, yang bukan saja mengajarkan Islam, melainkan juga semangat nasionalisme, termasuk di dalamnya adalah paham Komunis. Tokoh intelektual Islam yang bergabung dengan gerakan Komunis antara lain Haji Datuk Batuah, seorang guru muda terkenal di Sumatera Thawalib Padang Panjang. Kemudian dia menyebarkan paham Komunis melalui pengajaran di bangku sekolah dan lewat tulisan-tulisannya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu tidak begitu mengherankan jika di daerah yang terkenal penduduknya sangat fanatik terhadap agama Islam, muncul pemberontakan Komunis menentang pemerintah Belanda seperti terjadi pada tahun 1927. Walaupun perlawanan tahun tersebut lebih dikenal sebagai pemberontakan Komunis, namun seperti halnya di Banten pada setengah tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perlawanan atau pemberontakan itu, bukan semata-mata karena pengaruh PKI atau Komunisnya, melainkan karena adanya semangat Islami dan keinginan untuk merdeka.

Pada masa pendudukan Jepang, semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Sumatera barat semakin tumbuh subur.

Keinginan untuk merdeka semakin kelihatan jelas. Hal ini antara lain terlihat dari tulisan Gubernur Yano :

"Sebelumnya pihak militer telah mencoba sistem tentara bayaran untuk membantu kekuatan militer, tetapi gagal. Hal itu hanya karena semata-mata demi "impian kemerdekaan" belaka, dan bukanlah uang yang mendorong penduduk pribumi bersedia untuk ikut berperang. Oleh karena itu pada kampanye pengerahan tenaga sukarela ini, saya bebas membangkitkan impian-impian mereka akan kemerdekaan dengan persetujuan atasan saya (Komandan Tanabe)....."<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa keterlibatan rakyat pedesaan melawan aksi pasukan Kolonial Belanda beserta antek-anteknya dalam periode 1945-1950, dapat dikatakan sebagai refleksi adanya keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk merdeka. Dan keinginan itu tidak hanya di daerah perkotaan, melainkan juga di daerah pedesaan. Spontanitas mereka terlihat jelas, misalnya sewaktu diumumkan agar para mantan *Giyugun*, *heiho*, *seinendan*, dan para militer lainnya mendaftar kembali untuk menjadi anggota BKR, maka berduyun-duyunlah mereka datang, bahkan para pemuda yang bukan mantan *Giyugun* dan semacamnya pun ikut datang mendaftar. Para pemuda di masing-masing nagari secara spontan ikut mengambil alih tanggung jawab penjagaan keamanan nagarinya. Meskipun demikian masih ada yang berpendapat bahwa keterlibatan desa pada perang kemerdekaan adalah karena faktor kebetulan (*by accident*), bukan karena faktor yang direncanakan (*by design*). Mungkin saja pendapat itu benar, jika kita lihat tidak adanya persiapan yang matang di daerah-daerah kantong gerilya ataupun di daerah yang kemudian dijadikan basis pertahanan pihak Republik. Tapi dapat juga pendapat itu dianggap salah jika hal ini antara lain dikaitkan dengan adanya semacam perintah yang dikeluarkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang mengatakan agar semua tentara yang berasal dari daerah kantong agar kembali ke daerahnya masing-masing jika pihak Belanda menyerang pihak RI kembali. Tentu saja masalah itu masih perlu penelitian yang lebih mendalam dan lebih komprehensif. Sementara penelitian ini sifatnya lebih ke arah inventarisasi sehingga pembuktian masalah yang telah disinggung di atas bukan menjadi

tujuan utamanya. Meskipun demikian tidak berarti penelitian ini menghindari permasalahan semacam itu.

Berbeda dengan periode-periode sebelumnya yang boleh dikatakan sebagai satu peristiwa yang lokal sifatnya, maka keterlibatan desa dan rakyatnya dalam periode 1945--1949 berupa perlawanan nasional. Artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah pedesaan kala itu, dan membahas perubahan besar, baik dalam struktur masyarakat, maupun struktur politik. Oleh karena itu perjuangan masyarakat di Sumatera barat dapat pula dimasukkan pada kategori revolusi. Artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah pedesaan Sumatera Barat merupakan sebagian dari revolusi kemerdekaan Indonesia.

## ***1.2 Tujuan Penulisan***

Tujuan penelitian dan penulisan ini adalah untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa bersejarah, khususnya keterlibatan desa-desa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dirasakan penting bahkan cukup mendesak, mengingat masalah semacam ini masih jarang dikaji, baik oleh para penulis dalam negeri maupun luar negeri. Padahal seperti telah disinggung di atas, keterlibatan desa dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia tidaklah sedikit. Sewaktu kota-kota republik satu persatu jatuh ke tangan Belanda, daerah pedesaanlah yang kemudian dijadikan sebagai tulang punggung atau basis pertahanan perjuangan bangsa Indonesia. Semangat dan nilai-nilai luhur masyarakat yang hidup di daerah-daerah pedesaan saat itu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan yang tidak sedikit kepada para pejuang Indonesia untuk tetap berjuang menentang pihak Belanda dan antek-anteknya yang mencoba untuk menegakkan kembali negara Hindia Belanda di bumi Pertiwi. Nilai-nilai dan data-data faktual seperti ini tentu saja perlu dilestarikan, tidak saja untuk mengenang jasa para pahlawan terdahulu, melainkan juga untuk bahan-bahan inspiratif bagi pembinaan generasi muda bangsa Indonesia. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi peminat atau peneliti berikutnya yang berminat dan tertarik untuk mengkaji masalah ini.

### 1.3 Ruang Lingkup

Sejalan dengan tujuan penelitian tadi ruang lingkup penelitian ini dbatasi secara geografis hanya mencakup daerah provinsi Sumatera Barat (Sumatera Tengah), dengan beberapa desa sebagai contoh kasusnya. Adapun kurun waktunya disesuaikan dengan temanya, yaitu tahun 1945--1950 yang sering disebut sebagai periode perang kemerdekaan.

Perlu dijelaskan di sini, Sumatera Barat pada masa perang kemerdekaan berbeda statusnya dengan masa sekarang. Dulu Sumatera Barat merupakan salah satu keresidenan yang ada di provinsi Sumatera.<sup>5</sup> Luas daerah Sumatera Barat sekarang pada dasarnya masih sama dengan masa perang kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan RI, Sumatera Barat terdiri dari 4 (empat) *afdeeling* (setingkat kabupaten) dan dua *gemeente* (kotamadya). Yang terpilih sebagai Residen pertama Sumatera Barat di alam kemerdekaan adalah M. Syafei.

Setelah adanya pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda, provinsi Sumatera dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu : Sumatera Utara dengan ibukota Medan, Sumatera Tengah dengan ibukota Bukittinggi, dan Sumatera Selatan dengan ibukota Palembang. Provinsi Sumatera Tengah mencakup tiga keresidenan, yaitu keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Setelah adanya perubahan ini, M. Syafei tetap duduk sebagai Residen Sumatera Barat.<sup>6</sup>

Kemudian pada pertengahan tahun 50-an, Keresidenan Sumatera Barat berubah statusnya dari keresidenan menjadi satu provinsi. Luas geografinya praktis tidak mengalami banyak perubahan dengan status barunya ini. Namun jumlah kabupaten dan kotamadyanya mengalami perubahan, sesuai dengan rencana induk pembangunan pemerintah daerah dan pusat.

Pada masa Orde Baru, jumlah kabupaten dan kotamadya yang berada dalam lingkungan provinsi Sumatera Barat adalah 8 (delapan) kabupaten dan 6 (enam) kotamadya. Oleh karena dalam kenyataannya pertambahan, jumlah kabupaten maupun kotamadya, sebenarnya tidak mengubah batas-batas geografis wilayah yang bernama Sumatera Barat, maka dalam penulisan ini, nama Sumatera Barat tetap dipakai,

baik untuk menyebut Sumatera Barat sebagai keresidenan maupun Sumatera Barat sebagai provinsi.

#### *1.4 Metode dan Metodologi Penulisan*

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah metode sejarah yang menyangkut empat tahapan, yaitu:

1. *Heuristik*, yaitu proses pengumpulan data mentah yang diduga atau dianggap sesuai dengan kerangka konseptual yang dipergunakan dalam penelitian dan penulisan ini.
2. *Kritik*, yaitu proses menguji secara ilmiah data-data mentah yang telah terkumpul untuk menetapkan kredibilitas serta validitasnya.
3. *Interpretasi*, yaitu proses menetapkan data-data yang kredibilitasnya telah teruji secara ilmiah tadi ke dalam suatu kisah yang bermakna, sesuai dengan kerangka konseptual yang telah ditentukan.
4. *Historiografi*, yaitu proses penulisan hasil yang sesuai dengan pembabakan dalam bab-bab yang telah ditentukan.

### **Catatan**

- 1 A.H Nasution *Pokok-Pokok Gerilya*.
- 2 Sartono Kartodirdjo (ed.). *Sejarah Perlawanan-perlawanan Terhadap Kolonialisme* Departemen Pertahanan Keamanan. Pusat Sejarah ABRI, 1973, bab.iv.; Lihat juga Christine Dobbin, *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Sedang Berubah, Sumatera Tengah, 1784--1847*. Jakarta : INIS, 1992, h. 189--263.
- 3 Hamka, *Ayahku*, Djakarta: Djajamurni, 1967, h. 130--131.
- 4 Lihat Audrey Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan : Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945--1950*. Tanpa tahun (tt) bab 2, catatan kaki no. 70.
- 5 Berdasarkan hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi 8 (delapan) provinsi. Pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil disekitarnya menjadi satu provinsi, yaitu provinsi Sumatera yang beribukota di kota Medan. Mr.T. Muhammad Hasan diangkat menjadi gubernur kepala daerah yang pertama untuk provinsi ini. Adapun ketujuh provinsi lainnya adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil (Nusatenggara), serta Daerah Istimewa Jogjakarta dan Surakarta. Lihat R.Z. Leirissa dan Saleh As'ad Djamhari (peny). *Sejarah Nasional Indonesia VI. Republik Indonesia : dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin*. Jakarta : Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993, h. 31--32

- 6 Indra Mulyana, "Gema Kemerdekaan di Sumatera Tengah", *Bingkisan Kenangan 10 Tahun Revolusi Indonesia 17-8-1945/17-8-1955*. Djakarta: P.T. Upeni, h.54.



## BAB II

### SELINTAS SUMATERA BARAT

#### *2.1 Iklim dan Geografi*

Propinsi Sumatera Barat terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Luasnya kurang lebih 4229730/m<sup>2</sup>. Propinsi ini, di sebelah utara berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara, di sebelah timur dengan propinsi Riau dan Jambi, di sebelah selatan dengan propinsi Bengkulu dan di sebelah barat dengan Samudra Indonesia.

Secara geografis, sebagian besar wilayah propinsi Sumatera Barat merupakan dataran tinggi dengan beberapa gunung berapinya yang masih aktif. Daerah pegunungan itu sendiri merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membentang di sisi barat pulau Sumatera mulai dari bagian utara terus memanjang sampai ke ujung selatan. Beberapa gunungnya yang berada di wilayah Sumatera Barat antara lain: Merapi, Singgalang, Sago, Talang dan Pasaman. Di samping itu, di daerah ini juga terdapat beberapa danau yang relatif besar dan indah, seperti Danau Maninjau, Danau Atas dan Danau Bawah. Seperti umumnya daerah-daerah gunung berapi, tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur. Demikian pula halnya tanah di Sumatera Barat.

Daerah Sumatera Barat merupakan salah satu dari beberapa propinsi di Indonesia yang dilalui garis Khatulistiwa. Umumnya daerah dilalui garis Khatulistiwa mempunyai temperatur yang relatif tinggi. Namun karena daerah Republik Indonesia merupakan

kepulauan, ditambah lagi dengan kondisi geografi Sumatera Barat sendiri yang merupakan daerah pegunungan; maka suhu udara di daerah ini relatif sejuk. Temperatur suhunya rata-rata berkisar antara 22-26,5°C. Temperatur di daerah Tebing misalnya, selama 9 tahun berturut-turut (1970-1978), menunjukkan angka rata-rata 24,8°C. Temperatur terendah tercatat sekitar 20°C, yaitu pada bulan Januari 1970. Sedangkan angka tertinggi tercatat pada bulan Pebruari 1973, yaitu 26,8°C.<sup>7</sup>

Seperti umumnya daerah tropis, di wilayah Republik Indonesia hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tinggi rendahnya curah hujan di setiap daerah sangat bervariasi. Di daerah Sumatera Barat sendiri, curah hujannya per tahun relatif tinggi. Sebagai contoh, rata-rata jumlah hari hujan perbulan pada tahun 1979 ialah 13,5 hari. Jumlah hari hujan terpendek terjadi pada bulan Juli, yakni 5 hari hujan, sedang yang terpanjang pada bulan Oktober dan November sebanyak 23 hari hujan.<sup>8</sup>

Jadi curah hujan cukup tinggi terjadi dari bulan September hingga Desember. Artinya periode itu merupakan bulan-bulan basah bagi daerah Sumatera Barat. Sedangkan dari bulan Mei sampai dengan Agustus merupakan bulan-bulan kering. Jumlah hari hujan dalam setahun tidak merata di seluruh pelosok Sumatera Barat. Jumlah hari hujan di pedalaman berkisar antara 182--186 hari, sedangkan di daerah yang relatif dekat dengan pantai berkisar antara 190--200 hari.

Curah hujan tahunan ini dapat dikelompokkan menjadi kategori 2000--3000 mm/tahun, dan kategori 4000 mm/tahun. Daerah dengan curah hujan antara 2000-3000 mm/tahun meliputi kabupaten-kabupaten Agam, Tanah Datar, Lima puluh kota, Solok, dan Sawahlunto yang sebagai besar dikelilingi dan terletak di daerah pegunungan. Sedang daerah dengan curah hujan sekitar 4000 mm/tahun adalah kabupaten Pesisir Selatan yang menghadap ke pantai Samudra Indonesia. Daerah-daerah ini merupakan dataran rendah dekat pantai.

Kondisi alam seperti inilah yang mampu mengikat sebagian penduduk Sumatera barat untuk tetap tinggal di daerahnya dan hidup sebagai petani. Jenis tanaman yang mereka tanam terutama merupakan

bahan pokok kehidupan mereka, yaitu padi, baik di sawah maupun di ladang (tegalan). Selain padi mereka juga menanam sayur-sayuran, serta komoditi lain untuk dijual seperti : cengkeh, tembakau, kopi kelapa, karet, dari kulit manis. Hasil hutan seperti damar, rotan, dan kayu juga mereka eksplorasi.

## 2.2 *Stratifikasi Sosial dan Mata Pencaharian*

Hampir seluruh wilayah di Sumatera Barat, sebagian besar penduduknya dengan perkecualian di kepulauan Mentawai, adalah suku bangsa Minangkabau. Oleh karena itu tidak terlalu berlebihan jika orang membicarakan Sumatera Barat hampir identik dengan membicarakan masyarakat Minangkabau. Dan oleh karena pula, tidak heran jika pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930-an memberikan hak otonomi kepada masyarakat ini tidak berdasarkan geografis atau hukum ketatanegaraan yang umum diterapkan di pulau Jawa, melainkan atas dasar kesatuan golongan atau kelompok (*Groepsgemeenschap*).

Pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita 1), di propinsi Sumatera Barat terdapat sekitar 543 nagari.<sup>9</sup> Menurut kepercayaan masyarakat setempat, bagian dataran tinggi yakni darat (derek) merupakan daerah asal suku bangsa Minangkabau. Kemudian mereka menyebar di desa-desa yang dikenal dengan sebutan nagari, tidak terbatas di daerah dataran tinggi saja, melainkan juga sampai ke daerah dataran rendah, seperti daerah pesisir. Secara tradisional nagari-nagari ini terikat ke dalam kesatuan yang secara budaya di Minangkabau terdapat tiga luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Secara budaya antara satu luhak sebenarnya banyak mempunyai kesamaan, namun ada juga perbedaannya yang sekaligus menjadi ciri khas dari masing-masing luhak. Perbedaan yang cukup mencolok misalnya terlihat dari pakaian adat yang mereka pergunakan, gaya bahasa, dan rumah gadang.<sup>10</sup>

Daerah di luar luhak, oleh orang-orang Minangkabau pada umumnya, dianggap sebagai daerah rantau. Mengenai batas antara daerah luhak dan rantau ini pada dasarnya dikenal secara budaya. Seperti umumnya pada masyarakat tradisional di Asia Tenggara, tidak

mengenal batas-batas geografis secara jelas seperti halnya masyarakat Eropa atau Barat. Faktor daerah rantau ini secara tradisional menjadi penting, terutama bagi kaum lelaki muda. Umumnya, lelaki yang sudah dewasa, dianjurkan untuk pergi ke rantau atau merantau. Dasar filosofis orang Minangkabau mengenai rantau ini adalah di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Artinya di mana tempat mereka merantau, diibaratkan seperti kampung halamannya sendiri. Mereka berusaha membaaur dan memahami adat setempat, sehingga terjadilah proses akulturasi budaya dalam dirinya. Sewaktu mereka kembali ke kampung halamannya, ke nagarinya, nilai-nilai baik yang mereka dapatkan semasa merantau itu, berusaha diterapkan demi kemajuan nagarinya.<sup>11</sup>

Suku bangsa Minangkabau menganut garis keturunan ibu atau matrilineal.<sup>12</sup> Artinya keturunan ditarik berdasarkan garis ibu. Demikian pula dalam hal pembagian harta, khususnya harta pusaka, di lihat berdasarkan pertalian darah dari pihak ibu. Jika dilihat secara hukum Islam, sudah tentu sistem keturunan dan sistem warisnya tidak cocok. Walaupun demikian justru suku bangsa ini terkenal sebagai suku bangsa yang fanatik terhadap Islam, di samping kukuh terhadap Adatnya. Menurut mereka, antara Adat dan Islam saling mengisi, sebagaimana yang pepatah Minang mengatakan bahwa "Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah" dan Syarak Mangato, Adat memakai masjid sebuah, balairung seruang.

Adapun yang dimaksud dengan pepatah di atas adalah Adat bersandi/berlandasan kitabullah (Al Quran), dan Syarak menjadi hukum serta adat yang menjalankannya. Suatu wilayah setingkat desa, barulah dapat dikatakan sebagai sebuah Nagari apabila di wilayah itu terdapat sebuah masjid dan sebuah Balairung/Ruang pertemuan.<sup>3</sup> Oleh karena itu di daerah Minangkabau hampir dapat dipastikan di setiap Nageri ada mesjid dan balairung. Keberadaan ini sekaligus merefleksikan keteguhan mereka terhadap Adat dan Islam. Begitu patuhnya mereka, sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang pejabat (penghulu) yang paling sekulerpun akan tersinggung harga dirinya jika dikatakan tidak beragama. Sebaliknya seorang Syaikh yang paling fanatik pun tidak akan menerima jika dikatakan tidak tahu Adat.<sup>14</sup>

Di samping hal di atas sendi kehidupan lainnya yang sangat meresap ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau ialah "harta pusako". Yang dimaksud dengan "harta pusako" ialah berupa tanah (harta) yang dimiliki bersama-sama oleh suku-suku Minangkabau tertentu secara turun-temurun. Pemanfaatannya harta pusaka itu baik yang berbentuk tanah pertanian seperti sawah dan kebun, maupun dalam bentuk lainnya seperti rumah, dilakukan secara bergilir oleh anggota masyarakat suku tersebut, dalam jangka waktu yang telah dipikati bersama. Harta pusako tidak boleh dijual atau digadai kepada penduduk lain tanpa adanya kesepakatan anggota suku. Umumnya harta kekayaan di Minangkabau merupakan tanah pusaka dan beberapa saja yang merupakan harta pribadi.<sup>15</sup>

Di dalam masyarakat Minangkabau tidak ada golongan yang menumpang. Kedudukan mereka sama (setingkat) dan bersama-sama merupakan suatu badan persekutuan teritorial (Nagari), karena itu sering disebut sebagai masyarakat *geneologis teritorial*. Atas dasar pertimbangan geneologis semacam itulah maka pada tahun 1937, wilayah ini diberikan hak otonomi yang didasarkan kepada kesatuan kelompok atau golongan, yang disebut *groeps-gemeenschap ordonantie*.<sup>16</sup> Artinya otonomi itu tidak didasarkan kepada kesatuan hukum biasa, melainkan atas dasar golongan atau komunitas masyarakat. Wilayah satu nagari kadangkala terbagi atas dasar suku-suku tertentu. Namun terdapat juga satu nagari yang tetap utuh wilayahnya berdasarkan kesepakatan semua suku yang menganggap daerah itu milik bersama.<sup>17</sup>

Ciri *geneologis-teritorial* di atas identik dengan penghidupan yang bercirikan komunal. Rasa kebersamaan yang tumbuh tercermin dalam landasan dari bersama, oleh bersama, dan untuk bersama. Masyarakat Minangkabau juga terkenal sebagai masyarakat kedudukan sederajat, serta mempunyai hak yang sama dalam memberikan pendapat. Keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup anggotanya selalu diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bisa dikatakan seseorang tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain apabila kebijaksanaan tersebut tidak disukai oleh anggota masyarakat.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat digambarkan secara umum dan menyeluruh, karena pada kenyataannya stratifikasi sosial itu hanya berlaku dalam kesatuan sebuah desa (nagari) tertentu saja, atau sekelompok desa yang berdekatan. Pelapisan itu membagi masyarakat menjadi: urang asa (bangsawan), orang biasa.<sup>18</sup>

Perbedaan lapisan sosial dapat dihubungkan dengan perbedaan kedatangan suatu keluarga ke dalam suatu tempat tertentu. Keluarga yang mula-mula datang dianggap sebagai keluarga bangsawan. Karena itu mereka dalam masyarakat Minangkabau juga dikenal sebagai *urang asa* (orang asal). Penghulu umumnya diangkat dan dipilih dari golongan ini oleh kaum yang bersangkutan. Namun dapat pula berasal dari golongan orang biasa.

Pada awal abad ke-19 masih ada golongan menumpang pada keluarga yang datang lebih dahulu dengan cara menghambakan diri. Golongan ini sering dianggap lapisan paling rendah dalam masyarakat yang bersangkutan. Jumlah orang menghambakan diri sangat sedikit, dan makin lama makin berkurang, karena mereka kemudian dianggap sebagai anggota keluarga oleh para tuannya. Bahkan semenjak tahun 1876 golongan ini boleh dikatakan tidak ada lagi dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut konsepsi orang Minangkabau, perbedaan lapisan sosial ini dinyatakan dengan istilah "kamanakan tali paruik, kemanakan tali budi, kamanakan tali ameh dan kamanakan bawah lutuik", yang terutama dilihat dari sudut seorang urang asa. Seorang kamanakan tali budi adalah keluarga yang datang kemudian, tetapi karena kedudukan mereka yang tinggi di tempat asalnya, mereka dapat membeli tanah yang cukup luas di tempat yang baru. Mereka kemudian dianggap sederajat dengan keluarga urang asa. "Kamanakan tali ameh" adalah pendatang baru yang mencari hubungan "lutuik" adalah orang yang menghamba pada keluarga, "Urang asa". "Kamanakan bawah lutuik" adalah orang yang menghamba pada keluarga urang asa, mereka sungguh-sungguh tidak punya apa-apa dan hidup dari membantu rumah tangga urang asa.<sup>20</sup>

Disamping istilah kamanakan juga lazim digunakan kata "anak buah" yang berarti orang suruhan dari penghulu. Mereka melakukan kerja berat dan berbahaya seperti membuka hutan untuk dijadikan

sawah atau ladang dan menjaga keamanan nagari sebagai pagar kampung. Tiap-tiap nagari mempunyai sejumlah anak buah barisan pengawal yang anggota-anggotanya ahli menggunakan senjata tajam dan bersilat. Mereka, lazim disebut "dubalang" (hulubalang), mereka ini umumnya terdiri dari lapisan sosial yang paling bawah.<sup>21</sup>

Pada umumnya mata pencaharian pokok rakyat adalah dari pertanian, terutama sebagai petani di sawah dan ladang. Jauh sebelum Belanda masuk ke daerah ini, sebagian besar mata pencaharian penduduk Sumatera Barat adalah dari sektor pertanian, terutama pertanian sawah dan ladang dengan padi sebagai tanaman utama. Di samping bertani, beberapa keluarga petani juga membuka usaha industri rumahan, seperti pertenunan, kerajinan logam.

Kegiatan pengrajin dan tukang-tukang di daerah pedesaan, terutama di dataran tinggi, umumnya skala kecil, dan usaha itu ditujukan untuk sekedar melengkapi kebutuhan hidup. Adapula sebagian penduduk yang hidup sebagai pedagang, baik sebagai pedagang keliling, atau pedagang yang menetap di pasar-pasar atau membuka toko sendiri. Sedangkan penduduk di sekitar pesisir atau danau, banyak pula yang hidup sebagai nelayan.

Di daerah pegunungan secara berkala dibuka pasar-pasar, yang dilakukan secara bergilir dari satu desa ke desa lainnya. Pasar bergilir ini dalam dialek Minangkabau disebut "Pakan", (artinya pasar yang diadakan sekali seminggu pada hari tertentu). Kegiatan "pakan" ini di mata penduduk tidak semata-mata sebagai kegiatan ekonomi dalam arti jual-beli saja, melainkan juga sebagai peristiwa sosial, yaitu pertemuan antar kerabat, teman dan lain-lain.

Pedagang-pedagang keliling yang biasanya berdagang keluar masuk kampung atau desa-desa, sedangkan mengikuti kegiatan pasar bergilir itu, terutama untuk menjual barang dagangannya seperti pakaian, alat rumah tangga, perlengkapan pertanian dan kebutuhan hidup lainnya. Para pengrajin-pengrajin datang selain untuk menjual barang-barangnya yang sudah jadi, dalam kesempatan itu juga menerima pesanan untuk membuat perhiasan, pakaian, atau memperbaiki perhiasan serta alat-alat perlengkapan kehidupan lainnya

yang dibawa para pengunjung atau langganannya. Tak ketinggalan dalam kegiatan ini adalah para petani setempat yang menjual hasil pertaniannya.

Dari kegiatan di atas, Nagari memperoleh bagian berupa pajak yang dipungut dari pedagang yang datang untuk berniaga di pasar tersebut. Pajak yang terkumpul biasanya dipergunakan oleh nagari untuk perayaan nagari, memperbaiki gedung kerapatan nagari dan sekedar uang lelah bagi penghulu di dewan nagari.

Ada satu tradisi yang sedikit banyak agak mempersulit kaum laki-laki yang hidup dari tanah pertanian. Di Sumatera Barat, sampai dengan awal berdirinya Republik Indonesia, seperti telah disebutkan di atas, sebagian besar merupakan tanah pusaka. Dan tanah pusaka ini dimiliki dan dikuasai oleh kaum wanita, sehingga ada semacam ketergantungan kaum pria terhadap kebijakan kaum wanita dalam masalah ini. Memang ada tradisi "abuan" yaitu semacam pemberian modal kepada anak laki-laki oleh orang tuanya bentuk abuan itu bisa berupa beberapa ekor ternak, tanaman, atau uang celengan. Namun jumlah itu, jika dikaitkan dengan modal usaha, tentu saja tidak begitu besar. Hal semacam inilah antara lain yang menjadi salah satu pendorong bagi laki-laki Minang untuk pergi merantau. Karena jika seorang laki-laki Minang tidak berilmu dan tidak berharta, akan mengalami kesulitan, terutama dalam mencari pasangannya. Sebagai catatan, sebelum Perang Dunia II, umumnya yang melamar adalah pihak perempuan.

Pada masa pendudukan Jepang, para petani banyak dipaksa oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mengerjakan kepentingan-kepentingan Jepang, misalnya memperbaiki landasan kapal terbang di Bukittinggi (Gadut) di Payakumbuh (Piobang) dan bergotong royong membuat jalan kereta api di Logas. Akibatnya banyak tanah pesawahan dan peladangan yang terlantar sehingga para petani pun banyak yang menderita.

Daerah Payakumbuh dan sekitar terkenal dengan pertanian tembakau rakyatnya, begitu juga ladang gambir dan cengkeh di Solok, semuanya tidak terurus. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan bahan



makanannya, para petani pada khususnya, dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, terpaksa beralih pada umbi-umbian, seperti umbi kayu dan umbi rambat yang masih dapat tumbuh dengan pengolahan seadanya. Ada pula yang pergi ke hutan untuk mencari jenis tanaman hutan yang dapat dimakan. Penduduk yang tinggal di pinggir sungai dan di tepi pantai sedikit agak beruntung karena dapat menangkap ikan yang tidak habis-habisnya untuk kebutuhan mereka. Selain kekurangan bahan makanan, bahan sandang pun sulit didapat di pasaran.

Pada masa penduduk Jepang ada semacam gejala baru, yaitu munculnya pedagang-pedagang yang sama sekali tidak mempunyai toko atau kantor, tetapi menguasai pasaran dagang. Pedagang-pedagang ini disebut dengan istilah "Saudagar Kilat" atau Pedagang Keliling.<sup>22</sup> Mereka ini umumnya melakukan perdagangannya secara barter. Dan barang yang mereka bawa umumnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang didatanginya. Misalnya orang-orang kota membutuhkan sayur-mayur dan lauk-pauk, maka mereka bawa adalah sayuran dan lauk pauk yang sebelumnya mereka peroleh dari orang desa dan para nelayan. Dengan cara itulah mereka mengelilingi pasar-pasar di Sumatera Barat, karena itu sebutan mereka terkenal dengan "saudagar Kilat". Tetapi dampaknya kehadiran para "Saudagar Kilat" bagi rakyat itu ternyata sangat merugikan. Sebab, mereka menetapkan harga jual di pasaran dengan seenaknya. Bahkan mereka sering menggunakan kata-kata "demi kepentingan Jepang" sebagai ancaman bagi rakyat yang tidak mau membeli barangnya, atau menawar barangnya dengan harga-harga yang dianggap terlalu murah.

### ***2.3 Perkembangan Singkat Daerah Administrasi Sumatera Barat***

Daerah yang sekarang dikenal sebagai Daerah propinsi Sumatera Barat, dalam administrasi Hindia Belanda dikenal sebagai Keresidenan Sumatera Barat. Kemudian pada tahun-tahun awal kemerdekaan masuk menjadi bagian dari provinsi Sumatera dengan status yang sama, yaitu keresidenan. Kemudian setelah adanya pengakuan kedaulatan, provinsi Sumatera dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu provinsi Sumatera Utara, provinsi Sumatera Tengah, dan provinsi Sumatera Selatan. Setelah adanya pemekaran ini, Keresidenan

Sumatera Barat ikut menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Selain Keresidenan Sumatera Barat, masih ada dua keresidenan lagi yang tergabung menjadi bagian Provinsi Sumatera Tengah, yaitu Keresidenan Riau dan Keresidenan Jambi.

Pada masa Hindia Belanda, wilayah pulau Sumatera, termasuk Sumatera Barat dimasukan sebagai wilayah gubernemen dalam arti wilayah-wilayah yang langsung diperintah oleh pejabat-pejabat gubernemen. Kekuasaan Residen waktu itu tidak terbatas pada bidang administrasi pemerintahan saja, melainkan juga dalam bidang kepolisian dan hukum. Dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari Residen dibantu oleh :

- 1) Asisten Residen
- 2) Demang
- 3) Sekretaris daerah
- 4) Panitia
- 5) Ambtenaar karesidenan
- 6) Kepala dan wakil kepala kepolisian dan reserse
- 7) Wedana dan asisten wedana polisi.

Secara administratif, wilayah Keresidenan Sumatera Barat terdiri dari empat *afdeeling* (setingkat kabupaten) dan dua *staadsgemeente* (kotamadya). Keempat *afdeeling* itu adalah :

- *Afdeeling Zuid Benedenlanden*
- *Afdeeling Tanah Datar*
- *Afdeeling Lima Puluh Kota*
- *Afdeeling Solok*

Sedangkan kedua *Staadsgemeente* atau kotamadya itu adalah :

- Padang
- *Fort de Kock*

Pembentukan kedua kotamadya itu boleh dikatakan hampir terjadi dalam waktu yang bersamaan, sesuai dengan undang-undang desentralisasi tahun 1905 untuk kedua daerah itu.

Setiap daerah administrasi *afdeeling*, terbagi lagi atas beberapa kesatuan administrasi yang disebut *onder afdeeling*. Pembagian daerah

administrasi di wilayah Sumatera yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda memang berbeda dengan pembagian yang telah dilakukannya di pulau Jawa. Di Jawa dan Madura, kesatuan daerah administratif *onder afdeeling* tidak ada. Yang ada adalah kewedanaan dengan seorang wedana sebagai kepala daerahnya.

Di bawah *onder afdeeling* adalah distrik yang kemudian di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan sebutan kademangan, sesuai dengan kepala daerahnya, yang disebut Demang.<sup>23</sup> Setiap distrik terbagi atas beberapa daerah administrasi *onder distrik*. Daerah onder distrik dikepalai seorang Asisten Demang.

Kedudukan Asisten Demang ini cukup unik jika dibandingkan pejabat yang setingkat dengannya, seperti camat di daerah pulau Jawa. Sebagai kepala daerah, ia bertanggung jawab kepada Demang. Akan tetapi dalam masalah keamanan ia bertanggung jawab kepada *Magistraat*. 'Dualisme' seperti ini terjadi karena adanya aturan yang tertuang dalam *staatsblad* No. 398 tahun 1916. Berbeda pula dengan di pulau Jawa, umumnya pejabat setingkat kabupaten seperti halnya *afdeeling*, selalu dipegang oleh orang Bumiputera. Sementara di Sumatera Barat jabatan itu, bahkan sampai jabatan Demang selain dipegang oleh orang Belanda.

Di Seluruh Sumatera Barat terdapat 20 buah distrik yang membawahi 56 buah daerah onder distrik. Seorang Demang sebagai kepala daerah dan pemerintahan distrik juga merangkap sebagai kepala polisi.

Adapun kesatuan daerah terkecil di Sumatera Barat adalah *nagari*. Kedudukan *nagari* ini kurang lebih sama dengan desa di pulau Jawa. Kesatuan administrasi terkecil ini boleh dikatakan merupakan kesatuan administrasi tradisional dalam arti sudah ada jauh sebelum pengaruh Belanda masuk ke daerah ini. Sebuah *nagari* dikepalai oleh seorang Kepala Nagari. Menurut adat, seorang kepala *nagari* diangkat secara musyawarah dalam suatu rapat adat *nagari* yang terdiri dari penghulu-penghulu adat, alim ulama, cerdik pandai dan pemuda. Artinya mereka dipilih secara demokratis.

Sewaktu Belanda masuk ke daerah ini, kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan pemerintahannya. Sistem

pengangkatan kepala nagari melalui sistem rapat adat yang demokratis itu secara resminya tetap dipelihara, namun dengan satu ketentuan tertentu yang sangat menguntungkan pemerintah kolonial Belanda. Seperti telah disinggung di atas sejak tahun 1914, pemerintah Belanda telah memberlakukan Ordonansi Nagari 1914 yang membatasi keanggotaan dewan nagari pada "penghulu inti", yaitu mereka yang diakui pemerintah sebagai "penghulu pucuk". Hanya mereka inilah yang diperbolehkan memegang kekuasaan di nagari. Dalam perjalanannya nanti kelompok adat ini memprakarsai berdirinya dewan perwakilan Sumatera Barat, yang memperkuat kedudukan mereka terhadap kelompok lain, yang kurang kooperatif dengan pemerintah.

Pada tahun 1938 di Sumatera Barat dibentuk satu lembaga semacam dewan penasehat, yang diberi nama *Minangkabau Raad*. Ketua dewan ini dipegang oleh orang Belanda, sedangkan sekretarisnya adalah orang Indonesia. Pada tahun itu yang menjabat sebagai sekretaris *Minangkabau Raad* adalah Roesad Dt. Perpatih Baringek. Berdasarkan *Staatsblad* 1938 No. 132, *Minangkabau Raad* beranggotakan 49 orang yang terdiri dari.

- a. 9 orang *Onderdaanen Nederlandees*.
- b. 2 orang *Onderdaan*
- c. 38 orang bumi putera.

Meskipun orang Indonesia atau Bumiputera yang duduk di dalam dewan itu merupakan mayoritas, namun tidak berarti mereka dapat menyuarakan suara rakyat Indonesia pribumi secara bebas. Sebab mereka dipilih setelah melalui seleksi yang ketat. Di samping itu pemerintah juga membatasi isu-isu yang boleh dibicarakan dalam rapat dewan.<sup>25</sup>

Dengan kondisi semacam itu tidak aneh jika banyak usul yang terlontar dari kalangan masyarakat Minangkabau yang ditolak oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu satu kelompok di bawah pimpinan Chatib Sulaeman mencoba merencanakan demonstrasi untuk menuntut kepada pemerintah Belanda agar peran rakyat Minangkabau untuk menentukan nasibnya sendiri dipulihkan kembali, termasuk di antaranya dalam menentukan sikap terhadap kemungkinan datangnya kekuatan Jepang. Namun usaha Chatib Sulaeman dan kawan-kawan

ini mengalami kegagalan. Ia bersama-sama dengan teman-temannya ditangkap dan dibawa ke Kutacane dan dipenjarakan di sana. Kemudian mereka diadili dengan tuduhan berusaha menggantikan pemerintahan yang sah dalam situasi darurat. Ketika Jepang menduduki daerah-daerah Sumatera Barat dan secara kebetulan Bung Karno (Soekarno) berada di kota Padang, dia telah meminta pada balatentara Jepang untuk mencari informasi tentang Chatib Sulaeman dan kawan-kawannya sampai ketemu. Usaha itu berhasil, Chatib Sulaeman dibebaskan di Kabanjahe lalu dibawa kembali ke Sumatera Barat.<sup>26</sup>

Setelah balatentara Jepang berhasil mengambil alih kekuasaan dari Belanda atas wilayah Hindia Belanda, mereka segera membentuk satu pemerintah militer, yang lebih dikenal sebagai pemerintah pendudukan, mengingat suasana darurat perang waktu itu. Walaupun namanya Pemerintah pendudukan, namun usaha-usaha untuk melakukan penjajahan memang terlihat di dalamnya. Dalam menyusun pemerintahan di Indonesia, Jepang melakukannya sesuai dengan pasukan yang berhasil menguasai daerah tersebut. Atas dasar itulah maka wilayah Indonesia dibagi atas tiga wilayah militer, yaitu :

- 1) Jawa dan Madura dikuasai dan diawasi oleh Tentara Angkatan Darat (*Riku-gun*) keenambelas yang berpusat di Jakarta.<sup>27</sup>
- 2) Sumatera dikuasai dan diawasi oleh Tentara Angkatan Darat keduapuluhlima yang berpusat di Bukittinggi.
- 3) Daerah bekas Hindia Belanda lainnya di luar kedua wilayah di atas dikuasai dan diawasi oleh Angkatan Laut (*Kai-gun*) kedua dengan kantornya terdapat di tiga daerah yaitu: Balikpapan (Kalimantan), Makasar (Sulawesi), dan Ambon (Ceram).<sup>28</sup>

Pembagian semacam ini sudah barang tentu membawa konsekuensi, yaitu munculnya pengaturan pemerintahan di daerah yang beraneka ragam. Penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya disesuaikan dengan kepentingan angkatan perang Jepang yang bersangkutan. Mulanya seperti halnya di daerah pulau Jawa, Jepang mencoba mengganti semua aparatur pemerintahan dari masa Hindia Belanda. Namun karena yang datang ke Indonesia dalam gelombang

pertama umumnya adalah kaum militer yang serba sedikit mengetahui tentang administrasi pemerintahan sipil, maka terpaksa mereka merekrut kembali para ambtenar lama. Tentu saja dalam beberapa hal pemerintah pendudukan Jepang melakukan beberapa perubahan sekaligus dimaksudkan untuk menarik hati bangsa Indonesia. Salah satu perbedaan yang cukup menonjol adalah dalam korp pegawai negerinya. Pada masa Hindia Belanda terdapat dua macam korp pegawai negeri, yaitu korp pegawai bangsa Belanda yang disebut *Nederlandse Binnenlands Bestuur*, dan korp pegawai bangsa Pribumi yang disebut *Inlandse Binnenlands Bestuur* atau lebih terkenal dengan sebutan *Pangreh Praja*. Dua perbedaan ini oleh pemerintah pendudukan Jepang dihapuskan. Dan untuk menguatkan kedudukan para pegawai serta lembaga-lembaga pemerintah itu dikeluarkan Osamu Seirei No.1/1942. Dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 3 dijelaskan :

Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintahan yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.

Perubahan lainnya yang cukup kentara adalah dalam hal nama-nama kesatuan administratif. Nama-namanya mulai dari tingkat desa (bahkan RT) sampai dengan tingkat keresidenan (provinsi dihapuskan) semua dijepangkan. Keresidenan menjadi *Syuu* (Residen menjadi *Syucokan*), Kabupaten menjadi Ken (Bupati menjadi *Ken-co*), Kotamadya menjadi *Si* (Walikota menjadi *Si-co*), Kewedanaan atau Distrik menjadi *Gun* (Wedana menjadi *Gun-co*), Kecamatan menjadi *Son* (Camat menjadi *Son-co*), dan Desa menjadi *Ku* (Kepala Desa menjadi *Ku-co*).

Seperti telah disinggung di atas, bahwa orang Jepang yang datang ke Indonesia pada gelombang pertama adalah kaum militer, sedangkan kaum sipilnya baru datang kemudian. Sebenarnya pemerintahan Jepang di Tokyo juga telah mengirimkan tenaga-tenaga sipilnya cakap dalam bidang pemerintahan ke Indonesia guna mengambil alih tugas administrasi pemerintahan setempat. Namun kapal yang mengangkutnya tenggelam diserang angkatan perang Sekutu. Akibatnya, orang sipil Jepang yang ada di Indonesia jumlahnya relatif

kecil, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kondisi seperti ini ternyata cukup menguntungkan kaum Pribumi, khususnya para ulama Islam yang semasa pemerintahan Kolonialis Belanda sering dianggap sebagai biang kerusuhan dan pemberontakan. Pada masa Jepang ini, tidak sedikit dari bangsa Pribumi yang duduk sebagai Residen atau Wakil Residen, satu kedudukan yang sebenarnya selalu dijabat oleh bangsa Belanda. Bahkan adapula dari kalangan ulama Islam yang menjabat sebagai Wakil Residen.<sup>29</sup> kalangan ulama yang ditarik menjadi penasehat oleh pemerintah pendudukan Jepang setempat. Bahkan ada pula ulama yang duduk dalam pemerintahan. Sebagai contoh, jabatan wakil residen, bahkan residen, belum pernah dijabat oleh orang Pribumi. Paling tinggi jabatan orang Pribumi adalah sebagai bupati. Sedangkan pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang karena kekurangan tenaga sipil Jepang, maka lowongan itu kemudian diserahkan kepada orang Indonesia.

Semula daerah Sumatera berada di bawah Departemen Pemerintahan Militer (*Gunsei-bu*) Tentara ke-25 yang berpusat di Shonanto (Singapura), yang selama tahun pertama pendudukan memerintah Sumatera dan Malaya.<sup>30</sup> Pada tanggal 27 Maret 1945, Tentara ke-25 di Singapura ini mengirimkan 31 orang administratornya ke pulau Sumatera guna mengambil alih jabatan-jabatan pemerintah yang semula dipegang oleh orang-orang Belanda. Namun jumlah itu terlampau sedikit sehingga mereka terpaksa menempuh cara yang dilakukan di pulau Jawa, yaitu mengizinkan para bekas pegawai Hindia Belanda untuk melanjutkan tugasnya. Lalu, pada bulan April *Gunsei-bu* mengirimkan mantan Kolonel Fujiyama bersama tiga orang asistennya ke Padang untuk mengurus pemerintahan di sana. Dia lah yang kemudian mengambil alih kekuasaan atas daerah Sumatera Barat dari Residen Belanda G.A. Bosselaar di Padang.<sup>31</sup>

Menurut Audrey Kahin, ketika pertama kali Jepang menduduki Sumatera Barat, pasukan mereka tidak begitu kuat dan tidak begitu meyakini kekuatannya untuk mampu melanjutkan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi nasionalis seperti di daerah lainnya di Indonesia. Dalam hal ini misalnya menyangkut pengibaran bendera sang saka merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia.

Dalam membentuk aparaturnya di Sumatera Barat, seperti telah disinggung di atas, Jepang tidak banyak melakukan perubahan. Susunan struktur pemerintahan Sumatera Barat pada masa pemerintah pendudukan Jepang adalah sebagai berikut :

- *Sumatera Neishi Kaigan Syu* (Keresidenan Sumatera Barat) dikepalai oleh *Syucokan*.
- *Bun (Luhak)* atau *afdeeling* dikepalai *Bun-Syuco*
- *Fuku-bun (onder-afdeeling* atau Distrik/ Kademangan) dikepalai oleh *Fuku-bun-co*.
- *Gun (Onder distrik)* dikepalai oleh *Gun-co*.
- *Fuku-gun* (kecamatan) dikepalai oleh *Fuku-gun-co*.
- Negari (kepala negeri).<sup>32</sup>

Perbedaan yang mendasar adalah posisi jabatan *fuku-bun-co* sebagai kepala Kademangan yang biasanya dipegang oleh orang Belanda (*controleur*), pada masa pendudukan Jepang ini diserahkan kepada orang Pribumi.

Di samping mempercayakan jabatan *Fuku-bun-co* kepada orang Indonesia, akhirnya pemerintah pendudukan Jepang juga mengizinkan orang-orang Indonesia mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di seluruh wilayah Sumatera Barat, berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh pula dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo*.

Tindakan pemerintah Jepang lainnya yang cukup mendapat sambutan rakyat setempat adalah diberikannya izin kepada para tokoh masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan suatu perkumpulan yang dinamai Komite Rakyat. Menurut beberapa sumber, pembentukan Komite Rakyat ini adalah atas anjuran bung Karno sewaktu ada di Sumatera Barat yang bekerja sama dengan beberapa tokoh setempat.<sup>33</sup> Perkumpulan ini umumnya bergerak dibidang sosial, seperti mengurangi ekses perang terhadap masyarakat Sumatera Barat. Para pendiri Komite itu adalah : Suska, Mr. Abu Bakar Jaar, Abdullah St. Sinaro, Syarif Usman, Ismail Lengah dan beberapa orang lain, yang semuanya berjumlah 17 orang. Pendirian Komite ini juga mendapat



bantuan dari Persatuan Saudagar Indonesia di Padang, Dan rakyat Sumatera barat pada umumnya juga menyambut dengan gembira adanya Komite tersebut. Apalagi Komite tersebut tidak semata-mata sebagai badan yang membantu kepentingan perang Jepang, melainkan banyak membantu masyarakat seperti mendirikan sekolah-sekolah dan memelihara semangat masyarakat dalam menghadapi situasi sulit karena perang.<sup>34</sup>

Sejak awal tahun 1943, situasi perang di kawasan selatan semakin tidak menguntungkan pihak Jepang. Dalam hal ini, khususnya Tentara angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Singapura merasa kesulitan dalam menerapkan kebijakan tunggal terhadap dua daerah yang berbeda-beda seperti Sumatera dan Malaya, khususnya dalam memberi perlindungan terhadap daerah sekitar kilang minyak di Palembang. Pertimbangan-pertimbangan seperti itulah akhirnya yang memaksa Tentara ke-25 ini memindahkan markas besarnya ke Bukittinggi tepatnya sejak tanggal 1 Mei 1943.<sup>35</sup> Malaya sendiri sejak itu berada di bawah Tentara angkatan Darat ke-29.

Pertahanan wilayah Sumatera barat sendiri secara khusus kemudian diberikan kepada Divisi ke-14 (Osaka atau Yodo) setelah divisi ini dipindahkan markasnya ke Padang. Namun beberapa bulan kemudian kekuatannya berkurang karena beberapa unitnya diperbantukan ke Tentara Wilayah ke-7. Kemudian sejak awal tahun 1945 sebagian besar pasukan dari divisi ini dipindahkan ke dataran Asia guna memperkuat pertahanan Jepang di sana dan kemungkinan datangnya serangan Sekutu. Dengan berkurangnya kekuatan Divisi Osaka ini, wilayah Sumatera Barat kemudian ditempatkan di bawah yurisdiksi Brigade Campuran ke-25 yang bermarkas di Tapanuli. Brigade inilah yang berkuasa sampai dengan menyerahnya Jepang ke pihak Sekutu bulan Agustus 1945.<sup>36</sup>

Setelah Indonesia merdeka, struktur pemerintahan di wilayah ini masih dipertahankan seperti semula. Statusnya pun pada mulanya masih tetap dipertahankan, yaitu sebagai satu keresidenan. Orang yang dipilih masyarakat sebagai Residen pertama Sumatera Barat di alam kemerdekaan adalah M. Syafei.<sup>37</sup> Pilihan rakyat ini mendapat persetujuan Gubernur provinsi Sumatera Teuku Moh, Hasan yang berkedudukan di Medan.

Kemudian untuk menyelaraskan dengan berdirinya Komite Nasional (KNI) Pusat, maka di Sumatera Barat pun didirikan KNI Daerah yang selanjutnya bertugas memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karena itu lembaga ini menjadi tempat berkumpulnya tenaga-tenaga pejuang dari segala golongan dan jabatan. Ketika KNI Pusat berstatus legislatif dan bersifat perwakilan, maka KNI Daerah berubah pula menjadi Dewan Perwakilan Keresidenan. Sejalan dengan itu di tiap-tiap nagari dirikan pula KNI-Nagari. Setelah KNID terbentuk selanjutnya didirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai realisasi dari perintah Presiden tanggal 25 Agustus 1945 di Jakarta.

Setelah perang kemerdekaan usai, pemerintah pusat melakukan reorganisasi. Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Keresidenan Sumatera Barat bersama-sama dengan Keresidenan Jambi dan Riau masuk ke dalam provinsi Sumatera Tengah dengan ibukota Bukittinggi.

Kemudian ketika terjadi pemekaran, Keresidenan Sumatera Barat berubah statusnya menjadi Provinsi Sumatera Barat dengan ibukotanya di kota Padang. Yang tercakup dalam daerah ini adalah delapan daerah Swatantra tingkat II (kabupaten) dan enam Kotamadya. Adapun kedelapan kabupaten itu adalah :

1. Kabupaten Tanah Datar
2. Kabupaten Agam
3. Kabupaten 50 Kota
4. Kabupaten Solok
5. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
6. Kabupaten Pasaman
7. Kabupaten Padang/Pariaman
8. Kabupaten Pesisir Selatan

Sedangkan kedelapan Kotamadya adalah sebagai berikut :

1. Kotamadya Padang
2. Kotamadya Bukittinggi
3. Kotamadya Payakumbuh
4. Kotamadya Solok
5. Kotamadya Sawahlunto
6. Kotamadya Padang Panjang.<sup>39</sup>

### *Catatan*

7. Data Curah Hujan Dan Temperatur Udara di Tabing Padang Tahun 1970-1978, dalam *Geografi Budaya Dalam Wilayah Pembangunan Daerah Sunda Barat*, Proyek IDKD, P&K, Jakarta 1986, hlm. 16.
8. *Ibid* di atas, hlm 16.
9. *Sumatera Barat Dalam Angka 1972*, Kantor Gubernur Sumatera Barat 1972, hlm. 15.
10. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah ini, lihat Idrus Hakimi, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya, 1984, h. 6--9.
11. MM. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Pasaman, 1957, h.19.
12. Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1960, hlm.7
13. Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984, hlm.17.
14. Prof. Mr.M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: CV Pasaman, hlm. 126 dan 148.
15. Prof. Dr. Soerjono Soekanto SH, MA. dan Soeleman B, Tanen SH, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hlm. 205.

16. Selain wilayah Sumatera Barat yang diberi hak otonomi berdasarkan kelompok Minangkabau, pada tahun 1937 itu adalah Banjar yang meliputi sebagian dari Kalimantan. Lihat Bayu Surianingrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia : Babak Hindia Belanda dan Jepang*, Bandung : Dewaruci Press, 1981, h. 21.
17. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya paramita, 1977, hlm. 55--57.
18. Umar Yunus, *Kebudayaan Minangkabau, Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* di edit Kuntjaraningrat, Jembatan, Jakarta, 1980, hlm. 251.
19. Taufik Abdullah, *The Beginning of the Padri Movement, paper of the Dutch Indonesian Historical Conference*, Leiden/Jakarta 1978, p. 14a
20. Umar Yunus, *op.cit*, hlm. 252,
21. M.D. Masoer et.al., *op.cit*, hlm. 12
22. Drs. Marjani Martamin, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945--1949) Daerah Sumatera Barat*, IDSN. 1980. hlm. 57.
23. Trade DP. *Sungai Puar*, Yayasan Sungai Puar Jakarta, 1966. hlm. 1
24. Mardjani Martamin, *Naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sumatera Barat*, Proyek IDKD, PPSB, Dep. P&K, tahun 1979, hlm. 19.
25. Audrey Kahin, *Op.cit*, h.19 dan h.43--44.
26. *Ibid*. h.42.
27. Mengenai struktur pemerintahan dan politik Jepang di pulau Jawa lihat Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1979, h.17--29.
28. Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, Balai Pustaka.

29. Lihat, Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*. Jakarta Jaya, 1980.
30. Audrey Kahin mengutip Shigetada Nishijima dan Kishi, *Japanese Military Administration in Indonesia*. Washington : JPRS, 1963, h. 143.
31. Audrey Kahin, *Ibid*. h.43.
32. *Ibid*. h.47.
33. George A Kanahale, "*The Japanese Occupation of Indonesia Prelude to Independence*", Ph D Thesis. Cornell University, 1967, h..28; Fatimah Enar dkk, *Sumatera Barat 1945--1950*. Padang, Pemda Sumbar, 1976, h. 4.
34. *Sejarah Daerah Sumatera Barat*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Dep. P&K, 1978, Jakarta, hlm. 98.
35. Kahin, *op.cit*.h.46.
36. *Ibid*. h.50
37. Irsda Mulyana, "*Gema Kemerdekaan di Sumatera Tengah*", *Bingkisan Nasional : Kenangan 10 Tahun Revolusi Indonesia 17-8-1945/17-8-1955*. Djakarta : P.T. Upeni. h. 54.
39. *Sejarah Sumatera Barat*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Dep P&K, Jakarta 1978, hlm 14.

## BAB III

### MASA TRANSISI

#### 3.1 *Sekitar Proklamasi Kemerdekaan*

Dalam bab sebelumnya telah disinggung bahwa sejak awal tahun 1943, posisi Jepang telah berubah, dari posisi ofensif menjadi defensif. Kekalahan demi kekalahan di setiap *front* menimpa balatentara Jepang, sehingga pemerintah militer Jepang waktu itu mulai melirik kepada potensi penduduk di daerah-daerah yang dikuasainya. Di Indonesia, mereka mencobanya dengan cara mendekati tokoh-tokoh agama dan kaum nasionalis setempat. Mereka mencoba mengajak serta dan menjadikan politik perang "Perang Asia Timur Raya" Jepang sebagai perang bersama untuk mengalahkan kaum *kapitalis imperialis* Barat. Jika di Jawa ada *Jawa hokokai*, maka, di Sumatera di dibentuk pula *Sumatera Hokokai* (Kebaktian rakyat Sumatera). Tokoh-tokoh yang terlibat dalam *Hokokai* ini antara lain: Mohammad Safei, Chatib Sulaeman, Mr.Mohammad Rasjid, Dr. Madjo Urang, Roesad Dt Papatiah Baringek, dan Syeik Djamil Djambek.<sup>40</sup>

Sejak akhir tahun akhir tahun 1944, penguasa Jepang di Sumatera juga berusaha keras untuk menarik dukungan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia melalui janji Koiso, seperti halnya di Jawa. Namun dalam beberapa hal ternyata penguasa militer di Sumatera mempunyai sedikit perbedaan pandangan dengan rekannya di Jawa. Panglima Tentara ke-25 tidak sependapat mengenai adanya kemerdekaan bagi satu

wilayah yang meliputi seluruh bekas Hindia Belanda. Mereka menginginkan wilayah Sumatera terpisah dari Jawa, dalam arti berdiri sendiri. Dalam rangka menciptakan Sumatera yang berdiri sendiri itu, Tentara ke-25 mengambil langkah-langkah persiapan, antara lain dengan mendirikan *Chuo Sangi In* (Dewan Penasehat) bagi seluruh Sumatera. Lembaga itu diresmikan pada awal tahun 1946. Berbeda dengan di Jawa, *Chuo Sangi In* di Sumatera tidak pernah mengadakan pertemuan sampai akhir Mei 1945 yang disebabkan oleh adanya pembatasan agenda dari penguasa militer. Usaha untuk pemisahan Sumatera ini pun akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh tentara ke-26 karena situasi dan kondisi yang dianggap tidak memungkinkan lagi untuk maksud itu. Dalam beberapa minggu sebelum Jepang menyerah, Tentara ke-25 mau menerima usul koleganya di Jawa, sehingga kemerdekaan untuk Indonesia pun semakin bulat. Sebagai bentuk persetujuannya terhadap usul rekannya dari Jawa, penguasa Tentara ke-25 mengiriskan tiga orang tokoh sebagai wakil Sumatera ke Jawa untuk mengikuti pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketiga orang itu ialah: Mr. Teuku Mohammad Hasan (Pengacara asal Pidie, Aceh), Dr. Mohammad Amir (dokter asal Minangkabau), dan Mr Abdul Abbas (Pengacara asal Batak Mandailing).<sup>41</sup>

Sebenarnya ketiga orang itu tidak ada yang betul-betul mewakili daerahnya. Mohammad Hasan dan Mohammad Amir misalnya, tidak pernah diangkat menjadi anggota *Chuo Sangi In* Sumatera. Ketiga orang ini tidak langsung di kirimkan ke Jakarta, melainkan ke Singapura, dengan pertimbangan akan bertemu dengan para pemimpin PPKI di kota itu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, ketiga wakil Sumatera itu bertemu dengan Sukarno Hatta yang baru kembali dari Dalat, Vietnam. Pada tanggal 14 Agustus, sewaktu Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat, pesawat militer Jepang telah berangkat mengangkutnya menuju Jakarta. Oleh karena itu, delegasi Sumatera itu ikut hadir ketika Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan bangsa Indonesia.<sup>42</sup>

Melihat kondisi geografis Sumatera Barat, ditambah adanya sikap Tentara ke-25 seperti telah disinggung tadi, yang sedikit banyak telah menghambat lancarnya hubungan dan arus komunikasi antara wilayah

ini dengan Jawa pada khususnya, sebenarnya sangat mencengangkan melihat sikap dan tanggapan masyarakat setempat terhadap datangnya berita kekalahan Jepang yang kemudian disusul dengan datangnya berita Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia.<sup>43</sup> Mereka dengan cepat mengambil sikap dan dengan inisiatif yang relatif cepat juga, segera membentuk pemerintahan yang pro Republik Indonesia.

Berita kekalahan Jepang dari pihak Sekutu sampai ke tangan tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat hampir sama waktunya dengan yang dialami para tokoh masyarakat di pulau Jawa, khususnya kota Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, seorang pejabat Kejaksaan Jepang telah memberitahukan tentang peristiwa penyerahan itu kepada Mr. St. Moh. Rasyid, yang kemudian memberitahukannya kepada beberapa rekannya. Dengan adanya berita itu, para tokoh tersebut berkeyakinan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan terjadi suatu perubahan politik di wilayah itu, khususnya Sumatera Barat. Perkiraan itu semakin jelas dengan sampainya berita Proklamasi Kemerdekaan RI. pada malam di hari berikutnya. Para pemuda yang bekerja di kantor P.T.T di Padang dan Bukittinggi dan yang bekerja di kantor berita Jepang, *Dome Sumatera Barat*, telah menangkap pembacaan teks proklamasi yang dipancarluaskan oleh pemancar *Jakarta Hoso Kyoku*.<sup>44</sup> Setelah itu mereka segera memberitahu tokoh-tokoh Sumatera Barat, dan dalam waktu dua dan tiga hari, salinan teks proklamasi itu pun telah beredar di kalangan masyarakat luas, termasuk di markas *Hokokai* di Padang, dan kantor *Giyugun* di Bukittinggi.<sup>45</sup>

Seperti telah disinggung di atas, Moh. Rasyid telah menerima berita kekalahan Jepang dari orang Jepang sendiri. Sebenarnya bukan hanya Moh. Rasyid saja yang mendengar berita kekalahan itu. Sebab, pada waktu itu ada beberapa pejabat sipil dan instruktur militer Jepang yang memberitahukan perihal kekalahan itu kepada para koleganya yang berbangsa Indonesia. Namun, sampai dengan tanggal 21 Agustus 1945, penguasa Tentara ke-25 :Jepang belum mau mengumumkannya secara resmi. Barulah pada tanggal 22 Agustus secara terbuka lewat siaran radio penguasa militer Jepang nnengatakan bahwa telah dicapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata antara Tokyo dengan Sekutu.<sup>46</sup> Beberapa hari sebelumnya Pemerintah, Pendudukan Jepang



di Sumatera Barat telah membubarkan *Giyugun*, dan telah melucuti sebagian besar tentaranya yang berasal dari bangsa Indonesia dan memulangkan ke kampung-kampungnya masing-masing.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sejumlah pemuda yang beberapa di antaranya adalah mantan *Giyugun*, mengadakan pertemuan rahasia di rumah A, Muluk, yang dikenal sebagai seorang guru di Alanglawas, Padang. Dalam pertemuan itu dibicarakan perihal berita proklamasi kemerdekaan yang telah mereka terima sebelumnya, sekaligus untuk mengecek kebenaran dan berita tersebut. Andaikata berita itu benar, mereka memperkirakan berbagai kemungkinan yang akan muncul, baik bersifat positif maupun negatif, sejalan dengan semakin menyebarnya berita tersebut di kalangan masyarakat.<sup>47</sup>

Pertemuan berikutnya diadakan pada tanggal 20 Agustus dengan mengambil tempat di Pasar Gadang, Padang. Dalam pertemuan ini, terutama para pemuda mantan *Giyugun* beserta anggota-anggota organisasi pendukungnya, yaitu *Giyugun Ko enkai*, mendorong untuk didirikannya satu organisasi yang dapat menyatukan para pemuda, sekaligus sebagai lembaga penerangan bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya yang berkaitan dengan masalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam pertemuan itu disepakati pembentukan satu badan yang diberi nama Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di bawah pimpinan Ismail Lengah, mantan perwira *Giyugun*.

Di bawah pimpinan Ismail Lengah ini BPPI pada awalnya memang menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Padang, sekaligus pos terdepan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat radikal. Dan yang cukup penting untuk dikemukakan di sini, para pemuda BPPI segera menjadi pemimpin dari kekuatan BKR yang kemudian dibentuk di Sumatera Barat. Bahkan dapat dikatakan BPPI itu sendiri berkembang menjadi kantor penghubung antara badan-badan sipil dan BKR.<sup>48</sup>

Sementara itu para pemuda di Bukittinggi tidak mau ketinggalan dari para pemuda di kota Padang. Pada tanggal 26 Agustus 1946 mereka mengadakan satu pertemuan yang dihadiri oleh seluruh organisasi pemuda, yang pada masa pendudukan Jepang umumnya tidak dapat bergerak, seperti *HW* (Kepanduan), *SIAP*, *PMI*, *HPII*

organisasi pemuda di setiap daerah, seperti *RK* dan *RT*. Mereka secara spontan berkumpul di Jalan Tembok 32. Dalam pertemuan itu diputuskan untuk mendirikan suatu organisasi pemuda yang bernama pemuda Indonesia (PI). Beberapa minggu kemudian PI diubah menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI). PRI ini bertindak untuk menjaga dan menetapkan keamanan daerah Bukittinggi. Selanjutnya PRI di seluruh daerah Sumatera Barat sampai ke nagari-nagari. PRI ini bertindak sebagai penjamin keamanan daerah masing-masing dalam rangka menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan.

Menurut Kahin, dalam banyak hal PRI mempunyai perbedaan dibandingkan dengan BPPI. Dapat dikatakan dalam beberapa hal PRI lebih menyerupai organisasi pemuda di pulau Jawa.<sup>49</sup>Selama minggu-minggu pertama revolusi, anggota PRI aktif mendorong pejabat pemerintah lokal dalam membentuk aparat Republik di kota-kota dan pedesaan. Beberapa cabang PRI bahkan memainkan peran utama dalam pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerahnya masing-masing. Tidak jarang mereka bertindak selaku "kelompok penekan" untuk membuat agar KNI lebih bercirikan badan pertimbangan ketimbang semacam *Hokokai*.<sup>50</sup>

Meskipun sejak tanggal 18 Agustus 1945 berita proklamasi kemerdekaan telah tersebar luas di kalangan masyarakat Sumatera Barat, terutama karena adanya tindakan cepat dari para pemuda yang tergabung dalam BPPI dan PRI, namun sikap dan dukungan resmi masyarakat Sumatera Barat atas isi proklamasi kemerdekaan itu baru muncul pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada tanggal itu diedarkan satu selebaran yang isinya antara lain seperti berikut :

#### PERMAKLUMAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Mengikuti dan menguatkan pernyataan kemerdekaan Indonesia oleh Bangsa Indonesia seperti proklamasi pemimpin-pemimpin besar kita Soekarno Hatta atas nama Bangsa Indonesia sebagai berikut :

## PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1946

ATAS NAMA BANGSA INDONESIA

SOEKARNO-HATTA

Maka kami Bangsa Indonesia di Sumatera dengan ini mengakui kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam proklamasi di atas dan menjunjung keagungan kedua pemimpin Indonesia itu.

Bukittinggi hari 29 bulan 8 tahun 1945

Atas nama Bangsa Indonesia di Sumatera

Mohammad Sjafei.<sup>51</sup>

Para Pemuda mencetak teks proklamasi kemerdekaan sebanyak mungkin untuk disebar-luaskan ke seluruh pelosok Sumatera Barat. Percetakan dilakukan di kantor *Padang Nippo*, dan percetakan *Gazaira* di Pasar Batipuh, Padang. Percetakan ini dilakukan pemuda dengan sangat hati-hati untuk menghindari razia Kempetai. Walaupun sudah bertindak hati-hati, tapi pada akhirnya pihak Jepang dapat menciumnya juga, sehingga para pemuda sempat berurusan dengan Kempetai. Percetakan surat kabat Padang Nippo yang sebelumnya merupakan milik Jepang, yang kemudian diambil alih para pemuda untuk mencetak selebaran tadi, pada suatu hari dikepung tentara Jepang. Namun karena kelihaihan tokoh pemuda serta pengaruh beberapa tokoh masyarakat waktu itu, peristiwa pengepungan itu tidak sempat pecah menjadi insiden berdarah.<sup>52</sup>

Dengan dukungan masyarakat itulah para pemuda yang tergabung dalam BPPI Padang dan Pemuda Rakyat Indonesia (PRI) Bukittinggi mendatangi kantor-kantor pemerintahan dan menuntut agar Jepang menyerahkan gedung-gedung itu serta persenjataan yang ada kepada mereka.

Gerakan para pemuda unuk menguasai kantor-kantor pemerintahan di Sumatera Barat dimulai dengan menaikkan bendera Merah Putih dan menurunkan bendera *Hinomaru* di kantor balai kota Padang. Sementara pengumpulan senjata dari tangan Jepang dilakukan dengan perundingan, membeli, mencuri, merampas atau bahkan menyerbu gudang-gudang persenjataan Jepang.

Penyerbuan pertama yang memakan korban jiwa terjadi di Sungai Peruh, Painan. Pasukan Jepang yang ada di daerah ini tidak mau menyerahkan gedung dan persenjataan mereka begitu saja, sementara para pemuda pun memaksanya. Akhirnya pecahlah bentrokan antara mereka. Oleh karena persenjataan serta pengalaman yang tidak seimbang, banyak korban berjatuhan dari kalangan pemuda.<sup>53</sup>

Gedung-gedung perkantoran maupun rumah-rumah bekas tempat kediaman orang-orang Jepang yang berhasil diambil alih para pemuda, kemudian diserahkan kepada KNID, yang pada waktu itu bertindak sebagai pemerintah RI. Penyerahan barang-barang rampasan itulah yang sangat membantu modal perjuangan dalam menegakkan negara Republik Indonesia di daerah Sumatera Barat.

Satu hal yang menguntungkan bagi pihak *republikein* adalah sikap pemerintah pendudukan Jepang yang masih kelihatan bingung dengan situasi politik yang dihadapinya. Sebagai pihak yang kalah perang dan terikat perjanjian dengan pihak sekutu, Jepang harus menjaga *status quo*. Namun mengingat janjinya sendiri yang sebelumnya telah diberikan kepada rakyat Indonesia, ditambah lagi dengan keadaan moralnya yang sedang jatuh ke tingkat yang paling bawah, membuat sebagian besar tentara Jepang bertindak ragu-ragu. Banyak perwira Jepang yang mendiamkan saja proses pengambilalihan gedung-gedung, persenjataan, dan kendaraan bermotor yang sangat dibutuhkan pihak RI waktu itu. Oleh karena itu, sewaktu tentara Sekutu mendarat di Padang, mereka mendapati hampir seluruh jawatan di kota tersebut telah diserahkan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia. Orang-orang *Republikein* telah menduduki fungsi-fungsi pemerintahan lokal dan kepolisian, walaupun harus diakui pula bahwa konsolidasi kekuasaan aparat pemerintahannya belum terlihat baik.<sup>54</sup>

Cabang-cabang PRI dan BPPI di daerah lainnya mengikuti langkah-langkah para pemuda di kota Padang dan Bukittinggi. Misalnya PRI cabang Solok, Batusangkar bersama-sama KNI setempat mengambil alih penjagaan keamanan di wilayah itu terutama dari tindakan-tindakan liar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebenarnya berita proklamasi kemerdekaan sampai ke daerah Solok hampir sama datangnya dengan ke kota Padang. Sebab di daerah ini ada kelompok gerakan bawah tanah di bawah pimpinan Sultan St. Malako yang selalu berhubungan dengan Jakarta. Melalui para anggotanya yang datang dari Jakarta itulah berita proklamasi sampai ke daerah Solok. Bahkan berita kekalahan Jepang sudah diketahuinya sebelum berita proklamasi itu mereka terima. Oleh karena para pemuda dan tokoh masyarakat di daerah ini relatif sudah siap menghadapi perubahan politik yang mungkin terjadi menyusul kekalahan Jepang itu. Hal ini terbukti, sejak tanggal 19 Agustus 1946 Sang Saka Merah Putih telah berkibar di daerah Solok.<sup>55</sup>

Di Padangpanjang berita proklamasi kemerdekaan itu, pada dasarnya telah diterima pada tanggal 17 Agustus 1945 itu juga. Seorang tokoh masyarakat setempat, yaitu K. Dt. Radjo Sikumbang tela mendengarnya melalui siaran radio yang dipancarkan dari Jakarta. Berita itu kemudian disampaikan kepada sahabatnya, antara lain : Ibrahim Gandhi, Muin Dt. Radjo Endah Adam BB, Buyung D. Asri, dan Raner Dahlan. Oleh orang-orang ini kemudian disebarluaskan ke kalangan masyarakat. Mereka pula yang memutuskan untuk segera mungkin mengibarkan bendera Merah Putih di rumah masing-masing sambil memberi penjelasan pada masyarakat sekitarnya. Selain itu mereka menghubungi para pemuda mantan Giyugun dan minta agar segera membentuk barisan keamanan.

Semangat mereka bertambah menggelegak setelah adanya penegasan dari Chatib Sulaiman dan dr. Rasyidin yang mengatakan bahwa Indonesia memang telah merdeka. Seperti telah disinggung sebelumnya, Chatib Sulaiman merupakan tokoh pergerakan yang pernah merencanakan demonstrasi menuntut kepada pihak Belanda agar masyarakat Minangkabau diberi kebebasan untuk menentukan

nasibnya sendiri. Dua hari kemudian di kota Padang panjang diadakan aksi pengibaran Merah Putih di setiap rumah penduduk.

Di Payakumbuh, berita proklamasi kemerdekaan diterima agak terlambat dibandingkan dengan kota-kota yang telah disebutkan di atas. Berita itu baru sampai pada tanggal 19 Agustus 1946, yaitu melalui para tokoh dan utusan yang datang dari kota Padang dan Bukittinggi. Keterlambatan ini antara lain karena di Payakumbuh pengawasan Jepang terhadap pemakaian radio relatif lebih ketat dibandingkan dengan di tempat lainnya. Di daerah ini banyak radio milik penduduk yang diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Setelah menerima berita itu para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Payakumbuh terus melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan langkah-langkah apa yang harus mereka ambil. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan itu antara lain: Daramis Taram, Arisun, Fachruddin AS, Makinuddin, dan Muin Dt. Rangkyo Maradjo. Sedangkan dari para pemuda tidak begitu jelas siapa yang datang. Hanya diketahui bahwa umumnya yang hadir dalam pembicaraan itu merupakan para pemuda mantan *Giyugun dan Heiho*.

Pembicaraan di antara mereka terutama berkisar pada masalah pengambilalihan kantor-kantor pemerintah, persenjataan dan penjagaan keamanam. Mereka mencari pemecahan bagaimana caranya agar pihak Jepang di Payakumbuh mau bekerjasama dengan mereka, terutama dalam menjaga keamanan rakyat.

Begitu juga di Batusangkar, datangnya berita proklamasi kemerdekaan itu datang agak terlambat. Berita itu baru tersebar melalui desas-desus dan pamflet-pamflet yang dibawa oleh Zainuddin St dan Chatib Sulaiman.

Hal yang sama juga terjadi di daerah Sijunjung dan Sawah Lunto, berita proklamasi itu datang cukup lambat. Bahkan di daerah Sijunjung berita proklamasi itu justru mereka terima pertama kali dari orang-orang Jepang, dan kemudian dari Demang.

Walaupun di beberapa daerah berita proklamasi itu datang lebih lambat beberapa hari dibanding daerah lainnya, namun secara keseluruhan berita froklamasi sampai ke pelosok-pelosok nagari relatif

dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan. Sambutan masyarakat Sumatera Barat terhadap berita itu umumnya sangat menggembirakan. Sebagai refleksi kegembiraan mereka, seperti telah disinggung di atas, banyak penduduk yang secara spontan langsung mengibarkan bendera Merah Putih di depan rumahnya masing-masing,<sup>56</sup> dan para pemuda di tiap-tiap nagari yang tergabung dalam *Seinendan*, *Keibodan*, dan *Bagodan* ikut bergerak mengatur keamanan nagari masing-masing. Spontanitas yang ditunjukkan sebagian besar masyarakat Sumatera Barat ini sekaligus juga mencerminkan, betapa mereka sudah demikian lama merindukan datangnya kemerdekaan itu.

### ***3.2 Pembentukan Lembaga Pemerintah dan Badan Kelasykaran***

#### ***3.2.1 Pembentukan Lembaga Pemerintahan***

Dalam bab sebelumnya telah disinggung sedikit banyak mengenai proses pembentukan KNID. Rapat-rapat yang mengarah kepada pembentukan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan di Sumatera barat sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1946 namun pada waktu itu belum ada kejelasan, lembaga-lembaga apa yang harus mereka bentuk. Sebab, selain berita proklamasi, para tokoh dan pemuda Sumatera barat belum menerima lagi berita lain dari Jakarta. Sementara itu di Jakarta sendiri pembicaraan mengenai pembentukan lembaga negara dan pemerintahan baru terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945. Pembicaraan itu diadakan di Jalan Gambir (sekarang Merdeka Selatan) No. 10. Salah satu agenda yang dibicarakan waktu itu adalah mengenai pembentukan sebuah komite nasional yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Akhirnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk sebuah badan yang bernama Komite Nasional Indonesia Pusat yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan KNIP.

Pembentukan KNIP ini sebenarnya merupakan pelaksanaan pasal 4 aturan Peralihan UUD 1945, yang isinya menyebutkan bahwa sebelum masyarakat yang mengibarkan bendera merah putih setelah mendengar berita kemerdekaan terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sesuai dengan ketentuan UUD ini, maka

segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Dengan demikian pembentukan komite itu adalah sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Setelah KNIP terbentuk, maka kepada daerah-daerah juga diinstruksikan agar secepatnya membentuk KNID untuk membantu pelaksanaan tugas Gubernur, Residen, atau Bupati, sesuai dengan tingkatannya.

Di Sumatera Barat pembicaraan mengenai pembentukan KNID diadakan pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung *Seikangansyu Hokokai* di jalan Muara, Padang. Empat puluh satu mantan anggota *Hokokai* di tingkat keresidenan bertemu di tempat itu. Dari rapat tersebut diperoleh tiga keputusan yang ditandatangani oleh Mohammad Syafei atas nama bangsa Indonesia di Sumatera Barat. Isi dari keputusan tersebut sebagai berikut :

- 1) Menyiarkan proklamasi kemerdekaan untuk seluruh Sumatera dengan anjuran bahwa dengan ini seluruh rakyat Sumatera yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta menjunjung tinggi keagungan kedua pemimpin besar Indonesia Soekarno-Hatta.
- 2) Mengeluarkan maklumat pembubaran *Seikeigansyu Hokokai* dan menyerahkan segala harta benda yang akan meneruskan cita-cita pergerakan nasional Indonesia.
- 3) Membentuk suatu Komite Nasional Daerah Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan Presiden RI tanggal 22-8-1945 dengan ketentuan bahwa untuk Sumatera waktu anggota terdiri dari anggota pengurus mantan *Hokokai* sebanyak 41 anggota.<sup>57</sup>

Keesokan harinya KNID Sumatera Barat dibentuk melalui suatu rapat yang diselenggarakan di rumah A. Muluk, di Alang Lawas, Padang. Komite ini dibentuk oleh suatu komisi yang terdiri dari Mohammad Syafei, SM Rasyid, A. Arif Dt Madjo Urang, dan Dr. M. Djamil. Rapat ini sekaligus juga merupakan rapat KNID tingkat keresidenan yang pertama Adapun susunan anggota pengurus KNID Sumatera Barat adalah :



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ketua I                         | : Mohammad Syafei   |
| Ketua II                        | : Roesad Dt. Perpatih Baringek  |
| Ketua Muda II                   | : dr. Moh.Jamil Dt. Rangkayo Tuo  |
| Seksi Usaha/Bendahara           | : Mr. St. Mohammad Rasyid   |
| Bagian Persatuan dan Pendidikan | : Mr. M. Nasroen, Saaduddin Jambek  |
| Badan Penolong Kurban           | : Chatib Sulaiman, Ismail Lengah, Perang Sulaiman, H. Abdul Wahab Amin, dr.Barhanuddin  |
| Badan Keamanan Rakyat           | : Ismail Lengah Ahmadin Dt Berbangsa,Suleiman Raden Suleiman  |
| Kesejahteraan Rakyat            | : Dt. Madjo Urang, Umar Merah Alamsyah, dr, Athos Ausri, Mr Nazaruddin.   |
| Kaum Ibu                        | : Rangkayo Dt. Tumenggung, Rangkayo Syamsidar Yahya, Rangkayo Zubaidah Munaf Rangkayo Hapoah Lanjunin, Hasan Qalby, H. Hasan Syarif Gani. <sup>58</sup> |

Pada kesempatan itu para pemimpin KNI menginstruksikan kepada para anggotanya agar secepatnya menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ke seluruh daerah dan mengawasi pembentukan KNI di setiap tingkat-tingkat kewedanaan dan nagari. Ditegaskan pula bahwa tugas KNID Sumatera Barat adalah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, sebelum Residen belum ada.

Setelah KNID Keresidenan Sumatera Barat di Padang terbentuk, kemudian dibentuk pula ranting-ranting KNI di daerah-daerah tingkat afdeling (kabupaten), kecamatan sampai ke nagari-nagari, misalnya di Bukittinggi, Batusangkar, Solok, Payukumbuh, Sawahlunto dan lain-lain.

Tugas dari KNI di daerah-daerah tingkat kabupaten atau afdeling ke bawah, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan di tingkat

keresidenan, yaitu membantu pelaksanaan pemerintahan oleh kepala daerah, seperti bupati dan camat. Selain itu juga bertugas untuk keamanan masyarakat. Sebab, pada waktu itu banyak terjadi bentrokan antara pemuda dengan pihak Jepang. Selanjutnya KNI di daerah juga berfungsi sebagai lembaga penerangan. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut dalam KNI di Kawedanan dibentuk bagian-bagian yang mengurus masalah-masalah tersebut antara lain :

1. bagian penerangan
2. bagian perbekalan
3. bagian keamanan
4. bagian wanita
5. bagian pemerintahan, dan lain-lain menurut kebutuhan waktu itu.<sup>59</sup>

Di Bukittinggi, KNID dibentuk dalam suatu rapat yang diselenggarakan di Bioskop Rex. Rapat dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Bukittinggi, seperti Ninik Mamak (kepala suku), Alim Ulama, Cerdik Pandai, pemuda dan saudagar-saudagar. Dari rapat tersebut yang berhasil terpilih sebagai pengurus adalah :

Ketua : A. Rivai  
 wakil ketua : Iskandar Tejakusuma  
 Sekretaris : N.J. Dt. Mangkuto Ameh

Adapun susunan KNID di Batusangkar adalah :

Ketua : Ahmad Syuib,  
 Ketua I : St. Utnar Said  
 Wakil Ketua I : Zainuddin St kerajaan  
 Wakil ketua II : Ibrahim Agus  
 Anggota : H.A.K.Gunung Hijau Juir Muhammad

Di Payakumbuh, KNI mengambil tempat di sekolah Taman Siswa, yang menghasilkan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : H. Darwis Dt. Tumenggung  
 Anggota : dr. H.I. St. Alamsyah H.Z. Hamidy Abu Bakar H.  
 Asmaun Fackuddin Dt. Madjo Baso Zainal Abidin

Di Padang Panjang, pembentukan KNI dihadiri oleh anggota KNID Sumatera Barat, bertempat di Sekolah Diniyah Putri. Dalam kesempatan itu terpilih susunan pengurus, yaitu :

Ketua : M. Arit  
 Wakil ketua : dr. Rasyidin  
 Ketua I Setia Usaha : K. Dt. Rajo Sikumbang  
 Ketua II Setia Usaha : Haska

Sedangkan di Solok KNID menempati dan sekaligus menjadikan sebuah rumah seorang kepala polisi sebagai kantornya. Anggota pengurus KNID Solok terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang sudah dikenal di kota tersebut antara lain :

Ketua I : A. Darwis  
 Ketua II : Sulaiman St. Malak  
 Sekretariat : Nurhakim Taniman<sup>60</sup>

Kehadiran KNI di daerah-daerah ini adalah suatu keinginan dari rakyat Sumatera Barat untuk segera mempunyai tatanan pemerintahan sendiri. Jadinya selama bulan-bulan pertama proklamasi pembentukan KNI di Keresidenan dan di setiap kewedanaan sampai ke tingkat nagari merupakan peristiwa-peristiwa sipil paling penting di seluruh wilayah ini.<sup>61</sup> Adanya KNI sampai ke tingkat nagari telah membuktikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar kehendak segelintir orang yang oportunistis seperti yang dituduhkan pihak Belanda, melainkan kehendak rakyat yang realistik.

Dengan kata lain bahwa Komite Nasional Indonesia merupakan refleksi dari kebulatan tekad bangsa Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Sumatera barat pada khususnya untuk menegaskan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Kemudian diterima satu instruksi dari Jawa bahwa anggota KNI harus ditingkatkan jumlah anggotanya menjadi 100 orang. Sesuai dengan instruksi tersebut, pada pertemuannya tanggal 4 dan 5 Oktober 1945, KNID Sumatera barat mengangkat satu komisi sebanyak lima orang yang bertugas memilih anggota tambahan bagi wakil-wakil kelompok fungsional terkemuka di Sumatera Barat. Setiap KNID di tingkat kewedanaan yang berjumlah 22 buah, juga memiliki dua orang wakilnya di tingkat keresidenan, sehingga sejak itu ada 44 orang wakil kewedanaan di dalamnya.<sup>62</sup>

Pada mulanya sebagian besar anggota KNID Sumatera Barat terdiri dari para mantan anggota *Hokokai*. Tetapi sejak akhir September keanggotaannya itu sering mengalami perubahan sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan kelompok-kelompok wakil adat, agama, cerdik pandai, dan pemuda di daerah-daerah termasuk daerah pedesaan.

Sesuai dengan perintah para pemimpin KNID tingkat keresidenan, kebanyakan wakil-wakil KNID kewedanaan membentuk cabang KNI di berbagai nagari. Namun di beberapa desa, umumnya para pemudalah atau tokoh masyarakatlah yang berinisiatif mendirikan KNI pada rapat-rapat umum nagari. Sebagaimana halnya KNI pada tingkat keresidenan, maka KNI lokal membagi keanggotaannya ke dalam wakil-wakil fungsional dan wakil daerah. Dan perlu dicatat di sini, rasa tidak puas terhadap setiap unsur yang sebelumnya pernah memegang kekuasaan di zaman Jepang atau Belanda seringkali menjadi faktor konstan yang mendorong instabilitas di beberapa daerah di Sumatera Barat seperti akan dibicarakan nanti.

### 3.2.2 Pembentukan Badan Kelasykaran

Setelah pembentukan KNI, maka dilaksanakan dekret Presiden tanggal 25 Agustus tentang pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Para pemimpin BPPI di bawah pimpinan Ismail Lengah, lalu mengirim kurir ke desa-desa untuk memanggil kembali para mantan *Giyugun*, *Heiho*, *Seinendan*, dsb, untuk segera mendaftarkan diri menjadi anggota BKR. Di samping itu mereka pun pergi mengunjungi desa-desa di sekitar kota Padang guna mengumpulkan teman-teman

lama atau bekas bawahan mereka. Kemudian mereka mengkordinasikan berdirinya BKR setempat. Kebanyakan anggota BKR itu berasal dari kompi-kompi *Giyugun* yang lama, yang kemudian dipersatukan dengan mantan *Heiho*, *Seinendan*, dan lembaga para militer lainnya. Di daerah daerah tertentu kadangkala para pemuda mengambil langkah-langkah sendiri dalam membentuk badan kelasykaran, tanpa memperdulikan anjuran atau propaganda bekas atasannya dahulu.

Sebagai satu catatan, sebelum Indonesia merdeka, pihak Jepang telah membubarkan kesatuan-kesatuan pemuda atau para militer, seperti *Seinendan*, *Giyugun*, dan PETA. Mereka dilucuti senjatanya dan dipersilahkan untuk kembali ke kampungnya masing-masing dengan membawa uang pesangon atau semacamnya. Setelah ada panggilan itu banyak mantan *Giyugun*, *Heiho*, dan lain-lainnya datang berduyun-duyun ke pusat-pusat kabupaten dan kawedanaan mendaftarkan diri untuk menjadi anggota BKR. Secara umum, kesatuan-kesatuan tentara yang teroganisir baik pada awal kemerdekaan itu, baik yang berada di kota Padang atau di luar kota tersebut, adalah tempat-tempat yang sebelumnya merupakan pusat perekrutan dan sekaligus tempat latihan *Giyugun*.

Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 terbit maklumat pemerintah mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sejalan dengan terbitnya maklumat tersebut, maka semua anggota BKR di Sumatera Barat secara otomatis menjadi TKR. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini, maka susunan kesatuan juga ikut dibenahi. Kesatuan-kesatuan yang tadinya lebih banyak mirip gerombolan liar, mulai ditata sesuai dengan jenjangnya dalam kesatuan tersebut seperti regu seksi atau peleton, kompi, dan batalyon. Menurut Ismail Lengah, pada waktu itu dia menentang pemberian pangkat begitu saja kepada anggota tentara sampai mereka dapat menunjukkan kemampuannya.<sup>63</sup> Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa pendirian TKR di Sumatera Barat agak berbeda dengan yang terjadi di Jawa. Di daerah ini hal itu tidak lebih dari sekedar perubahan nama

BKR yang telah ada.<sup>64</sup> Pada akhir bulan Oktober 1945, komando militer di Jawa menunjuk A.K. Gani, Residen Palembang sebagai koordinator seluruh kekuatan TKR di Sumatera. Setelah itu Gani menunjuk Suhardjo Hardjowadojo sebagai panglima TKR Sumatera.

Secara keseluruhan, di Sumatera telah berdiri 6 divisi TKR, satu di antaranya, divisi III yang diberi nama Divisi Banteng berada di Sumatera Tengah. Divisi Banteng ini dibagi dalam empat resimen, yaitu :

| Resimen   | Komandan       | Markas         | Wilayah Operasi |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| Resimen 1 | Syarif Usman   | di Bukittinggi | Sektor Utara    |
| Resimen 2 | Dahlan Ibrahim | di Sawahlunto  | Sektor Selatan  |
| Resimen 3 | Ismail Lengah, | di Lubuk Alung | Padang Area     |
| Resimen 4 | Hasan Basri,   | di Pekanbaru   | Riau            |

Dalam rapat Komando Sumatera bulan Januari 1946, ditetapkan Dahlan Jambek sebagai Komandan Divisi III Banteng. Sejak saat itu TKR Sumatera resmi menjadi tentara reguler.<sup>65</sup>

Adapun bagi para pemuda yang tidak bergantung ke dalam TKR, mereka tetap dalam kesatuan-kesatuan kelayakaran yang masih tetap diakui pemerintah sebagai mitra TKR dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedudukan badan-badan kelayakaran ini diperjelas dengan munculnya ketetapan Presiden RI tanggal 6 Mei 1947 agar kesatuan-kesatuan kelayakaran itu dapat bekerjasama dengan TKR.

Pihak kelayakaran sendiri menyambut gembira keputusan Presiden itu. Di Sumatera Barat kesatuan-kesatuan kelayakaran ini mengadakan rapat membicarakan langkah-langkah yang harus mereka tempuh berkaitan dengan ketetapan Presiden itu. Rapat yang diadakan pada bulan Juli 1947 akhirnya mengeluarkan satu keputusan untuk membentuk Dewan Kelayakaran. Dewan ini kemudian bergabung ke dalam Legiun Sahid.

Badan-badan kelayakaran yang berdiri pada waktu itu adalah sebagai berikut :

### 3.2.2.1. Pemuda Republik Indonesia (PRI) Bukittinggi

Seorang pemuda bernama Nusyirwan dan temannya Zainal berarti pemuda-pemuda lainnya pada tanggal 21 Agustus 1945 bertempat di kantor. Majelis Islam Tinggi/Surau Syekh Jamil Jambek di Bukittinggi untuk mengadakan pertemuan. Kemudian dilanjutkan di Jalan Tembok No. 32 Bukittinggi tepatnya di kantor Perseroan Dagang Bumi Putera untuk melanjutkan rapat sebelumnya yaitu dalam rangka pembentukan organisasi pemuda. Rapat ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi kependuan, Hizbulwathan, Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) dan organisasi pemuda HPPI yang pada masa pendudukan Jepang tidak boleh bergerak. Para rapat yang kedua ini terbentuklah organisasi Pemuda Indonesia (PI) di Bukittinggi yang kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) meliputi kota Bukittinggi dan Agam Tua.

Susunan pimpinan Pemuda Republik Indonesia waktu itu ialah :

Ketua I : Mara Karma

Ketua II : Sabaruddin Syamsuddin

Sekretaris : Adriansyah Jeni dan Syofyan Tamar

Segera setelah PRI Bukittinggi terbentuk, didirikanlah cabang serta ranting-ranting PRI di Bukittinggi dan Agam Tua. PRI ini disamping memberi penerangan tentang situasi tanah air tetapi juga mengobarkankan semangat perjuangan rakyat dan memelopori tindakan pengambilalihan gedung-gedung yang masih dikuasai Jepang.

### 3.2.2.2 "Badan Keamanan Rakyat" (BKR) Bukittinggi

Dalam rangka mengkonsolidasi tenaga perjuangan di seluruh Sumatera Barat pada umumnya yang dipelopori oleh bekas opsir dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan di Bukittinggi dibentuk pula BKR yang dipimpin oleh Dahlan Jambek mantan Letnan I Giyugun. Mereka adalah bekas anggota *Giyugun*, *Seinendan* dan *Heiho* dan pemuda, pemuda lainnya yang terhimpun dalam suatu badan yang terorganisir.

Pada mulanya BKR Bukittinggi ini hanya merupakan kelompok-kelompok kecil saja, setelah itu baru disusun sesuai dengan susunan organisasi kemiliteran yang ada. Karena jumlah anggota semakin

bertambah banyak, maka kemudian anggota BKR di ditempatkan pada beberapa asrama dalam kota Bukittinggi seperti Sanur Pinang, Kampung Pulasan, dan Ujung Karang. Persenjataan BKR umumnya diperoleh dari pihak Jepang, baik hasil negosiasi maupun hasil rampasan.

### 3.2.2.3 Barisan Hizbullah

Di Sumatera Barat, seperti halnya di daerah-daerah lainnya di pulau Jawa, pembentukan kesatuan-kesatuan militer ini pada mulanya dilakukan pula oleh kekuatan-kekuatan organisasi politik. Salah satu badan kelasykaran yang cukup terkenal di luar BKR/TKR adalah *Hizbullah*. Pembentukan kesatuan kelasykaran ini berasal dari inisiatif pimpinan Muhammadiyah. Pada tanggal 1 Oktober 1945 pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat mengumpulkan para pemuda Muhammadiyah dan mantan pandu Hizbulwathan di Padang Panjang untuk memperoleh penjelasan mengenai pembentukan satu badan perjuangan di Sumatera Barat, yang kemudian dinamai *Hizbullah*. Para pemuda yang ikut tergabung ke dalam badan perjuangan ini mendapat latihan selama 10 hari. Selesai mengikuti latihan, mereka disebarkan ke tempat masing-masing untuk membentuk barisan *Hizbullah* di daerahnya masing-masing. Pada tanggal 22 November 1945 diresmikanlah berdirinya Barisan *Hizbullah* di kota Padang Panjang, yang kemudian juga menyebar ke Bukittinggi.

### 3.2.2.4 Barisan Hulubalang

Para tokoh masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebelum golongan Adat juga tidak ketinggalan dalam pembentukan badan perjuangan. Pada tanggal 10 Oktober 1945 mereka meresmikan berdirinya Barisan Hulubalang yang diorganisir oleh Dt.Simandjo. Barisan Hulubalang ini berdiri pertama di Padang Panjang dengan pimpinan R.O, Gando Sinard kemudian menyusul kota-kota lain. Di Bukittinggi para Ninik Mamak ikut menghimbau agar seluruh warga menghimpun anak kemenaan dan membentuk Barisan Hulubalang.



### 3.2.2.5 Barisan Sabilillah

Barisan Sabilillah ini merupakan lanjutan dari organisasi sosial yang pada masa pendudukan Jepang lebih terkenal dengan M.I.T dan pernah berfatwa perang sabil dan mati syahid dalam membela bangsa dan agama kemudian lebih menjadi partai politik. MIT dalam gerakannya membahu satu barisan yang bernama Sabilillah dan bemarkas di Bukittinggi. Barisan ini dibawah pimpinan A. Gafar Jambek dengan cabang-cabangnya yang tersebar hampir seluruh Sumatera Barat. Secara keseluruhan Sabilillah di Sumatera Barat mencapai satu divisi, yang terdiri dari 4 resimen, yaitu :

Resimen I berkedudukan di daerah Padang Panjang

Resimen II berkedudukan di daerah Solok.

Resimen III berkedudukan di daerah Pesisir Selatan.

Resimen IV berkedudukan di daerah Payakumbuh.

Latihan "khusus" diberikan kepada calon perwira, yang diadakan pada awal tahun 1946. Pada tanggal 16 Maret 1946 bertempat di lapangan Atas Nagari Bukittinggi dilantik beberapa perwira yang dianggap telah lulus.

### 3.2.2.6 Tentara Merah Indonesia (TEMI)

TEMI atau Tentara Merah Indonesia dibentuk tanggal 2 Januari 1946 oleh PKI kemudian Barisan ini berubah nama menjadi BAMI (Barisan Merah Indonesia) yang tersebar hampir di seluruh Sumatera Tengah, termasuk Bukittinggi.

### 3.2.2.7 Lasykar Muslimin Indonesia (LASYMI)

Tanggal 24 Desember 1945 PERTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah membentuk LASYMI (Lasykar Muslimin Indonesia) yang kemudian dilengkapi dengan barisan puteri lasykar muslimat. Pada tiap cabang dan ranting PERTI pasti terdapat barisan ini. Di Bukittinggi, Syekh Suleman Arrasuli melantik para opsirnya pada tanggal 23 Juni 1945 dan sekaligus lasykar muslimat juga dilantik. LASYMI di Bukittinggi dipimpin oleh Sofyan Siraj.

Sewaktu kembali ada reorganisasi TKR yang diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), legiun itu ikut bergabung ke dalamnya. Namun hanya sebagian saja anggotanya terserap ke dalam TNI, sedangkan sisanya bergabung ke dalam Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK).<sup>66</sup>

### 3.3. Aksi Pengibaran Bendera Merah Putih dan Aksi Daulat

Seperti telah disebutkan di atas, di beberapa daerah di Sumatera Barat, datangnya berita proklamasi disambut masyarakat setempat dengan penuh sukacita, antara lain dengan bentuk pengibaran bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing. Hal ini antara lain terlihat di Padang Panjang. Selain aksi pengibaran bendera di Padang Panjang, masih ada beberapa aksi pengibaran bendera yang cukup dramatis di daerah-daerah lainnya, misalnya di Bukittinggi.

#### 3.3.1 Pengibaran Sang Merah Putih di Puncak Jam Gadang Bukittinggi.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang penting di Sumatera Barat pada masa pendudukan Jepang rakyat di kota dan di daerah sekitarnya menyambut proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan penuh semangat. Salah satu aksi mereka adalah mengibarkan bendera merah putih di tiap-tiap rumah, bendi-bendi, mobil topi/kopiah dan bahkan pakaian ditemplei dengan merah putih. Kelompok-kelompok pemuda bersenjata mulai bermunculan. Para pemuda dari berbagai kampung mengumpulkan senjata yang ada seperti : *badia balansa* (bedil buatan sendiri), pistol, granat, pedang, tombak dan rudus serta lain-lainnya dalam rangka bersiap untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan.

Para pemuda-pemuda di Bukittinggi rupanya belum merasa puas apabila Sang Saka Merah Putih belum berkibar di tempat yang tinggi. Oleh karena itu mereka akhirnya mengibarkan bendera Merah Putih di puncak jam gadang (jam besar), suatu tempat yang dianggap paling tinggi di kota Bukittinggi. Mulanya tentara Jepang yang berjaga di sekitar Jam Gadang "menghalangi" usaha para pemuda. Tetapi setelah melakukan perundingan kilat dengan pihak Jepang, akhirnya Sang

Saka Merah Putih berhasil dikibarkan. Tokoh-tokoh yang hadir dalam upacara pengibaran bendera itu antara lain: Mara Karma, Dahlan Jambek, Abdul Halim dan tokoh masyarakat lainnya dengan telah berkibarnya bendera Merah Putih di atas jam gadang rakyat merasa menang sambil meneriakkan "Merdeka".

Di Sungai Tanang, suatu kampung di Padang Luar, para pemuda yang tergabung dalam PRI Padang Luar juga mengibarkan bendera Merah Putih di pabrik kertas di kota ini. Mulanya niat mereka mendapat rintangan dari pihak Jepang. Sebab, pihak Jepang merasa terikat oleh perjanjian dengan pihak Sekutu untuk menjaga *status quo* Apalagi kedatangan para pemuda tidak semata-mata hendak mengibarkan bendera Merah Putih melainkan juga menuntut agar pabrik kertas itu diserahkan kepada pihak Republik.

Para pemuda berusaha mengepung pabrik dengan membawa senjata tajam dan pistol, sedang tentara Jepang mengancam akan meledakkan pabrik tersebut apabila para pemuda terus maju. Akhirnya pecah pertempuran diantara mereka. Dari pihak Republik gugur satu orang yang dikenal sebagai mantan *Giyugun* sedangkan dari pihak Jepang dilaporkan meninggal sebanyak sembilan orang. Akhirnya insiden ini dapat ditengahi oleh pimpinan pemuda "Mara Karma" Pihak Jepang akhirnya menyerah dan mengizinkan pengibaran Sang Saka Merah Putih di tempat itu.

Pertempuran Sungai Tanang ini memberi kesan yang mendalam kepada para pejuang, bahwa para pemuda Indonesia mampu menqhadapi pasukan pendudukan Jepang. Hal ini menambah keyakinan dan kepercayaan para pemuda dalam perang mempertahankan kemerdekaan, dari rongrongan Kolonialis Belanda dan para antek-anteknya.

### 3.3.2 Aksi Menentang Residen Roesad dkk.

Telah disinggung di atas bahwa Mohammad Syafei merupakan salah satu tokoh masyarakat yang cukup moderat dan dapat diterima oleh berbagai pihak termasuk penguasa pendudukan Jepang. Oleh karena itulah pada akhir tahun kekuasaannya, tokoh ini diangkat menjadi Residen Sumatera Barat. Akan tetapi dia sendiri menyadari

bahwa dirinya kurang begitu banyak memahami masalah politik. Ia lebih paham mengenai masalah pendidikan yang telah lama ditekuninya di Kayutanam-Padang. Oleh karena itu ketika suhu politik di bulan-bulan awal kemerdekaan semakin meningkat, yang ditandai antara lain oleh konflik-konflik internal, ia mengajukan pengunduran diri selaku Residen dengan alasan kesehatan. Pada awal bulan November 1945, kedudukannya lalu diserahkan kepada Roesad Dt. Perpatih Baringek, seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam kelompok adat dan seorang ahli adat Minangkabau. Semasa pemerintah Kolonial Belanda, ia merupakan pejabat Pribumi paling tinggi pangkatnya di daerah Sumatera Barat. Menurut beberapa sumber dia dikenal sebagai orang yang cukup dekat dengan tokoh nasionalis Tan Malaka.<sup>67</sup>

Penunjukkan Roesad sebagai Residen sebenarnya tepat mengingat dia mempunyai cukup pengalaman dalam bidang pemerintahan. Namun latar belakangnya sebagai mantan birokrat Kolonial Belanda telah menjadi kendala bagi ruang geraknya dalam membenahi administrasi pemerintahan di daerahnya. Berbagai cara telah ditempuhnya untuk melunakan sikap ketidak senangan penduduk setempat terhadap mantan-mantan pegawai kolonial, antara lain dengan menempatkan "pemimpin rakyat" sebagai pemimpin *Luhak* atau Bupati. Pemimpin rakyat itu biasanya merupakan tokoh paling berpengaruh dan paling kuat di daerah setempat. Umumnya para pemimpin rakyat ini sangat lemah pengetahuannya mengenai administrasi pemerintahan. Sementara mantan pegawai kolonial yang *nota bene* mempunyai pengalaman administrasi yang baik ditempatkan sebagai wakilnya. Akan tetapi usahanya itu nampak sia-sia. Bahkan ada yang menuduh bahwa penempatan pejabat-pejabat baru pada posisi-posisi di pemerintahan itu tidak didasarkan kepada kemampuan, kualifikasi, atau pun keyakinan atas sifat revolusionernya, melainkan ditentukan oleh hal-hal yang berbau *nepotisme*, atau koncoisme, baik dengan Roesad sendiri atau dengan sejumlah anggota KNI di tingkat Keresidenan. Keadaan ini kemudian diperparah oleh kondisi ekonomi yang semakin memburuk, terutama di daerah-daerah pantai sebelah selatan keresidenan.

Keadaan seperti itulah akhirnya mendorong munculnya gerakan-gerakan rakyat yang bermuara pada munculnya kerusuhan, yang intinya menentang para pejabat baru tersebut gerakan-gerakan yang cukup menonjol terjadi misalnya di Painan, Talu, Payakumbuh, dan Solok. Untuk meredam keadaan ini, Roesad mencoba mengatasinya dengan cara mengganti pejabat yang 'didaulat' rakyat. Namun tindakannya ini justru menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota KNID Keresidenan. Mereka secara terbuka melakukan oposisi terhadap Roesad disertai tuntutan agar memberhentikan semua pejabat yang pernah bertugas dalam pemerintahan Belanda dan Jepang. Tekanan-tekanan ini akhirnya membawa ke arah pertengahan baru melawan Gubernur Sumatera Hasan. Dt. Simaradjo, pimpinan partai adat MTKAAM dan Azis Chan yang saat itu menjabat sebagai wakil Walikota Padang, mengajukan tuntutan kepada Gubernur agar memberhentikan Roesad selaku Residen Sumatera Barat.

Mulanya Gubernur Hasan mencoba mempertahankan Roesad pada posisinya. Namun karena dalam rapat pleno KNID Sumatera Barat yang diadakan pada tanggal 16 Maret 1946 yang dihadiri Gubernur. Hasan tuntutan itu tetap disuarakan, maka akhirnya Roesad terpaksa digeser menjadi Residen yang diperbantukan kepada Gubernur. Rapat pada pertengahan bulan itu sekaligus memilih Dr. Mohammad Djamil Dt. Rangkayo Tuo sebagai Residen Sumatera Barat menggantikan posisi yang dulu ditempati Roesad ..<sup>68</sup>

### **3.4 Masalah Volksfront (Persatuan Perjuangan)**

Penempatan Mohammad Djamil sebagai Residen Sumatera Barat rupanya cukup cepat. Kemampuannya berbicara, ditambah, dengan sikap tanpa komprominya terhadap Belanda dalam setiap pidatonya di seluruh daerah Keresidenan membuat namanya cukup populer di kalangan masyarakat. Sikapnya yang cukup terang-terangan anti Belanda menyebabkan pihak Belanda mencapnya sebagai ekstremis yang cukup berbahaya. Di samping itu di kalangan orang Republik juga, khususnya di kalangan anggota KNI, terdapat beberapa orang yang kurang begitu menyukainya. Misalnya yang tidak menyukainya secara pribadi antara lain Chatib Sulaiman.<sup>69</sup>

Rapat KNI pada pertengahan Maret 1946 itu, selain memilih Mohammad Djamil, juga sepakat untuk membentuk *Volksfront* Sumatera Barat dengan mengambil model Persatuan Perjuangan yang dibentuk Tan Malaka di pulau Jawa. Adanya lembaga *Volksfront* ini diharapkan perbedaan pendapat dan konflik-konflik, personal, politik, dan ideologi yang terjadi sebelumnya dapat diatasi. Tak lama kemudian cabang-cabang *Volksfront* didirikan di distrik-distrik dan nagari-nagari yang diprakarsai oleh KNID setempat. Berdasarkan hasil rapat KNID Sumatera barat ditetapkan bahwa *Volksfront* bertanggungjawab untuk permasalahan ekonomi Sumatera Barat, dengan tugas utamanya adalah membiayai dan menyediakan suplai Angkatan Bersenjata Republik. Guna mendukung rencana tersebut, KNI mentransfer *fonds* kemerdekaan kepada lembaga itu, dan melimpahkan urusan ekonomi kepada badan tersebut, seperti memungut pajak dari masyarakat. Sebagai catatan, modal awal *fonds* kemerdekaan itu berasal dari pembendaharaan *Hokokai* yang diambil alih KNI, lalu ditambah modalnya melalui gerakan pengumpulan dana masyarakat.<sup>70</sup>

Harapan rakyat terhadap Residen Baru dan *Volksfront* sebagai mitra dalam mengatasi masalah perekonomian di Sumatera Barat ternyata hanya berjalan dalam waktu tidak begitu lama. Pertentangan antara Residen dengan *Volksfront* mulai mencuat setelah ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh badan tersebut dinilai oleh Residen melampaui wewenangnya. Ternyata *Volksfront* tidak hanya memungut pajak, tetapi juga memungut bea masuk atas setiap barang yang keluar masuk kota-kota. Selain itu *Volksfront* menganggap dirinya sebagai satu-satunya badan perjuangan yang berhak memungut pajak. Bahkan di beberapa daerah *Volksfront* juga melarang partai-partai politik mengumpulkan bantuan makanan dan uang dari rakyat. Padahal cara tersebut mulanya merupakan hal yang biasa bagi partai untuk membiayai lasykar perjuangan yang dibentuknya.

Sumber konflik yang paling utama antara Residen melawan *Volksfront* itu terutama dalam masalah moneter, yaitu sewaktu pemerintah Republik berusaha menggantikan mata uang Jepang dan Nica dengan mata uang Republik. Dalam menangani masalah ini, *Volksfront* telah mengambil langkah ekstrim yang justru menyebabkan kekacauan ekonomi semakin meningkat di Sumatera Barat. Oleh

karena itu Residen terpaksa mengambil alih kendali dan membatalkan semua keputusan Volksfront, walaupun sebelumnya telah disepakati bahwa masalah ekonomi adalah menjadi hak badan tersebut. Bahkan pada tanggal 5 April terjadi satu deklarasi bersama dengan tokoh-tokoh Volksfront yang menyatakan bahwa badan tersebut setuju untuk mengembalikan kekuasaan ekonominya kepada pemerintah.

Usaha kompromi antara Residen dan *Volksfront* itu ternyata kurang begitu menolong keadaan. Masyarakat, terutama di daerah pedesaan menjadi bingung dan tidak tahu pasti, pedoman siapa sebenarnya yang harus dipatuhi dan dituruti. Dalam suasana begitu muncul beberapa peristiwa yang cukup serius bagi keutuhan perjuangan masyarakat Sumatera Barat, yaitu peristiwa Baso dan Peristiwa 3 Maret 1947.

#### 3.4.1. Peristiwa Baso

Baso adalah sebuah kecamatan yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari kota Bukittinggi. Gerakan di daerah ini yang disebut sebagai Gerakan Baso dipimpin oleh Abdul Rahman Tuanku Nan Putih dan saudara tirinya, Burhan Malin Kunieng Tuanku Nan Hitam. Pusat Gerakan Baso berada di Sarik Lawas di atas bukit dekat kecamatan Baso. Tuanku Nan Putih adalah ulama yang berpengaruh di daerahnya sejak tahun 1920-an. Sewaktu pemberontakan PKI tahun 1927 dia ditangkap Belanda lalu dibuang ke Madura selama tiga tahun. Dalam tahun 1930-an ia bergabung dengan Permi dan PNI Baru. Pada masa pendudukan Jepang, ia mendorong para pengikutnya untuk masuk *Giyugun*.

Sewaktu Jepang kalah, dia bergabung dengan saudara tirinya Tuanku Nan Hitam yang baru pulang dari Bangkinang bersama tiga perwira Jepang dengan sejumlah truk. Dari ketiga perwira Jepang itulah Tuanku Nan Putih dan Tuanku Nan Hitam mendapat bantuan latihan militer bagi sejumlah pemuda setempat yang memperoleh reputasi sebagai jagoan yang gagah berani. Kedua tokoh ini menyokong Program Minimum Tan Malaka yang hanya mau berunding dengan pihak Sekutu atau Belanda atas dasar pengakuan 100% Indonesia Merdeka. Bahkan Tuanku Nan Hitam menafsirkan

100% merdeka itu radikal lagi daripada saudaranya. Pengikut kedua orang ini sebagian ikut bergabung di garis depan kota padang, sementara yang lainnya mulai melakukan tindakan-tindakan revolusioner di sekitar kecamatan Baso.

Seperti juga beberapa kekuatan revolusioner yang fanatik di Jawa, Gerakan baso umumnya juga mengarahkan sasarannya kepada orang-orang yang dianggap terlibat dengan kekuasaan Kolonial Belanda contohnya Landjumin Dt. Tumanggung bekas perwira tinggi dan anggota Volksraad zaman Kolonial Belanda (bapak angkat Chaerul Saleh) diculik dan dibunuh.<sup>71</sup>

Pengaruh gerakan ini sampai ke kota Tengah, Suaian dan lain-lain. Menurut beberapa sumber ajaran Tuanku Nan Putih dan Tuanku Nan Hitam ini menganggap bahwa agama adalah bohong belaka, Tuhan Allah itu tidak ada, surga dan neraka cuma ada di dunia saja bukan di akhirat. Barang siapa yang mengerjakan solat di tangkap. Bisa saja keterangan ini salah dan terlalu mendramatisir mengingat tindakan-tindakan para pengikut kedua orang itu dinilai cukup keji seperti tidak mengenal Tuhan.

Gerakan Baso ini mempunyai barisan sendiri, dan mempunyai pos-pos penjagaan di antara jalan Bukittinggi dan Payakumbuh disebuah jalan sepi yang bernama *Ujung Tengah*. Anggota gerakan ini melakukan perampokan, pencurian, penculikan dan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang yang dianggap mereka sebagai lawan-lawan atau yang tak disenangi kerbau, sapi, beras, dan padi menjadi sasaran pencurian dan perampokan. Pada malam hari mereka merampok berkeliling kampung. Menurut kepercayaan pemimpin mereka, orang-orang yang tidak masuk gerakan mereka, boleh dibunuh dan orang itu dianggap sebagai kolonialis karena itulah banyak orang-orang yang mereka tuduh sebagai kapitalis atau kaki tangan kolonialis hilang begitu saja atau dikabarkan dibunuh oleh Gerakan Baso ini.

Ada yang mengatakan bahwa Gerakan itu mengajarkan bahwa "Neraka dan Surga" itu ada di dunia. Orang-orang yang diculik itu kemudian disiksa di dalam Neraka ciptaan mereka. Salah seorang tokoh masyarakat yang disiksa sampai mati di Neraka itu adalah Datuk Temanggung.



Gerakan Baso ini semakin meningkat di saat pemerintah terpecah belah dan belum memiliki komando tentara yang memadai. Pemerintah sendiri pernah mengirim utusan untuk membujuk kedua bersaudara itu untuk melunakkan tindakan-tindakan mereka yang mengarah kepada tindakan yang semakin brutal. Namun usaha itu tidak berhasil.

Para pemimpin Keresidenan semakin khawatir atas gerakan baso itu, terutama berkaitan dengan politik yang ditempuh Pemerintah Pusat yang dianggap sangat kompromistis terhadap kekuatan Belanda, yang sangat tidak memuaskan kalangan masyarakat Minangkabau. Sementara gerakan baso dikenal sangat mencela setiap tindakan kompromistis terhadap Inggris dan Belanda. Selain itu Gerakan Baso mempunyai lasykar bersenjata yang cukup lengkap yang benar-benar berada di luar kontrol pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah sangat khawatir gerakan itu dapat mengilhami dan memicu rasa ketidakpuasan yang menggumpal di kalangan masyarakat Minangkabau itu menjadi satu aksi kerusuhan yang sangat merugikan kekuatan Republik dalam menghadapi kekuatan Belanda dan antek-anteknya.

Untuk mencegah munculnya permasalahan yang lebih serius; lagi maka akhirnya pemerintah di Sumatera Barat memrintahkan 3 batalyon Resimen I untuk bergerak menuju Baso. Daerah-daerah yang menjadi sasaran operasi ini ialah kampung-kampung Simarasok, Sungai Sarik, Pincuran Putih, Ujung Gubuk, Kotatinggi, dan hampir seluruh daerah kecamatan Baso. Operasi militer besar-besaran itu boleh dikatakan tidak mendapatkan perlawanan yang cukup berarti dari Lasykar Baso yang sempat menakutkan itu. Operasi tersebut berhasil menangkap puluhan anggota-anggota Gerakan Baso beserta kedua pemimpin mereka Tuanku Nan Hitam dan Tuanku Nan Putih. Gerakan operasi penumpasan berlangsung sampai tanggal 16 April 1946. Menurut Abdul Halim, Komandan Batalyon-2 dari Resimen I, jumlah korban dari peristiwa itu berjumlah sekitar 113 orang meninggal dunia.

Kedua tokoh Baso itu kemudian dijatuhi hukuman mati. Menurut pihak keluarga kedua tokoh baso itu, mereka tidak pernah diberitahu

secara resmi tentang hukuman itu. Bahkan mereka tak pernah menerima kembali mayat dari anggota keluarganya itu.

Unjuk kekuatan dari pihak pemerintah itu dianggap perlu mengingat situasi politis di Sumatera Barat cukup kritis. Tindakan yang mereka ambil sekaligus dimaksudkan sebagai kekuatan-kekuatan yang mencoba-coba membelot dan memanfaatkan kekacauan di daerah lain di Sumatera Barat.

### *3.4.2 Peristiwa 3 Maret 1947*

Peristiwa 3 Maret 1947, pada hakekatnya merupakan konflik antara berbagai kekuatan-kekuatan sosial setempat, khususnya dua kekuatan sosial, yaitu pemerintah dengan TRI-nya (kemudian berhadapan dengan tokoh-tokoh cendekiawan berpendidikan Barat, partai-partai dengan lasykar bersenjata). Latar belakang terjadinya peristiwa 3 Maret 1947 adalah :

- a. Rasa tidak puas dari golongan agama yang merasa bahwa pemerintah sudah dipengaruhi golongan sosialis dan komunis terutama dilihat dari penasehat-penasehat sipil keresidenan yang dekat dengan Residen, hampir semuanya dari partai sosialis atau komunis.
- b. Di dalam tubuh pemerintah dan TRI tumbuh golongan cendekiawan yang berpendidikan Barat yang dianggap hanya mementingkan keduniawian dan mengabaikan agama.
- c. Masyarakat merasa tidak puas terhadap sikap pemerintah yang dianggap memberi peluang pada Sekutu (NICA) sehingga mengakibatkan lambannya revolusi.
- d. Rasa tidak puas melihat kehidupan mewah sejumlah perwira Divisi IX dan dianggap banyaknya korupsi mulai menghinggapi golongan perwira.
- e. Di tubuh TRI sendiri timbul kecemburuan sosial antara perwira-perwira dengan bawahannya. Kecemburuan ini tampak nyata ketika diadakan penggabungan lasykar ke dalam tubuh TRI Banyak yang belum adanya penggabungan berpangkat setingkat

perwira, lalu setelah bergabung ke dalam tubuh TRI justru mengalami penurunan pangkat.

- f. Sedang masyarakat Sumatera Barat yang pada waktu khususnya di Bukittinggi kondisi sosial ekonomi sedang merosot ke tingkat kemiskinan. Sementara pihak TRI justru banyak melakukan tindakan berfoya-foya.

Namun menurut satu sumber, alasan terpenting dari pemberontakan itu adalah kejengkelan beberapa tokoh polisi agama setempat akibat adanya ketidakseimbangan pengaruh mereka di antara pemerintahan pedesaan dan dukungan yang mereka peroleh dari pedesaan itu. Tokoh-tokoh Islam seperti Saalah Jusuf Sutan Mangkuto dan Adam B.B. menyaksikan situasi di keresidenan yang memonopoli posisi penting di lingkaran petinggi sipil dan militer adalah kelompok intelektual sekuler. Padahal yang memenangkan dalam pemilihan nagari adalah kelompok agama, khususnya yang mendapat dukungan partai Masyumi.<sup>72</sup>

Ketidakpuasan kelompok Islam memuncak sewaktu diadakan pertemuan KNIP di Malang yang bertujuan mengesahkan isi perjanjian Linggarjati. Beberapa kelompok agama menjadi yakin bahwa kaum intelektual berpendidikan Belanda, yaitu yang pada waktu itu memimpin pemerintahan keresidenan yang berusaha mencari simpati dan berpikir cara Belanda.

Bertolak dari faktor-faktor di atas, kemudian muncul suatu badan yang bernama PAKI (Pemberantas Anti Kemerdekaan Indonesia) yang digerakkan oleh beberapa partai politik Islam dan kelompok lasykar agama dan sekular. Tanpa disadari gerakan mereka telah dieksploitir oleh kaki tangan Belanda Selain S.J Sutan Mangkuto dan Adam B.B. terdapat nama Nazaruddin Dt. Rajo Mangkuto, tokoh Lasykar adat *Hulubalang*. Dt, Simatadjo, sekretaris MTKAAM, dan Bachtiar Junus yang dikenal sebagai Mayor Jenderal Hizbullah di Sumatera. Gerakan ini menyebar di berbagai kota di Sumatera Barat. Rencana gerakan ini antara lain :

- 1 Akan mengadakan perebutan kekuasaan di Bukittinggi serta kota-kota lainnya dari tangan sipil dan militer.

2. Sebagai alat untuk melaksanakan gerakan dipilihlah Barisan *Hizbullah*, tetapi dinyatakan hanya beberapa orang saja.
3. Akan menyerahkan ulama-ulama untuk membantu memotivasi rakyat dalam rencana perebutan kekuasaan. Rapat-rapat ulama diadakan antara lain di Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang Panjang, Solok, Pariaman.
4. Rencana perebutan kekuasaan ini akan diadakan tanggal 3 Maret 1947.

Sesuai dengan rencana, menurut gerakan ini, pada tanggal 3 Maret 1947 *Hizbullah* akan melaksanakan perebutan kekuasaan Walaupun kenyataan hanya beberapa orang saja yang tergabung dalam gerakan ini. Gerakan ini secara simultan dilancarkan di Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Pariaman da beberapa kota lainnya di Sumatera Barat. Dalam perebutan kekuasaan ini ternyata hanya tokoh-tokoh sipil yang dapat ditangkap. Sedang sasarannya sebenarnya adalah perwira-perwira TRI seperti Ismail Lengah, A. Alim dan lain-lain, berhasil lolos. Bahkan TRI kemudian mampu menguasai keadaan. Hanya di Jambu Air dan Tarok (Bukittinggi) terjadi pertempuran, walaupun akhirnya pihak TRI yang dapat menguasai keadaan.

Di kota lain seperti Padang Panjang, Payakumbuh dan Pariaman, gerakan ini tidak jadi meletus karena situasi segera dapat dikuasai TRI. Semua pemimpin dari gerakan ini dapat ditangkap. Ternyata mereka berasal dari berbagai aliran dan golongan. Mereka kemudian diajukan ke pengadilan. Putusan pengadilan menyatakan bahwa gerakan itu tidak ditanggapi oleh suatu partai tertentu dari golongan Islam. Hal ini sekaligus menimbulkan bahwa Masyumi bersama *Hizbullah*-nya merupakan organisasi yang bersih, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini.<sup>73</sup>

Setelah peristiwa-peristiwa tersebut di atas Volksfront menyerahkan kembali kekuasaannya kepada penguasa militer dan penguasa sipil pemerintahan Keresidenan. Tindakan itu kelihatannya seperti suatu kemenangan Residen Mohammad Djamil atas *Volksfront*. Akan tetapi banyak pula yang menilai sesungguhnya Residen Djamil adalah Residen yang lemah sehingga kurang cocok dengan situasi

politik waktu itu yang semakin memanas dengan kedatangan pasukan Sekutu, terutama Belanda. Namun para tokoh KNI khawatir jika terjadi penggantian Residen justru akan menurunkan prestise pemerintahan Sumatera Barat. Jalan keluar akhirnya muncul, yaitu sewaktu Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga sub-provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Mohammad Djamil dapat dibujuk untuk menerima jabatan sebagai sub-Gubernur Sumatera Tengah. Sedangkan posisinya sebagai Residen digantikan oleh Mr. Mohammad Rasjid yang dapat diterima oleh para pemimpin *Volksfront*.

### *Catatan*

- 40 Audrey Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan : Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945--1950*. MSI Cabang Sumatera Barat, 1989, h. 60.; George S. Kanahela, "*The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence*." Ph D dissertation, Cornell University, 1967, h. 314.
- 41 Kahin, *Ibid.* h.61
- 42 Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Djakarta : Tintamas, 1970, h.20--27.
- 43 *Ibid.* h.86.
- 44 Sewaktu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, para pegawai stasion radio *Jakarta Hosokyo* dari kalangan bangsa Indonesia menyadari arti pentingnya pemancar radio guna menyebarkan berita proklamasi itu, bukan saja ke pelosok Indonesia, melainkan juga ke luar negeri. Oleh karena itu, setelah mereka memperoleh salinan teks proklamasi itu, mereka berusaha untuk menyiarkannya melalui stasion radio milik Jepang itu. Usaha itu sedikit mendapat hambatan karena sejak Pemerintah Jepang menyatakan menyerah kepada pihak Sekutu, mereka memperketat pengawasan terhadap gerak-gerik para pegawai station radio yang bukan bangsa Jepang. Namun berkat usaha Joesoef Ronodipuro, Sjahboedin dan Ssoeprapto, akhirnya usaha teks proklamasi dapat disiarkan melalui stasion Jakarta Hosokyo ke forum internasional. Teks

- itu dibacakan pada jam 19.00 dan berlangsung selama 15 menit. Tindakan para pemuda itu membuat penguasa Jepang marah dan sebagai balasannya stasion radio itu ditutup. Retno Prabandari. *RRI Jakarta Semasa Revolusi* (Skripsi S-1 pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta).
45. Menurut Nasrun, teks proklamasi yang sesungguhnya telah diterima pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian pada saat pertemuan di rumah Sr. Rasyidin di Padang Panjang, yang dihadiri antara lain oleh Moh. Syafei dan Chatib Sulaeman, teks tersebut diperbanyak di kantor *Hokokai*, yang kemudian dibagi-bagikan ke seluruh Padang pada sore harinya. Lihat *Haluan*, tanggal 10 Agustus 1976. Sementara itu Syamsul Bahar dalam harian yang sama mengatakan bahwa salinan teks proklamasi itu diperbanyak di kantor *Giyugun Ko en kai* di Bukittinggi. Lihat *Haluan*. Tanggal 15 Agustus 1975.
  46. Kahin, *op. cit* h. 87.
  47. Prof. Drs. Amura d.k.k. *Bahder Djohen: Pengabdian Kemanusiaan*. Jakarta : P.T. Gunung Agung, 1980.
  48. Kahin, *op.cit.* h.89.
  49. *Ibid.* h.90.
  50. *Ibid*
  51. Amura, *op.cit.* h. 23-29.
  52. *Ibid.* h. 29.
  53. Drs. M.D. Mansoer. e.al. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta : Bhatara, 1970.
  54. Kahin, *op.cit* h.93.
  55. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945--1949) Daerah Sumatera Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal kebudayaan. Proyek IDSN, 1980.
  56. Keterangan ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sebab, kalau benar banyak masyarakat yang mengibarkan bendera merah

putih setelah mendengar berita kemerdekaan tersebut, berarti pada hari-hari sebelumnya di rumah masing-masing telah ada paling tidak kain merah putih, atau bendera merah putih itu sendiri.

57. Noersoehoed Achir, "Cerita kekalahan Jepang Waktu itu Bagai Gelombang Kenikmatan tak terkirakan, *Semangat* 27--31 Agustus 19--31 Agustus 1982 dan 1 September 1982.
58. Drs. Mardjani Martamin, *Sejarah Revolusi 1945--1949 : Daerah Sumatera Barat* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal kebudayaan. Proyek IDSN, 1980.h.115.; Lihat pula Kahin, *op.cit.* h.93--94.
59. *I b i d.* h. 128.
60. *Ibid*
61. Kahin. *op.cit* h. 93.
62. Kahin, *op.cit.* h.94.
63. Kahin mengutip hasil wawancara dengan Ismail Lengah. Lihat Kahin, *op.cit.* catatan No. 43, bab. III.
64. *Ibid.* h. 92
65. *Ibid*
66. Abdul Halim (Aling), "Tentara Nasional Indonesia Divisi IX/Banteng-Sumatera Tengah (Sebuah Uraian Ringkasan)"*Gema Bukit Api*" No.2 & 3 Mei/Agustus 1990.h.4.
67. Lihat Kahin, *op.cit.* catatan kaki no.90, bab 3.
68. Kahin, *op.cit* h.103--104.
69. *Ibid.* h.105.
70. *Ibid*, h.106.
71. *Ibid.* h.108.
72. Lihat Hamka. *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta : Bulan Bintang, 1975,h.59.
73. Enri Gani *Perlawanan Rakyat Sumatera Barat Pada Masa Revolusi : Dalam Perspektif Historis* (Skripsi Sarjana Sastra FSUI, 1996)



## BAB IV

### Jatuhnya Kota-kota RI di Sumatera Barat

#### 4.1 Kedatangan Tentara Sekutu/ Belanda di Sumatera Barat

Wilayah Indonesia pada dasarnya berada di bawah *South East Asia Command* (SEAC) yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat. Namun oleh Amerika Serikat pengawasan terhadap wilayah Indonesia diserahkan kepada Inggris. Atas dasar itulah kemudian Inggris membentuk *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI berkekuatan tiga divisi dengan tugas melaksanakan Perintah Gabungan Kepala-kepala Staf Sekutu yang diberikan kepada SEAC, diantaranya :

1. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
4. Menegakan dan mempertahankan keadaan damai terutama di kota-kota besar (Jakarta, Semarang, Surabaya, Padang, Medan) untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintahan Sipil.
5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang, dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.<sup>74</sup>

Untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi politik di Indonesia. Sekutu mengirimkan satu misi di bawah pimpinan Mayor A.G. Greenhalgh. Pada 8 September 1946, mereka diterjunkan di Bandar Udara Kemayoran dengan tugas mempersiapkan pembentukan markas besar sekutu, dan mengadakan kontak dengan kamp-kamp interniran sekutu. Namun apa yang mereka jumpai di Jakarta, berada di luar perhitungan mereka. Bangsa Indonesia telah memanfaatkan kekosongan kekuasaan-akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu. memproklamasikan kemerdekaannya. Walaupun demikian, mereka melaporkan kepada atasannya Laksamana Muda Patterson, bahwa mereka telah berunding dengan Mayor Jenderal Yamaguchi tentang tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pihak Jepang sebelum pasukan Sekutu datang. Adapun mengenai proklamasi kemerdekaan serta pemerintahan RI dilaporkan sebagai gerakan rakyat yang kacau dan tidak terorganisir.

Misi Greenhalgh ini kemudian disusul oleh misi kedua yang tiba di Jakarta pada tanggal 15 September 1945 dengan menggunakan kapal penjelajah *Cumberland*, yang dikawal kapal penjelajah Belanda *Tromp*, dan membawa rombongan, RAPWI, Palang Merah Inggris dan pejabat-pejabat penting Belanda antara lain Van Der Plas dan Van Straten. Kapal itu juga membawa rombongan Skadron Penjelajah V Inggris Laksamana Muda WR Patterson dan mendaratkan sebagai Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia.

Dalam Perjalanan rombongan Sekutu dari Tanjung Periuk ke kota Jakarta, rombongan ini terkejut menyaksikan suatu kenyataan dari kekuasaan RI. Melihat kenyataan ini dalam pertemuan pertama dengan pimpinan-pimpinan Indonesia, pihak Sekutu menyatakan bahwa mereka akan menghormati kemerdekaan bangsa Indonesia, dan mereka hanya akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan keputusan Sekutu. Akan tetapi pernyataan ini hanyalah sebagai taktik pihak Inggris saja untuk mempermudah misinya, yang sebenarnya tidak hanya sebagai pengembalian amanah Sekutu, melarikan juga sebagai sahabat erat pemerintah Belanda. Oleh karena itu langkah-langkah yang ditempuh Inggris selalu menguntungkan pihak Belanda. Hal ini antara lain terlihat sewaktu pasukan Inggris yang

mengatasnamakan pasukan Sekutu untuk pertama kali mendarat di Jakarta.

Ternyata dalam rombongan itu terdapat orang-orang Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang secara terang-terangan hendak menegakkan kembali negara Hindia Belanda. Sikap seperti itulah yang menyebabkan pandangan bangsa Indonesia terhadap 'pasukan Sekutu' itu berubah.<sup>76</sup> Kontak senjata antara pasukan Indonesia melawan pasukan Sekutu pun tidak dapat dihindari lagi. Kenyataan semacam inilah yang membuat beban perjuangan bangsa Indonesia semakin berat.

Di Sumatera Barat rombongan Sekutu yang pertama kali datang adalah rombongan Palang Merah yang diterjunkan di kota Padang pada tanggal 20 Agustus 1945. Setelah itu pada 8 September dan 23 September 1945 juga diterjunkan beberapa orang rombongan kecil Sekutu dengan tugas memberikan penjelasan mengenai kedatangan tentara Sekutu ke Sumatera Barat. Setelah kedua belah pihak memahami kedudukan masing-masing maka di dapat persetujuan bahwa Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Barat akan ikut membantu menyelesaikan tugas-tugas Sekutu.<sup>77</sup>

Pada tanggal 10 Oktober 1945, gelombang pertama pasukan Sekutu mendarat di Teluk Bayur, Padang. Pendaratan pasukan pertama dipimpin oleh Mayor Jenderal H.M. Chambers. Kekuatan pasukan ini terdiri dari satu Brigade Divisi India ke-26 yang jumlahnya kurang dari satu batalyon, dengan markas besar Brigade ke-71, Lincoln 1 dan Garhwal Rifles.<sup>78</sup> Mereka ditemani oleh Mayor Jenderal A.I. Spits sebagai wakil Belanda. Sebagai catatan, Mayor Jenderal Spits sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Belanda di Sumatera. Kedatangan pasukan Inggris ini tidak luput dari pengamatan pihak Republik. Sebab di pelabuhan itu tidak kurang dari lima ratus orang pemuda *republikain* Sumatera Barat yang hadir menyamar sebagai kuli pelabuhan untuk memata-matai seluruh kegiatan Sekutu itu. Mereka melakukan itu karena sebelumnya sudah tersebar isu bahwa orang-orang NICA akan ikut serta dalam rombongan Sekutu itu.

Sebenarnya, sebelum mendarat di Teluk bayur, pihak Inggris telah mendapat informasi yang cukup membesarkan hati mengenai daerah

yang akan mereka darati. Mereka menerima informasi bahwa kekuatan Belanda di Sumatera cukup baik bahkan penduduk di daerah-daerah sepenuhnya diurus oleh pemerintahan sipil Belanda. Namun ketika mendarat di Teluk Bayur, mereka melihat suatu kenyataan bahwa yang berkuasa adalah orang-orang Indonesia, bukan Belanda. Di kota itu mereka menemukan beribu-ribu pemuda yang berkobar-kobar hasil pendidikan militer Jepang, meneriakkan kata "merdeka", dan sangat anti Belanda, yang kemudian berkembang menjadi anti Inggris juga.<sup>79</sup>

Sesuai dengan peraturan internasional yang berlaku, maka tugas Sekutu di Sumatera Barat adalah mengurus penyelesaian masalah perang dengan Jepang. Untuk itu Sekutu mendirikan pos-pos penjagaan di Teluk Bayur, Muara, Komplek Rumah Sakit Tentara, Simpang Alanglawas, dan sebagainya dengan markas besarnya mengambil tempat di kantor wali kota Padang, yang sebelumnya sudah dikosongkan oleh wali kota Padang Mr. Abu Bakar Yaar, pengganti Dr. A. Hakim.

Sejak awal kedatangannya pihak Sekutu berjanji tidak akan mencampuri urusan Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Barat, dan pihak Republik memahami posisi Inggris sehingga tidak menghalangi tugasnya di Sumatera Barat. Oleh karena itu selama bulan Oktober tugas rekapitulasi pasukan Jepang berjalan mulus. Mayor Jenderal Motitake Tanabe, komandan Tentara ke- 25 Jepang dan wakilnya Laksamana Sueto Hirose menandatangani secara resmi penyerahan semua pasukan Jepang di Sumatera yang dilakukan di kota Padang pada tanggal 21 Oktober 1945.<sup>80</sup>

Namun seperti halnya di Jawa, sikap kompromis dari pihak Republik telah disalah gunakan oleh pihak Inggris. Sebagai badan RAPWI (*Rescue of Allied Prisoners of War and Internees*) Inggris telah memberi peluang besar kepada NICA yang memboncengnya untuk mengadakan infiltrasi dan provokasi bahkan Inggris, pasukan Sekutu telah mempersenjatai bekas tawanan perang Jepang yang baru dibebaskannya itu.<sup>81</sup>

Pasukan NICA yang mendapat dukungan dari sekutunya itu bertindak angkuh dan sewenang-wenang meminta dan menduduki gedung-gedung bekas kantor mereka dulu. Akibatnya suhu politik di

kota Padang pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya mulai meningkat. Dan insidenpun mulai bermunculan, terutama setelah terjadi aksi penurunan bendera Merah Putih oleh orang-orang NICA di kantor Syahbandar Teluk Bayur.

Melihat kondisi seperti itu para pemuda segera membentuk barisan pengawal yang menjaga kantor-kantor pemerintah. Kota Padang mulai dibanjiri oleh poster-poster dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang isinya menentang penjajahan dan menolak kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Aksi para pemuda itu ternyata telah membuat tentara Inggris tersinggung dan mengadakan pembersihan berupa pencabikan poster-poster dan merusak tempat-tempat poster tersebut. lalu dilanjutkan dengan penggeledahan kantor-kantor percetakan yang dicurigai sebagai tempat mencetak poster-poster tersebut bahkan sampai pembakaran kantor pemuda di Pasar Jawa. Beberapa tokoh pemuda di antaranya ditangkap dalam aksi pembersihan itu.

Seiring dengan itu orang-orang NICA juga aktif melakukan infiltrasi. Mereka mendatangi kantor-kantor pemerintah dan menghubungi pegawai-pegawai lama dan menjanjikan kepada mereka sebagai pegawai Belanda serta akan memperoleh gaji yang tak terbayar selama masa pendudukan Jepang.<sup>82</sup>

Namun insiden yang paling serius terjadi awal bulan Desember 1945. Pasukan Inggris melakukan gerak cepat untuk memperluas daerah pengawasannya di kota Padang, antara lain dengan mengambil alih Sekolah Teknik di Simpang Haru. Guru-guru sekolah itu melakukan protes atas pengambilalihan sekolah tersebut. Namun pihak Inggris tidak menggubrisnya, malahan mereka menangkap dan memukuli guru-guru tersebut, di antaranya adalah Said Rasad (yang kemudian menjadi Wakil Walikota Padang). Sebagai balasannya pihak Republik melakukan serangan dadakan terhadap konvoi pasukan Inggris. Insiden itu terus berkembang yang berpuncak pada hilangnya dua mirinir dan terbunuhnya Mayor Andreson dan Nona Allingham, seorang anggota Palang Merah Sekutu di pemandian Sungai Beramas yang letaknya kurang lebih 11 km ke arah selatan kota Padang. Menurut kabar, sebelum dibunuh Nona Allingham sempat diperkosa dulu.<sup>83</sup>

Atas tindakan brutal itu, maka pihak Inggris melakukan tindakan balasan yang tidak kalah kejiannya, yaitu dengan menyerang dan membakar tiga buah desa yang berada dekat tempat kejadian, dan menyerang barak-barak TKR serta kantor-kantor BPPI di Padang.<sup>84</sup> Tindakan-tindakan keras dari kedua belah pihak telah membuat kota Padang dalam keadaan darurat perang.

Keadaan darurat itu dalam satu segi ternyata telah membawa keuntungan bagi pihak Republik. Sewaktu pihak Inggris sibuk menyusun pertahanan menyangga di sekitar Padang, maka pihak Republik dengan leluasa merintis kondisi guna mempersiapkan diri melawan Belanda. Selain itu pihak, Republik juga berupaya menunjukkan kepada pihak Inggris selaku pasukan sekutu bahwa pemerintahan sipil Republik Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengurus pemerintahan, termasuk urusan peradilan. Selain itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan kaum nasionalis Indonesia terhadap pasukan Inggris yang sebagian besar terdiri dari pasukan India yang membawa hasil yang menggembirakan. Tidak sedikit dari orang-orang India terutama yang beragama Islam lalu membelot memihak Indonesia lengkap dengan persenjataannya. Meskipun para pemimpin pasukan Inggris cenderung memperkecil ruang gerak dan kemungkinan terjadinya pembelotan itu, upaya itu tetap saja terjadi. Dilaporkan sampai pasukan Inggris meninggalkan Sumatera Barat jumlah pembelot mencapai 746 orang.<sup>85</sup>

Tadinya pihak Indonesia masih terus melakukan usaha-usaha untuk menarik simpati pasukan Inggris, antara lain dengan menunjukkan bahwa gerakan-gerakan rakyat atau yang disebut kaum ekstremis itu merupakan refleksi dari kekecewaan rakyat terhadap peranan pasukan Inggris selaku pasukan Sekutu yang dianggap telah melampaui kewenangannya. Apalagi tugas pemulangan pasukan Jepang selesai, seharusnya pasukan Inggris selaku pasukan sekutu harus pergi pula dari Sumatera. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Pasukan Inggris yang ada bukannya dikurangi, malah bertambah dengan kedatangan pasukan Inggris dari Jawa.

Perseteruan antara pihak Inggris dan Indonesia mencapai titik puncaknya ketika pasukan Inggris menahan secara sewenang-wenang tiga orang pejabat Republik di Keresidenan, yaitu: Mr. Sutan

Mohammad Rasjid (Residen), Mr. Haroen Al Rasjid (Kepala peradilan Keresidenan), dan Johny Anwar, Kepala Polisi di kota Padang. Penculikan ketiga pejabat Republik itu adalah sebagai tuntutan untuk pembebasan seorang Indonesia yang diduga menjadi mata-mata untuk Belanda. Semula Inggris meminta agar mata-mata itu diperikasa di kota Padang. Tuntutan itu tidak dipenuhi oleh pihak Republik yang kemudian menyebabkan pihak Inggris melakukan penculikan terhadap ketiga pejabat Republik. Masalah ini kemudian dapat diatasi setelah Mohammad Djamil yang baru diangkat sebagai Gubernur Muda Sumatera Tengah ikut campur dalam masalah ini. Mata-mata orang Indonesia itu dibebaskan, setelah itu pihak Inggris pun membebaskan ketiga pejabat Republik yang ditahannya. Namun setelah insiden ini, konflik antara pihak Republik dengan pihak Inggris terus berlangsung sampai masa tugas Inggris selaku kekuatan Sekutu di Sumatera selesai.

Menjelang berakhirnya masa tugas pasukan Inggris di Sumatera, yaitu pada bulan September 1946, satu detasemen pasukan Belanda yang terdiri dari 75 orang mendarat di kota Padang, sekaligus sebagai ujung tombak Brigade U yang akan mengambil alih pengawasan kota Padang dari tangan Inggris. Sebelumnya Brigade U bertugas di wilayah Jakarta-Jawa Barat. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Divisi 7 Belanda yang memasuki Jakarta pada pertengahan November 1946. Pasukan dari Brigade "U" Belanda yang selama ini bertugas di front-front Jakarta dan sekitarnya ditarik dan dipindahkan ke Padang untuk menggantikan pasukan Sekutu. Brigade "U" dibawah pimpinan Kolonel J.W. Sluyters terdiri dari Batalyon "Princes Irene", Batalyon "Jangers", Batalyon V Penserwagon Huzaren Van Borcel, Batalyon 1-8 RI, Batalyon 2-14 RI dibantu oleh SATBANPUR lainnya seperti *Afdeeling* IV Artileri, Kompi III Genie Lapangan dan lain-lain.<sup>86</sup> Pada tanggal 29 November secara resmi, Kolonel J.W. Sluyter menerima kota Padang dan Teluk Bayur dari pihak Sekutu.

Seperti halnya di pulau Jawa, sebelum pasukannya meninggalkan Sumatera Barat, pihak Inggris masih berusaha untuk mempertemukan pihak Republik data Belanda dalam satu meja perundingan. Namun pembicaraan itu mengalami kemacetan. Dalam setiap pembicaraan selalu ditandai dengan percekcoakan kedua belah pihak pada dasarnya,

tidak percaya bahwa hasil pembicaraan antara delegasi Indonesia dengan Belanda akan mampu memutuskan sendiri kasus di daerah ini. Mereka lebih yakin bahwa hanya dengan aksi militerlah segala permasalahan di antara mereka dapat diatasi.<sup>87</sup>

Pada 28 November 1946 itu juga diadakan serah terima pasukan Sekutu (Inggris) dengan tentara Belanda dan besoknya 29 November 1946, pasukan Inggris meninggalkan Padang. Seluruh pos-pos peninggalan sekutu diisi oleh Brigade "U" Belanda dibawah pimpinan Kol.J.W.Sluyter. Pada mulanya Belanda hanya bertindak sebagai pengganti Sekutu di daerah yang didudukinya. Dan Inggris pun memeringatkan bahwa daerah kontrol Belanda di Padang sebetulnya terbatas pada blok-blok RAPWI di utara dan selatan kota Padang. Selain itu juga lapangan terbang Tabing dan pelabuhan Teluk Bayur. Jalan antara kota dan kedua tempat tersebut hanya terbuka untuk konvoi saja. Di luar blok-blok RAPWI dan kedua tempat itu merupakan daerah kontrol dan tanggung jawab Republik. Artinya peraturan yang berlaku adalah peraturan pihak Republik.

Namun Belanda yang mempunyai keinginan keras untuk menegakkan kembali Nederlands-Indie tentu tidak mau menurut nasehat temannya itu. Secara sepihak pasukan Belanda bergerak menduduki tempat-tempat yang strategis di pusat kota Padang dan menyerbu markas TKR pada dini hari yang mengakibatkan komandannya gugur dan 99 orang anggotanya tertangkap. Akibat peristiwa ini para pejuang Sumatera Barat yang dipelopori oleh TNI bersama barisan-barisan rakyat melakukan serangan terbuka ke kota Padang dari tiga Front yaitu front Utara, Timur dan front Selatan.

Pendaratan pasukan Belanda disambut oleh pasukan Republik dengan serangan dan ranjau. Ranjau dekat Batang Cubadak menghancurkan sebuah *brenccarrier* Belanda. Ranjau darat di Pampangan dekat Bukit Putus menewaskan beberapa pasukan Belanda.<sup>88</sup> Sergapan dan penghadangan dilain tempat seperti di jembatan Babuai menewaskan beberapa orang pasukan Belanda dan berhasil menghancurkan *brenccarrier*, satu brenggun, dan satu pistol dapat dirampas.<sup>89</sup> Serangan tersebut membawa kerugian yang tidak sedikit dipihak Belanda.



Akibat seringnya terjadi pertempuran di kota Padang maka rakyat berduyun-duyun mengungsi ke daerah pedalaman Sumatera Barat yang masih dikuasai oleh pihak Republik Indonesia. Tetapi suasana tegang di Sumatera Barat itu untuk sementara dapat ditenangkan dengan datangnya berita gencatan senjata dari pusat.

Di Jakarta Persetujuan Linggarjati ditandatangani pada 16 November 1946. Untuk menjelaskan maksud persetujuan itu Pemerintah Pusat mengirim tiga orang ke Sumatera Barat untuk mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak yang dilaksanakan pada 11 Desember 1946. Persetujuan Linggarjati di Sumatera Barat pihak RI diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin (Ketua), Dr. A.K., Gani (Anggota dari pusat), Letjen Urip Sumohardjo (Anggota), Mr. Moh. Rasjid (Anggota), Letkol A. Halim (Anggota), Marzuki Jatim (Anggota), Kapten A. Salim Yakup (Anggota), Darwis (Anggota), Mr. Nazarudin, (Anggota), Kapten Nasrun AS (Peninjau). Sedangkan pihak Belanda diwakili : Dr. Kuts (Ketua), Jenderal Mayor Buurman Van Vreeden (Anggota), Kolonel Sluyter (Anggota), Mayor Schotsborg (Anggota), Kapten Hendricks (Anggota), Kapten Tiden (Anggota), Letnan vreenedal (Anggota), De Boer (Anggota) dan Waarnar (Anggota).<sup>90</sup> Isi yang terpenting dari persetujuan itu adalah pengakuan *de facto* atas Indonesia (Jawa, Madura, Sumatera).

Rupanya pihak Belanda yang merasa berada di posisi yang kuat. Secara terang-terangan Belanda menerjang adanya kerjasama administrasi Belanda Indonesia di kota Padang, yang pada dasarnya telah disetujui sebelumnya berdasarkan konsesi perjanjian Linggarjati. Oleh karena itu Belanda menentang peranan Polisi Republik Indonesia berperan sebagai pemelihara keamanan di Padang.<sup>91</sup> Belanda bersikeras untuk dapat menguasai pos-pos polisi dan daerah demarkasi itu serta meminta agar pos-pos Indonesia ditempatkan jauh dari garis demarkasi.

Adanya tuntutan-tuntutan seperti itu, pihak, Republik Indonesia pun sudah memperkirakan bahwa apa yang ada dalam konsesi perjanjian Linggarjati jelas sangat merugikan pihak Republik. Jika pihak Republik menarik aparat keamanan dan pemerintahnya dari kota Padang, maka hal itu dapat diartikan bahwa semua penduduk yang

berada di sana di bawah kekuasaan Belanda. Oleh karena itu pihak Republik pun cenderung berpendirian keras untuk tidak menyetujui semua tuntutan Belanda. Apalagi hubungan Sumatera Barat dengan pihak pusat di Yogyakarta tidak begitu lancar sehingga instruksi spesifik dari sana tidak cepat mereka terima.<sup>92</sup>

Pada 28 Desember 1946 Belanda mengadakan penggeladahan di dalam kereta api. Akhirnya komandan TNI Sumatera Barat, Ismail Lengah mengeluarkan pengumuman pembatalan gencatan senjata. Dan ketegangan antara kedua belah pihak pun semakin meningkat.

Pada tanggal 31 Desember 1946, Belanda melancarkan beberapa kali serangan udara ke beberapa desa di sekitar Padang yang *nota bene* berada jauh di luar garis demarkasi. Desa-desa yang mendapat kerusakan akibat serangan udara itu antara lain : di Lubuk Begalung, Bandar Buat, dan Pasar Usang. Akibat dari serangan itu maka sejak awal tahun 1947 pertempuran kembali meletus antara Belanda melawan rakyat Sumatera Barat. Pihak Belanda mengarahkan persenjataannya yang modern untuk melenyapkan kekuatan RI di Sumatera Barat. Belanda menggunakan pesawat udara (mustang), mortir houwitzer, carrier (sejenis panser). Padahal pasukan Republik hanya menggunakan senjata seadanya, yaitu senjata peninggalan dan rampasan dari Jepang dan Belanda, ditambah dengan beberapa persenjataan hasil rakitan sendiri seperti bom, senapan balansa dan bambu runcing. Walaupun demikian semangat rakyat Sumatera Barat sangat tinggi.

Dan untuk menghindari agar gedung-gedung atau fasilitas lainnya jatuh ke tangan Belanda, pihak RI menggunakan taktik bumi hangus sebagai senjata terakhir.<sup>93</sup>

Beberapa peristiwa yang terjadi sejak awal tahun 1947 antara pihak RI dan Belanda :

- 1 . Penyerangan meriam Belanda atas Alai, Kampung Kalawi, Andalas, Anduring dan sekitarnya, 7 Januari 1947. Tembakan gencar tersebut dalam rangka melindungi gerakan tentara Belanda kejurusan Ampang, Anduring, Lubuk Bagalung dan Pisang. Gerakan tersebut mendapat perlawanan dari pasukan republik. seorang prajurit TRI melakukan serangan "jibaku" dengan

mempergunakan ranjau darat, sehigga dua truck Belanda beserta isinya hancur.

2. Penyerahan markas Batalyon gabungan I. Resumen III di Indarung dari udara, 8 Januari. Penyerangan ini berbuntut dari sehari sebelumnya, Komandan Batalyon I Mayor Anwar Badu luka parah dan Mahmoed Pianis terkenal tewas.
3. Penyerangan atas Pasar Bandar Buat, 18 Januari 1947. Penyerangan terhadap pasar pada hari pekan ini, mengakibatkan lebih lima puluh rakyat tidak berdosa, sebagian wanita dan anak-anak, meninggal dan puluhan lainnya luka parah.
4. Usaha Belanda Memasuki Indarung, 20 Januari 1947, dengan didukung oleh pesawat udara dan dilindungi senjata berat seperti brencarrier serta tembakan mortir dan pantserwagen. Hari itu juga pasukan Belanda meninggalkan Indarung.
5. Beberapa pertempuran di Front Utara, terutama di Tabing dan Kompi Harimau tiram, yang menguasai pos-pos pantai.
6. Pertempuran Sungai Pisang, merupakan pertempuran antara ALRI di Sungai Beramas, akhir Januari dan pasukan Belanda yang sedang mendaratkan pasukannya.
7. Gempuran terhadap markas SPO di Pasar Oesang 11 Januari. Penyerbuan ini merupakan buntut dari sepasukan Belanda yang terkena ranjau, sehari sebelumnya yang menyebabkan 30 orang pasukan Belanda tewas dan luka-luka termasuk diantaranya beberapa perwira.

Selain itu, Belanda juga melakukan serangan dan penembakan yang ditujukan kepada rakyat yang tidak berdosa, seperti penembakan dari udara terhadap rakyat yang sedang berbelanja di Pasar Tabing, Lubuk Buaya, Duku dan Pasar Oesang. Belanda juga menembaki kereta api yang lewat membawa pengungsi keluar kota yang mengakibatkan banyaknya korban dari rakyat biasa. Sementara pertempuran terus berlangsung perundingan ditingkat pusat silih berganti.

Sejak dibatalkannya genjatan senjata, telah beberapa kali diadakan perundingan kembali antara pihak RI dengan Belanda di Padang, yaitu pada tanggal 3 April 1947 dan tanggal 8 April 1947 yang menghasilkan beberapa keputusan. Setelah itu diadakan lagi perundingan pada tanggal 3 Mei 1947. Delegasi RI dipimpin oleh Kolonel Ismail Lengah, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh kolonel J.W. Van Sluyters. Perundingan ini pun diadakan di Padang, yang dihadiri oleh Wali Kota Padang.

Dalam Perundingan yang disebutkan terakhir, disepakati mengenai garis demarkasi yang membujur dari Sungai Beremas -Tanah Sirah-Tabing.<sup>95</sup> Setelah itu kedua komandan itu mengadakan perjalanan bersama untuk memeriksa garis demokrasi Timur. Berdasarkan hasil perundingan tadi terlihat jelas bahwa sejak kedatangannya tanggal 28 November 1946, Belanda telah berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Pada waktu menerima kekuasaan dari pihak Sekutu, daerah yang dikuasai Belanda hanya sekitar Hotel Oranye (sekarang Hotel Muara), Belantung, Rumah Sakit tentara di Ganting dan ditambah pos-pos Sekutu yang berada di Teluk Bayur, Tabing, pinggir Batang Arau dan pinggir Bandar Bakali

## ***4.2. Agresi Militer Belanda***

### ***4.2.1 Agresi Militer Belanda I***

Berdasarkan hasil-hasil perundingan yang telah disepakati antara pihak RI dan Belanda di Sumatera Barat disebutkan bahwa jalur selebar 2 km antara daerah yang dikuasi pihak RI dan Belanda, dianggap sebagai daerah tidak bertuan (bebas dari militer). Tetapi kenyataannya di daerah itu tetap jadi ajang pertempuran, dan terjadi terutama karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak Belanda.<sup>96</sup> Dan akhirnya secara sepihak pemerintah Belanda membatalkan semua hasil perundingan itu dan langsung melakukan agresi militer.

Di Sumatera Barat perang Agresi Militer I didahului dengan pembunuhan Wali Kota Padang, Baginda Azis Chan yang terjadi pada tanggal 19 Juli 1947. Kepala Baginda Azis Chan meninggal karena kena hantaman benda berat dan sebutir peluru.

Setelah peristiwa itu Belanda menyerbu kota Padang dari segala penjuru. Pasukan RI pun tidak begitu saja menyerahkan daerah ini kepada pihak Belanda, meskipun mereka tahu persenjataan Belanda jauh lebih lengkap dan lebih modern daripada yang mereka miliki. Daerah front Timur perlawanan pihak RI berada di bawah pimpinan Mayor Ahmad Husein. Selain pasukannya sendiri dia dibantu oleh pasukan Singa Harau, 3 Kompi *Hisbullah* dan barisan perjuangan lainnya.

Di Front Timur pertempuran terjadi selama dua hari berturut-turut, Indarung jatuh ketangan Belanda. Pasukan Belanda bertahan di Air Siah, pintu gerbang "Subang-pas" benteng alam di lembah Bukit Barisan.<sup>97</sup> Rencana Belanda untuk merebut kota Solok pusat Resimen III, dapat digagalkan akibat perlawanan yang gigih dari TNI. Perang gerilya yang dilancarkan terus menerus oleh TNI, 23.-25 Juli 1947, memaksa Belanda mengundurkan diri kembali ke Indarung. TNI berhasil menerobos pertahanan Belanda di Kepala Datar antara Indarung dan Padang, yang menyebabkan Belanda mundur sampai pusat kota Padang.<sup>98</sup> Di sini mereka mengakui keunggulan TNI dengan perlengkapan yang jauh lebih sederhana dan di front Timur ini tidak pernah terlampaui oleh pasukan Belanda.

Di Front Utara keadaan tidak jauh berbeda dari Timur. Pertahanan TNI di Tabing dapat diterobos oleh Belanda 22 Juli 1947. Pasukan Belanda melaksanakan penyerangan gerak cepat, mereka berhasil maju sampai ke Lubuk Alung. Dalam tempo tujuh saja Belanda telah dapat menguasai jalan raya Tabung sampai Muara Kasang. Di Muara Kasang pasukan Belanda hanya dapat ditahan oleh pasukan RI untuk sementara waktu saja.

Keberhasilan pasukan Belanda itu terutama dalam serangannya itu selalu dibantu oleh pesawat-pesawat tempurnya yang menembaki dan membom posisi pasukan RI, yang memaksa pasukan TNI terpaksa mundur untuk menyelamatkan diri. Strategi pertahanan diatur oleh Mayor Mustafa sebagai Komandan batalyon yang berkedudukan di Pasar Usang. Di front ini ditegaskan kompi-kompi Berantai, Bakapak, Berayun dan Bakipeh.

Secara serentak jalan antara Tabing Lubuk Minturun, Hilalang - Lubuk Minturun dan Lubuk Buaya-Tanjung Aur dikuasai Belanda, sehingga praktis jalan-jalan penting dikenegerian Kato Tangah jatuh ketangan belanda. Dari Muara Kasang pasukan Belanda yang bergerak ke arah Pasar Usang, mendapat perlawanan dari TNI. Karena kekuatan Belanda sangat besar, maka TNI terpaksa mundur dan Belanda dapat menduduki Duku.

Front Utara ini merupakan daerah dari pesawahan sehingga penyerangan oleh TNI hanya dapat dilakukan pada malam hari. Serangan yang gigih pada malam hari, sepanjang jalan Pasar Usang hingga Padang menjadi kancah peperangan sehingga memaksa Belanda mengundurkan diri ke Lubuk Alung, 25 km sebelah Utara Padang.

Di Front Selatan daerahnya sempit antara lereng-lereng curam Bukit Barisan di sebelah Timurnya dan Samudra Indonesia di sebelah Barat. Pada 21 Juli 1947 Belanda dari Teluk Bayur mengarahkan mortirnya ke daerah Sungai Beramas dan Bukit Lampu, Pengambilan dan Bungus. Pasukan darat Belanda dengan dilindungi pesawat udara melintasi garis demarkasi dengan pasukan mobil berlapis baja dihalang-halangi oleh Batalyon Topan, Batalyon Gunung Raya dan satu seksi dari markas Resimen III.

Agresi militer Belanda I ini mendapat perlawanan bukan saja dari kalangan TNI saja, melainkan juga dari rakyat Sumatera Barat. Para alim ulama misalnya, mengeluarkan fatwa bahwa perang kemerdekaan adalah perang sabil (*sabilillah*).

Atas desakan PBB, pada tanggal 2 Agustus 1947 meminta agar diberlakukan gencatan senjata. Pada tanggal 4 Agustus 1947 Presiden RI mengeluarkan perintah agar pasukan Republik Indonesia menghentikan termbak-menembak. Seruan itu baru berlaku di Sumatera Barat sehari sesudahnya. Akan tetapi pihak Belanda di Sumatera Barat menerima keputusan itu dengan setengah hati. Hal ini terbukti pada 8 Agustus Belanda masih melancarkan serangan ke Parit Malintang, sebelah Utara Lubuk Alung.

Setelah menyadari bahwa kekuatan para pejuang RI tidak seimbang dengan pasukan Belanda yang jauh lebih modern itu,

akhirnya para pejuang *republikein* melakukan taktik perang gerilya. Pasukan TNI dan lasykar-lasykar pemuda terpaksa melakukan gerakan mundur ke desa-desa, bahkan ke daerah pedalaman sambil melakukan konsolidasi dan membangun pertahanan-pertahanan baru. Di dalam masa gencatan senjata itu pemerintah daerah Sumatera Barat mulai berbenah diri dalam usaha menggalang persatuan. Apalagi setelah melihat FPN tidak lagi berfungsi secara baik, yang disebabkan terlalu banyaknya perbedaan politik di dalamnya. Oleh karena itu kemudian bentuk badan baru dengan nama "Markas Pertahanan Rakyat Daerah". FPN kemudian bergabung ke dalamnya.

#### 4.2.2 Agresi Militer II

Di Sumatera Barat Agresi Militer Belanda Kedua dimulai dengan kedatangan pesawat terbang Belanda di atas kota Bukittinggi pada dini hari 19 Desember 1948, sebagian orang mengira bahwa pesawat itu sedang membawa rombongan Presiden Soekarno dalam perjalanan menuju ke India, sehingga para pemimpin di Bukittinggi menyiapkan sejumlah kendaraan untuk menyambut kedatangan rombongan itu di pangkalan udara Gadut. Akan tetapi pesawat yang ditunggu itu tidak kunjung turun, maka timbulah kecurigaan. Besok harinya tanggal 19 Desember 1948 barulah menjadi jelas dengan ditemukan pamflet-pamflet yang rupanya dijatuhkan oleh pesawat milik Belanda yang menyatakan bahwa Persetujuan Renville tidak berlaku lagi. Pagi itu pula pesawat terbang Belanda kembali beraksi, Bukittinggi dan sekitarnya di bom dan menembaki pemancar RRI tangsi-tangsi dan kendaraan yang bergerak disepanjang jalan. Akibat penembakan dan pemboman itu banyak bangunan-bangunan yang rusak. Sebagian penduduk panik dan berusaha mencari perlindungan atau bersiap-siap untuk mengungsi keluar kota. Sebagian lagi mencoba memonitor siaran radio dalam dan luar negeri.<sup>99</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa Bukittinggi yang waktu itu, merupakan ibukota menjadi sasaran utama bagi Belanda dalam serangannya pada agresi Militer Belanda kedua ini. Pada hari itu juga pemimpin di Sumatera Barat sepakat untuk meninggalkan Bukittinggi dan perjuangan selanjutnya akan dilakukan secara gerilya. Di antara pemimpin itu antara lain Menteri Kemakmuran RI Mr. Syafruddin

Prawiranegara yang baru sebulan berada di Bukittinggi, Mr. Teuku Moh. Hasan sebagai Ketua Kompempus Sumatera, Gubernur Sumatera Tengah Mr. Nasrun dan PTTS Kolonel Hidayat dan Mr. St. Moh Rasjid yang pada hari itu sedang berada dikota Pariaman. Mereka meninggalkan Bukittinggi menuju kompleks perkebunan teh Halaban, disebelah Selatan kota Payakumbuh. Di sana bertemu dengan tokoh-tokoh setempat. Dalam pertemuan tersebut disadari bahwa perjuangan tak boleh dihentikan begitu saja, hanya karena tertawannya Pemimpin Tertinggi RI di Jogjakarta. Menghentikan perjuangan berarti pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi.

Selanjutnya dengan tekad yang bulat mereka memulai musyawarah data menganalisa situasi. Dan untuk sementara waktu mereka akan menjadikan daerah pedesaan dan pedalaman sebagai basis perlawanan. Tak lama kemudian sampai telegram dari Jogjakarta yang menunjuk Mr. Safruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan RI darurat. Berdasarkan isi telegram ini maka lahirlah "Pemerintahani Darurat Republik Indonesia" (PDRI.), yang kemudian melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia dengan bergerilya.

Bersamaan dengan pemboman kota Bukittinggi Belanda menggerakkan satuan tempurnya dari Padang ke segala jurusan secara besar-besaran dengan dipelopori oleh pesawat pengintai, pemburu dan pembom. Pesawat-pesawat pengangkut Catalina menjatuhkan pasukannya di Danau Singkarak dan Batu Tebal, di Ujung Selatan dan pantai Timur Danau Singkarak.<sup>100</sup> Gerakan pasukan Belanda dalam merebut kota-kota penting di Sumatera Barat yang meliputi :

#### 4.2.2.1 Front Utara

Pada 19 Desember 1948 pasukan Belanda bergerak ke arah Utara melintasi garis demarkasi Renville di Batang Tapakis. Pertempuran terjadi dengan pasukan TNI yang menjaga garis demarkasi tersebut, yaitu batalyon-batalyon dari Residen VI dan Mobrig melakukan perlawanan. Karena kekuatannya yang tidak seimbang maka pasukan TNI mengundurkan diri ke arah Parit Melintang, terus ke Sicincin. Dalam pertempuran itu dari pihak TNI 2 orang anggota Mobil brigade (Mobrig) gugur.



Esok harinya 20 Desember 1948 pasukan Belanda melanjutkan serangannya ke Sicincin. Dengan mudah Sicincin dapat direbutnya dan TNI telah mengundurkan diri ke Kayu Tanam dan Tandikat. Hari itu juga Belanda meneruskan serangannya untuk merebut Kayu Tanam akap tetapi dapat dipukul mundur oleh TNI bersama rakyat. Tanggal 21 Desember 1948 pasukan Belanda melancarkan serangan kedua kalinya ke Kayu Tanam. Serangan dilakukan dari dua arah yaitu dari arah jalan raya Padang Bukittinggi dan dari arah Hilalang Panjang ke Tandikat. Pertempuran berlangsung cukup lama. Sebagai rakyat terpaksa mengungsi.

Selanjutnya karena persenjataan yang tidak seimbang TNI mengundurkan diri ke Anduring dan Lembah Anai sambil melakukan bumi hangus antara yang kena sasaran : Kompleks INS Kayu Tanam, Rumah Sakit, Sekolah Rakyat, Pasar, Kantor Wali nagari dan 12 rumah pendudukan Pasukan TNI untuk sementara waktu bertahan di Kandang IV dan melakukan penghancuran jembatan yang menuju Lembah Anai dan membuat pertahanan di Singgalang. Karena kuatnya pertahanan TNI disini, pasukan Belanda tidak dapat dilanjutkan gerakannya ke arah Utara sehingga hanya bertahan di Kayu Tanam. Dari Kayu Tanam pasukan Belanda mulai mengarahkan sasarannya untuk merebut kota Pariaman. Sebelum bergerak ke Pariaman, kapal perang Belanda telah mondar-mandir di Lautan Indonesia, di depan pantai Pariaman dan menembaki kota Pariaman dan sekitarnya. ALRI berusaha mempertahankan kota Pariaman dan serangan Belanda yang berasal dari laut, sedangkan TNI Angkatan Darat dari residen I menghadapi serangan dari darat.

Pada 26 Desember 1948 pasukan Belanda yang berada di Lubuk Alung berusaha merebut Pauh Kembar, tetapi usaha ini tidak berhasil. Karena itu Belanda mengalihkan sasarannya untuk merebut Kuraitaji. Pasukan Belanda di gerakkan dalam dua jurusan yaitu dari Lubuk Alung dan dari Sicincin. Pada 4 Januari 1949 pasukan Belanda digerakkan secara serentak dengan dilindungi oleh pesawat terbang. Karena kuatnya pasukan Belanda itu maka pasukan TNI yang mempertahankan daerah itu mengundurkan diri secara terpecah-pecah ke berbagai desa di sekitarnya yaitu Duku, Kampung Dalam Padusunan, Naras, sikapuh dan Limau Purut.<sup>103</sup> Kemudian dengan

mudah Pauh kembar dari Kuraitaji dapat diduduki Belanda pada 5 Januari 1949. Dari Kuraitaji pasukan Belanda berusaha merebut kota Pariaman. Serangan atas kota Pariaman dilakukan dari dua jurusan. Yang pertama melalui Teluk Camparuh-Pariaman dan yang kedua melalui Air Santok-Sungai-Pasak Palung-Pariaman.<sup>104</sup> Pertempuran sengit terjadi antara TNI dengan pasukan Belanda yang diakhiri dengan terjadinya perkelahian sangkur. Kerugian dipihak TNI 43 orang gugur. Kota Pariaman dapat diduduki Belanda 6 Januari 1949 dan Mayor Sulaiman sebagai Komandan Pangkalan bergabung dengan PDRI dan sisa pasukannya bergabung dengan Resimen VI.

#### 4.2.2.2 Front Timur

Di front Timur pasukan Belanda pada 19 Desember 1948 dengan kekuatan yang lebih besar mulai melintas garis demarkasi di Air Sirah. Gerakan pasukan Belanda ini dimulai dengan penembakan dari udara terhadap pertahanan TNI di Air Sirah, Lubuk Gadang dan Lubuk Silasih. Dengan mudah Air Sirah dapat dikuasai, begitu juga Lubuk Gadang dan Lubuk Selasih. Pasukan TNI yang membuat pertahanan di Bukit Subang mengadakan perlawanan, akan tetapi karena kekuatan yang tidak seimbang baik personel, materiil maupun persenjataan maka pasukan TNI dari Resimen III yang bertahan di daerah tersebut mengundurkan diri secara terpecah-pecah.<sup>105</sup>

Pasukan Belanda dari Lubuk Selasih melanjutkan gerakannya ke arah Solok. Karena kekuatan yang tidak seimbang maka pertahanan TNI yang ditempatkan di sepanjang Lubuk Silasih-Solok, satu demi satu dapat direbut Belanda. Mula-mula Talang, kemudian Selayo, terus ke Tanah Garam. Untuk memperkuat penyerbuannya ke Solok, Belanda menurunkan pasukan payungnya di Sumani dan Batu Tebal dengan mempergunakan 4 buah pesawat Catalina yang didaratkan di Danau Singkarang. Pendaratan pasukan payung Belanda di daerah tersebut dimaksudkan untuk memutuskan hubungan Solok-Padang Panjang dan untuk menyerang Solok dari jurusan Lubuk Silasih dan dari arah Padang Panjang. Dengan kedua gerakan itu Belanda dengan mudah merebut kota Solok 20 Desember 1949.

Pasukan TNI dari Resimen III yang berusaha mempertahankan kota Solok, terpaksa mengundurkan diri secara terpecah-pecah.

Sebagian dibawah pimpinan Kapten Anwar Badu mengundurkan diri ke arah Sijunjung dan sebagian lagi yaitu Markas Resimen III di bawah pimpinan Mayor Ahmad Husein mengundurkan diri ke arah Alahan Panjang.

Setelah kota Solok berhasil diduduki, maka pada 21 Desember 1948 pasukan Belanda yang mendarat di Danau Singkarak ditugaskan untuk merebut kota Padang Panjang dan Batu Sangkar. Gerakan ke Padang Panjang dan batu Sangkar ini diperkuat dengan satuan tank dan panser. Di Kubu Kerambi terjadi pertempuran sengit dan sesudah pasukan panser Belanda melepaskan tembakan senapan mesin berat, nagari itu baru dapat didudukinya.<sup>106</sup> Dari Kubu Kerambi pasukan Belanda tersebut dibagi dua sebagian ditugaskan untuk menyerang Padang Panjang dan sebagian lagi untuk merebut Batusangkar. Dengan mudah kedua kota itu dapat diduduki Belanda karena memang telah dikosongkan. Sebab, pasukan TNI telah ditarik ke tempat lain. Demikian juga pasukan TNI di Batusangkar ditarik keluar untuk pertahanan di Sungai Tarab.

Pasukan Belanda yang berada di Solok terus melanjutkan penyerbuannya ke Sawah Lunto. Untuk merebut kota Sawah Lunto Belanda membagi pasukannya ada yang melewati jalan raya dan sebagian lagi melewati jalan kereta api. Di Guguk Sarai terjadi perlawanan sehingga ada beberapa dari pasukan TNI yang dibunuh dengan bayonet. Batalyon Singa Harau yang mempertahankan Sawah Lunto memberikan perlawanan sengit, sehingga baru tanggal 1 Januari 1949 pasukan Belanda bisa memasuki daerah ini namun pasukan TNI dan para pejuang *republikein* lainnya tidak menyerahkan begitu saja kota ini. Kota ini baru ditinggalkan pasukan RI setelah terlebih dahulu dibumihanguskan.

Pasukan TNI terus mengundurkan diri ke Tanjung Ampalu dan Sijunjung. Namun tak lama kemudian Tanjung Ampalu dan Sijunjung pun dapat direbut Belanda. Pasukan TNI dibawah pimpinan Kapten Anwar Badu mengundurkan diri secara berpencar, ada yang ke Air Luo Sikabur-Tanjung Gedang dan ada pula yang ke Lintau-Payakumbuh.

Pasukan Belanda yang bergerak ke arah Timur telah berhasil menduduki Padang Panjang pada 20 Desember 1948. Dari sini Belanda tidak segera melanjutkan serangannya ke Bukittinggi, karena adanya laporan bahwa Bukittinggi dijaga kuat oleh TNI. Baru pada tanggal 22 Desember 1948 pasukan Belanda menuju Bukittinggi dengan mudah dapat menduduki kota ini, karena sebelumnya pasukan TNI memang telah meninggalkan kota ini.

Dari Bukittinggi pasukan Belanda terus menuju Payakumbuh dan terjadi pertempuran di Baso, karena TNI mengadakan perlawanan. Akan tetapi karena kuatnya pasukan Belanda, TNI terpaksa mundur sehingga kota Payakumbuh dapat diduduki Belanda. Dari Baso ini TNI mengundurkan diri ke Kamang. Sedangkan TNI yang mempertahankan Payakumbuh mengundurkan diri, ke Air Kuning, Limbukan dan AURI ke Piobang.<sup>107</sup>

#### 4.2.2.3 Front Selatan

Pasukan Belanda melancarkan serangannya terhadap TNI yang bertahan di Siguntur Tua dari dua jurusan. Serang pertama dan Teluk Kabung bergerak menuju Siguntur Muda dan berhasil diduduki Belanda. Kemudian serangan kedua diarahkan ke Painan dapat diduduki, tetapi Belanda sore harinya terpaksa mundur. Baru pada 6 Januari 1949 Belanda kembali menyerang Painan. Serangan ini dimaksudkan untuk memotong Siguntur Tua dari belakang. Batalyon II di bawah pimpinan Muchni Zen dan Kompi Gati yang mempertahankan Painan mundur ke arah Lumpo.

Dari Painan pasukan Belanda menuju kedua jurusan yaitu ke arah Selatan menuju Balai Selasa dan ke arah Utara menuju Siguntur Tua. Pada 4 Maret 1949 pasukan Belanda dari Salida Kecil melancarkan serangan secara besar-besaran ke arah Bayang, Tarusan dan Pasar Baru. Di Tarusan pasukan Belanda mendapat perlawanan dari TNI demikian pula di Pasar Baru. Akan tetapi pasukan Belanda lebih besar dibandingkan pasukan TNI sehingga TNI mundur dan melakukan perlawanan bergerilya.

Untuk merebut daerah-daerah Pesisir Selatan bagian Selatan lainnya maka pada 14 April 1949 Belanda mendaratkan pasukannya

di Muara Sakai. Pendaratan pasukan ini dilindungi pesawat tempur Belanda dan bantuan tembakan kapal dari laut. Pendaratan pasukan Belanda dari Muara Sakai ini dimaksudkan untuk membantu pasukan Belanda yang telah bergerak dari Painan ke arah Selatan yang telah sampai di Balai Selasa. Sedang pasukan TNI di bawah pimpinan Imran melakukan perlawanan, namun dapat dipatahkan. Dari sana pasukan Belanda menuju ke Inderapura dan pada tanggal 22 April 1949 Inderapura dapat direbut dan dikuasai Belanda. Demikian pula Topan dan dari Tapan Belanda bergerak menuju Sungai penuh dan dapat direbut 25 April 1949.

Sampai bulan April 1949 pasukan Belanda telah berhasil merebut kota-kota penting di Sumatera Barat, seperti Solok, Padang Panjang Bukittinggi, Batu Sangkar, Payakumbuh, Sawah Lunto, Sijunjung Alahan panjang, Muara Labuh, Pariaman dan Sungai Penuh. Namun dikemukakan oleh George Mc Turnan Kahin, pada dasarnya sejak bulan Januari 1949, pasukan Belanda hanya menguasai kota-kota itu pada siang hari saja. Setelah matahari terbenam, pasukan TNI kembali menguasai medan.<sup>106</sup> Artinya dengan jatuhnya kota-kota penting, bukan berarti Belanda sudah berkuasa di Sumatera Barat. Apalagi daerah-daerah di luar kota yaitu desa-desa atau nagari-nagari, baik siang maupun malam hampir sepenuhnya dikuasai oleh TNI dan rakyat Indonesia dengan PDRInya.

Dibawah ini dikemukakan basis perjuangan gerilya rakyat Sumatera Barat setelah Belanda melancarkan Agresi Militernya yang kedua. Sumatera Barat yang merupakan Sub Territorium dibagi kedalam Sub Komando-Sub Komando dan Sektor-sektor Front-Front Pertempuran.

### **4.3. Daerah Sub Komando A.**

#### **4.3.1 Padang Pariaman**

Setelah Pariaman jatuh ke tangan Belanda 6 Januari 1949 pasukan TNI mundur dan terpecah-pecah ada yang ke Tunggul, Limau Purut, Padusunan, Sikapak, Pauh, dan Cubadak Air. Pasukan-pasukan TNI selalu mengganggu pos-pos Belanda dan mencegat patroli-patrolinya.

Pos-pos Belanda itu terletak di Pariaman, Basung, Sungai Limau, Kuraitaji. Pauh Kembar Sungai Sarik, Tandikat dan lain-lain. Sedangkan pasukan-pasukan TNI bergerilya di daerah Pariaman adalah Kompi Bakapak dipimpin Muhammad Noer, Kompi Bakipeh dipimpin Zaidin Bahry, Kompi Yager dibawah pimpinan Yusuf Siraj dan ALRI dan PMT, BPNK.<sup>109</sup> Pada 17 Januari 1949 pasukan Belanda yang mengadakan patroli di daerah Pauh dihadang ALRI yang bertahan di daerah tersebut. Pertempuran terjadi selama satu jam, sampai akhirnya pasukan ALRI didesak mundur ke Padusunan dan Sikapak dengan korban satu orang yaitu Jaafar.<sup>110</sup>

Belanda yang berhasil menduduki Pauh, pada sore harinya terpaksa mundur lagi ke Pariaman. Setelah itu patroli Belanda tidak pernah lagi ke Pauh. Pada tanggal 7 Februari 1949 ALRI menghadang patroli Belanda di Teluk Embun Padusunan. Pasukan Belanda secara diam-diam maju ke daerah itu melalui sawah, dihujani peluru oleh anggota ALRI yang bersembunyi diatas bukit. Akibatnya seseorang pasukan Belanda mati kena tembak, selain itu banyak yang luka-luka. Pertempuran itu berlangsung  $\pm$  45 menit dan ALRI kemudian mundur ke Sikapak dan Tungkai.

Oleh karena posisi Belanda terus terancam di Pariaman maka pada 7 Maret 1949 dengan bantuan dari Padang Belanda melakukan serbuan ke daerah luar kota. Sasaran utamanya adalah daerah luar kota. Sasaran utamanya adalah daerah-daerah Cubadak Air, Sikapak, dan Limau Purut. Pada hari itu satu kompi pasukan Belanda bersenjata lengkap, dipelopori 3 tank dan dibantu senjata berat bergerak ke Simpang Apar. Dari tempat itu Belanda melakukan gerak tipu, tanknya bergerak terus ke Naras, sedangkan sepertiga pasukannya menyerap, menyelip, menyusuri Batang Manggung menuju ke Cubadak Air.<sup>111</sup>

Pasukan TNI yang terdiri dari kompi Bakapeh, dan Bakapak yang mengetahui gerakan pasukan Belanda itu segera mengambil posisi yang strategis di Bukit Cubadak Air. Akhirnya terjadi pertempuran yang sengit yang menimbulkan banyak korban dipihak Belanda. Untuk menyelamatkan sisa pasukannya Belanda dengan pasukan tanknya melepaskan tembakan gencar. Sedangkan sisa pasukan infanterinya menyelamatkan diri di tengah sawah yang padinya sedang menguning. Setelah pertempuran itu, beberapa hari kemudian Belanda melakukan

operasi pembersihan ke Cubadak Air Dukuh dan Timau Purut. Sebelumnya Belanda melakukan bombardir atas Cubadak Air, untuk menghindari banyak korban, pasukan Belanda itu dibiarkan saja oleh TNI. Kemudian pasukan TNI pindah ke daerah Padang Alai, Campago, dan Kampung Dalam. Pasukan Belanda melanjutkan gerakannya ke arah Naras, tetapi di jembatan Lating dicegat oleh pasukan TNI sehingga terjadi pertempuran selama dua hari,

Akibat dari pertempuran itu Belanda mengerahkan pesawat udara dan meriamnya. Pasukan TNI menengundurkan diri dari daerah Naras dan Kampung Dalam ke Mudik Padang. Kepindahan pasukan TNI ini rupanya diketahui Belanda, sehingga daerah ini dihujani oleh mortar Belanda dari Sicincin. Sebagai balasannya Kompi Berayun melakukan serangan terhadap pos Belanda di Tapakis dan penghadangan antara Sungai Sarik Kato Mambang. Sekembalinya dari pertempuran itu Lettu Moh. Nur diangkat sebagai Komandan A dan Letnam Harlan Darwis sebagai Komandan Sektor Komando Keamanan Kota (KKK).

Selanjutnya Operasi gerilya pun dibagi sebagai berikut :

1. Pasukan Mayhudin Algamar dan Yari Turki ditugaskan untuk menguasai daerah Kudu, Sikapak, Padang Sago, dan Mudik Padang.
2. Pasukan Darwis ditugaskan untuk menguasai daerah Kampung Dalam-Sungai Limau.
3. Pasukan Zaidin Bakry ditugaskan untuk menguasai daerah Kuraitaji dan sekitarnya.
4. Pasukan Slun (ALRI) ditugaskan untuk menguasai daerah Ulakan.
5. Pasukan Yusuf Siraj (Yager) ditugaskan untuk menguasai Pekandangan, Sicincin, Pauh Kembar dan Lubuh Alung.<sup>112</sup>

#### **4.4. Daerah Sub Komando B**

##### **4.4.1 Solok**

Setelah kota Solok jatuh ke tangan Belanda, maka daerah Solok dan sekitarnya dibagi menjadi dua (2) daerah gerilya.

## 1. Solok Utara

Daerah ini menjadi tanggung jawab pasukan Letda Bakhtiar yang terdiri dari pasukan Rabain, pasukan Nawi dan pasukan Rosmen.

## 2 Solok Selatan

Daerah ini menjadi tanggung jawab Letda Yahya Usman. Pasukan ini terdiri dari pasukan Letda Yusuf Usman, Letda Idris Majid, Pasukan Alizar di Muara Panas dan pasukan A. Rakhman di Koto Hilalang Pasukan-pasukan tersebut mendapat bantuan dari PMT dan BPNK serta pemerintah setempat beserta rakyatnya. Sasaran serangannya adalah pos-pos Belanda dan konvoi-konvoi Belanda. Pada 28 Desember 1948 sebuah patroli Belanda telah dicegat di Gaung dan terjadi pertempuran di Tabek. Dalam pertempuran ini 8 orang anggota TNI gugur, diartaranya Letda Yahya. Tanggal 9 Maret 1949 terjadi pertempuran di pelapik, Solok Selatan. Dalam pertempuran ini pasukan TNI berhasil menghancurkan sebuah truk musuh dan menewaskan beberapa orang pasukan Belanda

### 4.4.2. Sawah Lunto/Sijunjung

Sawah Lunto/Sijunjung adalah satu Kabupaten yang memiliki dua kawedanan Sawah Lunto dan kawedanan Sijunjung. Pada masa agresi Militer Belanda kedua daerah Kawedanan Sawah Lunto menjadi daerah operasi gerilya pasukan yang dipimpin Letnan Syofyan Tamala yang dibantu oleh pasukan Rusman Usman di Bantu Arang Utara dan pasukan Lettu M. Anas di Batu Arang Selatan. Sedangkan daerah Kawedanan Sijunjung menjadi daerah operasi gerilya pasukan Letda Darny dibantu oleh Letda Syamsuddin di Tanjung Gadang, Letda Nasrun di Sijunjung dan Salim Halimi di Tanjung Ampalu. Dalam operasinya pasukan-pasukan gerilya itu selalu mendapat bantuan dari PMT (Pasukan Mobil Teras) dan BPNK (Badan Pertahanan Negeri dan Kota), begitu juga dari rakyat setempat. Sasaran gerilya adalah pos-pos Belanda dan pencegahan konvoi patroli Belanda. Pos-pos Belanda yang sering menjadi sasaran gerilya adalah sawah Lunto, Talawi, dan Tanjung Ampalu.



#### 4.4.3 *Alahan Panjang/ Muara Labuh*

Di daerah ini Komandan pertempurannya adalah Lettu Arief Amin. Daerah pertempurannya dibagi atas: Muara Labuh dengan komandannya Letda Amir Hamzah; Alahan Panjang dengan komandannya Letda Zainul dan Seksi Mobil dengan Komandannya Serma Zainuddin. Sasaran gerilyanya adalah pos-pos Belanda dan patroli/ konvoi Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1949 pasukan Belanda meninggalkan Muara Labuh, karena seringnya mendapat gangguan dari pasukan gerilya. Pada tanggal 19 Mei 1949 terjadi pertempuran di Tanjung Balik dan Alahan Panjang. Dalam pertempuran ini dua orang pasukan Belanda tewas dan sebuah senjata dapat dirampas pasukan gerilya.

#### 4.5 *Daerah Sub Komando C*

Daerah Sub Komando C ini dibagi atas tiga sektor yaitu :

1. Sektor pertempuran Kerinci di bawah pimpinan Letda Murady.
2. Sektor pertempuran Inderapura dibawah pimpinan Letda Imran JR.
3. Sektor pertempuran Painan dibawah pipinan Lettu Mugni Zein.

Atas kerja sama yang baik antara pemerintahan setempat PMT, BPNK dan rakyat, pasukan-pasukan tersebut di atas melakukan perlawanan gerilya terhadap kedudukan-kedudukan Belanda sesuai dengan tanggung jawab masing masing. Sasarannya adalah pos-pos Belanda dan patroli serta konvoi Belanda. Sejak datangnya Belanda sampai pada 23 Agustus 1949 pertempuran selalu berkobar di daerah-daerah tersebut di atas.

#### 4.6 *Daerah Pertempuran lainnya*

##### 4.6.1 *Bukittinggi/ Maninjau (Agam Tua)*

Daerah basis gerilya TNI di sekitar Bukittinggi antara lain Empat Angkat, Kubang Putih, Jambak, Baso, Matur, Kamang, Banu Hampu,

Sungai Puar dan lain-lainnya. Diantara basis gerilya tersebut di atas, Kamang merupakan daerah yang sering mendapat serangan dari pasukan Belanda. Karena daerah ini cukup terbuka dan di situ tempat kedudukan pimpinan TNI di Sumatera Barat Letkol Dahlan Jambek dan Kolonel Syarif Usman.

Pasukan Belanda pernah mengadakan patroli ke Padang Gelanggung ke arah Barat melalui Sianok dan Matur, dan berhasil menangkap seorang tokoh PDRI yaitu Jaksa Agung Abdul Muthalib Moro. Dan ke arah utara, ke Lubuk Sikaping, pasukan Belanda tertahan di Palupuh. Daerah ini merupakan daerah strategis bagi gerilya.

Pada masa agresi Militer Belanda kedua hanya sekali Belanda memasuki pertahanan Palupuh, yaitu ketika Belanda berusaha mencari dua orang pilot pesawat terbangnya yang tertembak jatuh di daerah ini. Selain itu Sungai Puar merupakan salah satu daerah yang baik dijadikan basis gerilya. Nagari Sungai Puar yang terletak di lereng Gunung Merapi sering menjadi sasaran serangan Belanda. Karena letaknya diketinggian memudahkan untuk komunikasi dan ke Selatan dapat berhubungan dengan Bukit Batabuh terus ke Lasi dan Candung yang berbukit-bukit dan berjuang dalam. Ketika Bukittinggi di bom Belanda pada 19 Desember 1948 banyak penduduk kota yang mengungsi ke nagari Sungai Puar.

#### *4.6.2 Batu Sangkar dan Lintau Buo*

Setelah Batu Sangkar jatuh ke tangan Belanda, pasukan TNI dan Mobrig menyingkir keluar kota. Sebagai Komandan Front pertempuran di daerah ini adalah Mayor Syuib. Serangan gerilya yang dilakukan ini berserta dengan pasukan mobrig dipimpin oleh Kapten Yusuf Indra. Pasukan ini seringkali melakukan penyerangan ke kota Batu sangkar. Dalam serangan ini pasukan gerilya dibantu PMT-BPNK beserta rakyat setempat. Daerah pertahanan adalah di Sungayang dan Sungai Tarab.

Pertempuran-pertempuran yang terjadi di daerah ini antara lain lain pertempuran di Sungai Jambu yang terjadi tanggal 9 Maret 1949.

Dalam pertempuran ini, pasukan TNI kehilangan Letnan Marah Yulius (Atom), seorang luka-luka, sedangkan di pihak Belanda tewas 5 orang. Sedangkan di daerah Lintau Buo sering mendapat gangguan dari Udara. Belanda yang tidak berhasil menduduki Lintau Buo melalui Batu sangkar, berusaha melalui jalan Tanjung Ampalu-Kumanis, Sitangkai dan mendirikan pos di Taluk dengan petunjuk seorang penghianat yang bernama jaar.<sup>113</sup> Sebelum daerah Lintau Buo dapat diduduki terjadi pertempuran yang hebat dengan PMT. Pertempuran terjadi di Labuh Dalam yaitu menjelang Pangian.

#### *4.6.3 Padang Panjang*

Padang Panjang juga merupakan daerah gerilya. Di daerah ini selain serangan-serangan gerilya yang dilakukan terhadap pos-pos Belanda, TNI juga melakukan pencegahan-pencegatan terhadap patroli dan konvoi Belanda. Diantaranya adalah :<sup>114</sup>

1. Pencegahan terhadap patroli Belanda di Koto Lawas. Pencegatan dilakukan di Pancuran Tujuh.
2. Pencegatan terhadap patroli Belanda di Pandai Sikat, Tanjung dan dan Pagu-pagu. Tentara Pelajar yang melakukan pencegahan di daerah ini berhasil menimbulkan banyak kerugian dipihak Belanda. Akibatnya Belanda mengganas dan membakar 70 buah rumah penduduk.
3. Pencegatan terhadap patroli Belanda di Paninjauan. Di Tiga Suku Belanda berhasil menangkap 10 orang anggota BPNK, tapi karena mereka memberikan perlawanan, maka 9 orang gugur. Di Batu Banyak terjadi pula pencegahan, tetapi kerugian di pihak TNI 1 orang, rakyat 3 orang dan 10 buah rumah penduduk dibakarnya.
4. Pencegatan terhadap patroli Belanda ke Batipuh. Akibat pencegahan ini 2 orang pejuang Batipuh Atas gugur dan Belanda membunuh sebelas orang rakyat di Ladang lawas.

#### *4.6.4 Payakumbuh*

Setelah Payakumbuh jatuh ketangan Belanda, mereka berhasil membuat pos-posnya di beberapa tempat seperti di Koto Nan Gadang,

Tiaka, Guguk Payo Basung dan sebagainya. Sedangkan TNI yang semula menyingkir dan beberapa hari kemudian kembali untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan posisi pasukan diatur sebagai berikut.<sup>115</sup>

- Payakumbuh-Lintau-Tungka: dijaga oleh Batalyon Singa Harau dibawah pimpinan B. Dt. Panduko Malano dan Makinudin.
- Payakumbuh-Taram-Tanjung Pati dijaga oleh Mobrig dengan komandannya Silalahi dan Batalyon Merapi dibawah komandannya Kamaruddin Dt. Machudum dan Munir A.
- Jalan Payakumbuh ke Bukittinggi dijaga Batalyon Singa Harau dibawah pimpinan Nurmatias.
- Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi dijaga ketat pula oleh pasukan yang dipimpin oleh Kapten Syafei komandan front 50 Kota yang kemudian digantikan oleh Mayor Thalib.
- Disamping itu Piobang pasukan AURI yang menjaga lapangan udara.

Pada tanggal 15 Januari pasukan TNI mengadakan serangan umum atas kota Payakumbuh. Serangan ini dilakukan dari dua jurusan yaitu Utara dan Selatan. Tujuan serangan ini untuk mengalihkan perhatian Belanda, guna mengamankan rapat yang diadakan di Situjuh. Pasukan TNI berhasil masuk kota dan membakar rumah-rumah Cina. Akan tetapi pasukan Belanda telah menuju Situjuh pada malam itu juga sehingga terjadi peristiwa Situjuh. Mengenai peristiwa Situjuh ini lebih lanjut akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

### *Catatan*

74. Anhar Gonggong, et at, *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI, Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, Jakarta, 1993, h. 49.
75. *Ibid*
76. *Ibid*
77. *Sejarah Daerah Sumatera Barat*. Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1978, h 132,
78. Audrey Kahin, Dr. *Perjuangan Kemerdekaan : Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945--1950*. MSI Cabang Sumatera Barat, h. 143.
79. *Ibid*. h.144.
80. *Ibid*. h. 143.
81. Endri Gani. *Perlawanan Rakyat Sumatera Barat, Pada Masa Revolusi: Dalam perspektif Historis*. (Skripsi Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Sastra, Fakultas Sastra UI, 1996.) h.82.
82. *Ibid*, h. 83.
83. Kahin, *Op.cit*, h. 146.
84. Nasution, A.H., *Tentara Nasional Indonesia*. Jilid I. Djakarta : Seruling Masa, cetakan ke-3, 1970, h.344.

85. Kahin, *Op.cit*, h.147.
86. Drs. V Sardjono & Drs. GH Marsadji, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia*. Tinta Mas, Jakarta, 1982, hlm. 31.
87. Kahin, *Op, cit*, h. 149.
88. Endri Gani, *op. cit*, h. 97.
89. *Ibid*
90. *Ibid*
91. Kahin, *Op.cit*.
92. *Ibid*. h. 151.
93. *Sejarah Daerah Sumatera Barat*. h. 136.
94. Endri Gani, *op. cit*, h. 98-99.
95. Fatimah Enar, et al, *Sumatera Barat 1945--1949, Pemerintah Daerah Sumatera Barat*. Padang, h. 149.
96. *Sejarah Daerah Sumatera Barat*, h. 137.
97. Endri Gani, *op.cit*, h. 101.
98. *Ibid*
97. Endri Gani
98. *Ibid*
99. Masyarakat Sejarawan Indonesia. *PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Dikaji Ulang*. Jakarta : MSI, 1990, h. 42
100. Drs. Mansae, et al. *op.cit*. h. 251.
101. Drs. V Sardjono & Drs. GL. Marsadji, *op.cit*, h. 34.
102. *Ibid*
103. *Ibid*, h. 35-36
104. *Ibid*, h. 37
105. *Ibid*, h. 38

106. *Ibid*
107. *Ibid*. hlm. 26
108. Lihat George Mc. T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca : Cornell University Press, 1970.
109. *Ibid*
110. Drs. V Sardjono & Drs. GL. Marsadji, *op.cit.* h. 281.
111. *Sumatera Barat 1945--1949*. h. 267.
112. Drs. V Sardjono & Drs. GL. Marsadji, *op.cit.* h. 52
113. *Sumateta barat 1945--1949*. h. 281.
114. Drs. V Sardjono & Drs. GL. Marsadji, *op. cit.* h. 66--67.
115. *Ibid*. h. 62.

## BAB V

### PERANAN DESA DALAM PERANG GERILYA

#### ***5.1 Pembentukan Basis Gerilya***

Sampai dengan April 1949 Belanda telah dapat menguasai kota-kota, penting di Sumatera Barat seperti Solok, Pedang Panjang, Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh, Sawah Lunto, Sijunjung, Alahan Panjang, Muara Labuh, Sungai Penuh dan Pariaman. Namun dengan penguasaan kota-kota itu bukanlah berarti bahwa Belanda telah berkuasa penuh di Sumatera Barat. Daerah-daerah di luar kota tersebut di atas masih dikuasai oleh militer dan pemerintahan sipil Republik Indonesia. Pemerintah Republik menyadari bahwa unsur dasar yang menentukan hasil perjuangan melawan Kolonialis Belanda dan antek-anteknya adalah faktor dukungan rakyat di pedesaan. Jadi yang sangat penting adalah bagaimana cara menarik dukungan pedesaan itu.<sup>116</sup>

Pihak Belanda sendiri sudah lebih dahulu mengetahui betapa pentingnya dukungan pemerintahan sipil di tingkat pedesaan. Sebagaimana telah disinggung di muka, untuk kepentingannya pemerintah Kolonial Belanda telah berpura-pura mengikuti tradisi adat dan menyeleksi pejabat-pejabat lokal, yang dalam kenyataannya adalah untuk memanipulasi tradisi-tradisi adat untuk menciptakan kepemimpinan lokal yang direstuihnya.<sup>117</sup> Komposisi Kerapatan Nagari-nagari umumnya ditentukan oleh pemerintah kolonial, sehingga makin banyak kepala *nagari* yang berpaling kepada Belanda. Para pemimpin



*nagari* seperti ini oleh para penduduk desa dianggap tidak lagi merupakan wakil-wakilnya. Mereka dianggap hanya sebagai agen dari penguasa kolonial.

Pada minggu-minggu pertama kemerdekaan, komposisi *Keparatan Nagari-nagari* itu mengalami sedikit perubahan, terutama karena adanya tekanan-tekanan dari kalangan pemuda. Meskipun demikian, di sebagian besar daerah kepala *nagari* tradisional warisan zaman kolonial Belanda pada umumnya masih tetap memperoleh kedudukan dalam administrasi lokal. Oleh karena itu kecurigaan masyarakat, khususnya kaum republikain terhadap kepala *nagari* lama masih tetap ada.

Pemerintah keresidenan di daerah Sumatera Barat menyadari adanya ketidakpuasan semacam itu. Dia percaya jika penduduk desa ikut serta dalam pemilihan pejabat-pejabat lokal atau kepala *nagari*, mereka tentunya akan merasa ikut terpenggil untuk mempengaruhi kalangan Republik Indonesia untuk memberi rasa tanggung jawab kepada kelompok agama dan pemuda pada khususnya, terutama dalam melaksanakan urusan lokal dalam pemerintahan yang baru maka pemerintah RI di Sumatera Barat menetapkan bahwa perubahan-perubahan mendasar akan kelompok dalam masyarakat akan terwakili dalam pemerintahan. Langkah pertama bagi pembentukan pemerintah lokal yang lebih demokratis adalah lewat pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) untuk menggantikan KNID tingkat desa.

Sejak dibentuknya DPRN yang lebih sering disebut DPN, sebagian besar desa melakukan pemilihan secara langsung atas dewan-dewan perwakilan desa tersebut. Menurut laporan Belanda, pemerintahan nagari telah mengalami reorganisasi besar-besaran. Setiap nagari diperintah oleh DPN semacam Kerapatan Nagari pada periode sebelumnya. Jika pada periode sebelumnya yang menjadi ketua Kerapatan Nagari adalah Penghoeloe Kepala, maka pada masa Republik DPN dikepalai oleh seorang Wali-Nagari.<sup>118</sup>

Dengan diselenggarakan pemilihan-pemilihan seperti telah disebutkan tadi, maka bentuk kepemimpinan desa yang lama telah diakhiri. Partai politik yang banyak berpengaruh dalam proses pemilihan kepala nagari baru (yang lebih banyak dipakai istilah Wali

nagari) adalah Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Sekitar 90% dan semua wali nagari yang baru dipilih berasal dari semua wali tersebut walaupun sudah ada reorganisasi dengan hasil seperti di atas, namun pihak Belanda tetap mempunyai keyakinan bahwa kebanyakan penghulu, sekalipun nasionalis, akan menerima kedatangan Belanda dengan senang hati.<sup>120</sup>

Sebelum kota-kota penting itu jatuh ke tangan Belanda kekuatan pasukan TNI masih merupakan kekuatan yang terpusat dalam kesatuan-kesatuan yang lebih besar. Tetapi dengan jatuhnya suatu pertahanan atau sebuah kota, pasukan TNI dan juga Kepolisian Negara (khususnya Mobrig) mundur dalam kolompok-kelompok yang lebih kecil. Tujuan dipecahnya kesatuan-kesatuan ini antara lain, pertama, untuk menghindari pengejaran dan serangan udara Belanda; dan kedua untuk mengamankan daerah-daerah tertentu yang menjadi sumber logistik bagi kekuatan kaum *republikein*. Misalnya pasukan Mobrig pimpinan Raden Yusuf dan Mobrig keresidenan di bawah pimpinan Amir Mahmud ditarik ke luar Bukittinggi menuju ke daerah Palupuh. Di pilihnya daerah ini antara lain dengan pertimbangan, selain daerahnya bergunung-gunung yang cocok untuk pertahanan. Di daerah ini dahulu Imam Bonjol membuat benteng pertahanannya di sini. Selain itu karena di belakang daerah ini adalah daerah surplus beras yang merupakan sumber bahan makanan mayoritas penduduk Sumatera Barat.<sup>121</sup>

Kondisi alam di daerah pedalaman yang sulit ditembus itu membuat pemerintah Republik dapat menggunakan tekanan terhadap Inggris dan kemudian juga Belanda, melalui ancaman untuk memutuskan jalur batubara, listrik, dan suplai air.<sup>122</sup> Setelah adanya agresi militer pertama, pemerintah Keresidenan telah memblokade daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda sampai dengan bulan November 1948 Belanda merasakan akibat blokade tersebut yang membuat daerah-daerah yang dibawah kontrolnya kekurangan buah-buahan, sayuran dan ternak unggas yang biasanya didatangkan dari desa-desa daerah pedalaman.<sup>123</sup>

Dengan demikian terpecahnya pasukan TNI dan kekuatan kaum *republikein* lainnya itu tidaklah berarti bahwa kekuatan dan kekuasaan

republik Indonesia telah hancur. Justru dengan adanya penyebaran ini membuat pihak Belanda mengalami kesulitan dalam operasi militernya. Sebab daerah yang harus mereka awasi dan dijaga keamanannya menjadi sangat luas. Para pejuang *republikein* yang harus mereka hadapi tersebar mulai dari kota atau pinggiran kota sampai jauh ke pelosok desa, bahkan ke hutan-hutan yang jauh dari kampung-kampung. Banyak di antara mereka itu tidak sempat kembali kepada kesatuannya semula, dan mereka ini lalu bergabung dengan badan-badan Pemerintah Sipil atau badan-badan perjuangan lainnya. Ada yang menjadi Camat Militer, Wedana Militer, Wali Perang, anggota atau Komandan Markas Komando Rakyat Kecamatan (MPRK), Badan Pengawal Negari dan Kota (BPNK), Pasukan Mobil Teras (PMT = pasukan elit keamanan yang direkrut dari BPNK) atau anggota gerilya di nagari. Dengan demikian terjadilah pemerataan pasukan TNI di seluruh daerah, termasuk daerah pendudukan. Sebagai akibatnya medan pertempuran pasukan TNI tidak lagi terbatas, tetapi meluas ke seluruh daerah di Sumatera Barat.

Seperti pada Agresi I dalam Agresi Belanda ke-II TNI juga berjuang bahu membahu dengan staf Pemerintahan setempat dan dengan pemuda-pemuda yang bergabung dalam PMT-BPNK.<sup>124</sup> Begitu juga rakyat yang mengungsi ataupun yang tinggal di daerah pendudukan selalu siap untuk memberikan apa yang ada pada mereka demi kelancaran perjuangan, walaupun mereka berada dalam serba susah. Banyak hasil produksi pertanian atau pertambangan dari daerah pedalaman dipakai untuk membeli keperluan perjuangan, terutama untuk membeli senjata dan amunisi. Memang pihak Republik telah membuat semacam pabrik senjata sendiri di bekel-bekel Jepang di Sawahlunto, Indarung yang kemudian dipindahkan ke Solok, dan Payakumbuh. Akan tetapi senjata-senjata yang dihasilkannya masih kurang dapat diandalkan. Selain itu hasil komoditi dari desa ini digunakan untuk kebutuhan sandang dan pangan.

Partisipasi para petani di pedesaan dalam membiayai perjuangan ini tercermin pula dalam kesepatan mereka untuk memberikan *iuran* perang, sebesar 10%. Pada bulan April 1946, *Volksfront* mengeluarkan perintah pertama kepada para petani di pedesaan agar membayar iuran itu dari hasil panen padinya. Mulanya perintah itu kurang efektif

sehingga banyak yang menghindari pembayaran iuran itu. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, terutama setelah pemungutan itu dilakukan oleh satu panitia nagari, maka pengutan itupun mulai lancar. Setelah agresi belanda yang pertama, iuran itu tidak saja dibebankan kepada penghasil padi saja, tetapi juga pada pendapat lainnya. Pemungutan itu sendiri dijadikan tanggung jawab wali nagari. Lepalang rakyat merasa mereka membantu kerabatnya yang berjuang demi kemerdekaan, seperti telah disinggung di atas, mereka rela menanggungkan kebutuhannya sendiri demi revolusi. Akan tetapi bila mereka tahu bahwa pengorbanannya itu hanyalah dipakai oleh pasukan militer yang malas-malasan, tidak sedikit penduduk desa yang mengancam atau menghentikan bantuannya itu.<sup>125</sup>

Pada umumnya TNI melakukan serangan-serangan gerilya pada malam hari dan ditunjukan langsung terhadap pos-pos Belanda. Sehingga mereka terpaksa bertahan dan tidak berani keluar. Sebaliknya pada siang hari pasukan Belanda selalu mengadakan patroli ke daerah sekitarnya. Disaat itu pasukan TNI bersembunyi di tempat-tempat tertentu atau kembali sebagai rakyat biasa melakukan pekerjaan sehari-hari. Pada tempat dan saat-saat yang menguntungkan pasukan TNI mengadakan serangan ataupun cegatan terhadap patroli Belanda itu. Oleh karena itu serangan gerilya membawa korban dan kerugian yang besar terhadap Belanda.

Dalam usahanya membasmi gerilyawan, Belanda melakukan berbagai tindakan. Diantara usaha itu ada yang bersifat "lunak" seperti mendekati pemuka-pemuka rakyat atau orang-orang yang dianggapnya berpengaruh dengan cara mengangkat orang-orang tersebut menjadi pegawai seperti Wali Nagari, Camat dan sebagainya dan diberi gaji. Kepada rakyat, Belanda membujuk dengan membagikan pakaian, obat-obatan dan lain-lain.<sup>126</sup> Namun perkiraan Belanda bahwa perubahan sistem pemilihan kepala nagari dari *Kerapatan Nagari* menjadi DPN yang didominasi partai adalah sesuatu kekeliruan ternyata tidak terbukti. Belanda tidak mengetahui bahwa manipulasi yang dilakukannya selama itu justru membuat para kepala nagari dijauhi rakyatnya sendiri.

Memang tidak dapat dipungkiri ada juga sebagian penduduk yang terbeli hatinya oleh orang-orang NICA. Namun pada umumnya

semangat berjuang mereka tidak merosot oleh tekanan-tekanan pihak Belanda. Apalagi setelah pemerintahan Darurat di bawah pimpinan Mr. Safrudin Prawiranagara terus menerus mendatangi desa-desa dan memberikan penerangan serta dorongan semangat kepada mereka. Penduduk desa pun membalas perhatian pemimpinya dengan mendukung terus perjuangan dengan cara mereka antara lain memberikan makanan dan lain-lain.

Dr. Sambijono yang ikut dalam rombongan Safruddin misalnya, sesampai di desa-desa yang dikunjunginya selain memberikan penerangan mengenai perjuangan, ia juga bekerja keras memberantas penyakit-penyakit yang ada di kalangan masyarakat waktu itu, antara lain penyakit prambosia.<sup>127</sup> Demikian TNI bersama rakyat secara terus-menerus mengganggu kedudukan/patroli Belanda dimana-mana dengan tekad tidak akan mundur.

## ***5.2 Pembentukan Jaringan Pertahanan (Logistik)***

Agresi Militer Belanda I mendapat tantangan dari seluruh rakyat Sumatera Barat, bahkan Alim Ulama mengeluarkan fatwa bahwa perang mempertahankan kemerdekaan adalah perang sabil. Pada tanggal 30 Juli 1947 dibentuk "Front Pertahanan Nasional" yang diketuai oleh Hamka, Badan ini bekerja sama dengan "Dewan Pertahanan Daerah" (DPD) dalam mengorganisir kekuatan. Perlawanan tidak saja dilakukan oleh pasukan yang terjun langsung ke medan peperangan. Bagi kaum perempuan atau masyarakat yang sudah tidak mampu ikut ke garis depan, mereka mensuplai kebutuhan pasukan ke garis depan dengan membentuk dapur-dapur umum atau kependuan.<sup>128</sup> Antusias perlawanan Rakyat Sumatera Barat dapat terekam dalam kutipan di bawah :

Hari ini, tanggal 27 Juli 1947, di depan hadirin yang memenuhi gedung bioskop, Rasjid dan Ismail Lengah membentangkan suka duka para prajurit di Front yang memperhatikan, apalagi sesudah agresi baru saja berlalu, serta terbunuhnya dengan secara kejam Wali Kota Padang. Kedua pemimpin menguraikan dengan sungguh keperluan-keperluan prajurit yang semakin meningkat dan makin mendesak, apalagi dengan kian luasnya

front pertempuran .... Mereka hampir serentak menyerahkan dan mendaftarkan sumbangan, kaum ibu tanpa berpikir lagi melepaskan gelang, subang, lontin, bahkanpun cincin kawin, karena itulah yang terbawa pada ketika itu.

.....Hampir dua bulan kemudian pada 27 September 1947, atas penunjukan Wakil Presiden Hatta, telah berdiri pula Panitia Pusat Pengumpulan Emas ..... Panitia ini bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan Emas dari masyarakat bagi pembelian sebuah pesawat terbang dari luar negeri.

Para cerdik pandai, alim ulama dan ninik mamak tidak ketinggalan ikut membantu. Akhirnya sebuah pesawat terbang telah dapat diperoleh dengan secara patungan itu .... Emas bekas sumbangan itu masih tersisa sebanyak 2,5 kilogram dan dititipkan pada Bank Negara, yang sesudah penyerahan kedaulatan diserahkan seterusnya pada Bank Indonesia di Jakarta.<sup>129</sup>

Ide pembelian pesawat terbang tersebut berasal dari Muhammad Hatta yang waktu itu menjabat sebagai wakil Presiden dan terbukti bahwa kegiatan itu bisa berhasil atas dukungan dan partisipasi rakyat Sumatera Barat. Disamping kuatnya pengaruh lembaga adat, partisipasi dan dukungan masyarakat Sumatera Barat dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan merupakan gabungan antara kesadaran berjuang dari rakyat, persuasif para pemimpin dan tokoh masyarakat lokal, maupun pengaruh pemimpin nasional Mohammad Hatta yang waktu itu menjadi Wakil Presiden RI. Pengaruh Hatta yang memang berasal dari Sumatera Barat sangat besar dan menentukan jalannya perjuangan.<sup>130</sup>

Pertahanan pihak Republik setelah Agresi Militer Belanda I yang gagal itu di Padang Area tetap terkoordinasi dengan baik dan susah untuk ditembus Belanda. Akan tetapi dengan tercapainya persetujuan Renville, 17 Januari 1948, menyebabkan kemunduran, baik ekonomi maupun pertahanan. Bidang ekonomi terjadi inflasi yang hebat, sehingga uang Urups seharga Rp. 25,- tidak mempunyai harga lagi. Disamping itu akibat penuh sesaknya Bukittinggi ibu kota Sumatera

Tengah oleh pengungsi, harga makanan melambung tinggi dan susah didapat.

Di bidang pertahanan dengan disetujuinya Renville membuat pihak Republik sangat terpukul. Beberapa pertahanan yang sangat ideal diberbagai front terpaksa ditinggalkan.<sup>131</sup> Umpamanya saja di front Timur pertahanan yang sangat ideal di Kepala Datar yang tidak dapat ditembus oleh pasukan Belanda semasa agresi I terpaksa ditinggalkan. Pertahanan baru dibentuk di Air Sirah dimana medannya tidak menguntungkan sama sekali.

Setelah TNI harus meninggalkan kantong-kantong pertahanan mereka yang strategis, pada awal 1948, kembali TNI di Minangkabau mengalami cobaan yang berat dengan berlakunya Rekonstruksi Oktober 1948.<sup>132</sup> Terlebih lagi adanya peraturan perampingan personil tentara tersebut berjalan lambat. Situasi di Sumatera Barat umumnya dengan berlakunya "Rera" itu menambah kacau pertahanan program Rera tersebut secara psikologis sangat mempengaruhi moral tentara, sehingga tidak bertahan secara efektif dari serbuan Belanda. Di tengah situasi ekonomi dan kondisi TNI yang kacau karena restrukturisasi militer yang belum tuntas, Belanda melancarkan Agresi Militernya yang ke-II. Operasi perang kilat yang dilancarkan Belanda dengan persenjataan lengkap, dalam waktu yang relatif singkat berhasil mematahkan perlawanan TNI dengan menduduki kota-kota penting di Sumatera Barat.

Pasukan dari jurusan Utara setelah berhasil menghancurkan Front Utara bergerak ke Bukittinggi. Pasukan dari Front Timur menuju Sawahlunto melalui Batusangkar, Tabek Patah dan Tanjung Alam memasuki Bukittinggi dari arah Timur dan Payahkumbuh dari arah Barat.<sup>133</sup>

Pertahanan TNI di berbagai front dalam waktu hanya dalam beberapa hari, berhasil dibobol oleh Belanda. Pasukan TNI yang mempertahankan pertahanan tersebut mengundurkan diri dengan dengan membumihanguskan tempat-tempat yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Belanda dan melakukan penghadangan sekedarnya sambil mengundurkan diri ke pedalaman untuk melakukan perang gerilya.<sup>134</sup>

Selanjutnya pertahanan dan perlawanan terhadap Belanda digerakkan dari pedalaman secara gerilya, Markas TNI pun diungsikan ke pedalaman dan berpindah-pindah bersama PDRI dengan pemerintah militernya. Pemerintahan Militer tuntut daerah Sumatera Barat ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1948 yang dikeluarkan oleh PTTS Nomor WKS/ Ist. 038, dan sebagai Gubernur Militernya ditunjuk Mr. St. Moh. Rasyid. Sebagai pertimbangan mengapa Sumatera Barat dijadikan daerah militer, dikemukakan karena kita berada dalam keadaan perang, sehingga untuk menjamin efektivitas perjuangan, pemimpin dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tegas terutama mengenai pertahanan.<sup>135</sup> Zaman gerilya yang secara formal dibawah pimpinan PDRI adalah saat terkaburnya segala batas, "Orang kota" telah harus jadi "orang dewasa" militer memegang jabatan sipil, dan sipil menjadi penguasa militer, menteri-menteri saling mengisi jabatan dan sebagainya. Kekaburan batas ini bukanlah anarki, tetapi kesedihan memikul tanggung jawab bersama demi cita-cita bersama.<sup>136</sup>

Peranan PDRI adalah peranan kunci dalam mengatur aliran informasi, sehingga mata rantai komunikasi tak terputus-putus. Di belakang mata rantai tersebut sebenarnya tidak dapat diabaikan peranan rakyat pedesaan yang secara spontan dan sukarela membantu perjuangan revolusi, antara lain memberi tempat berteduh, bahan makanan, menyumbangkan tenaga pengangkut, ke semuanya menopang perjuangan dari nasi bungkus (Nuk), pengangkut alat-alat penyiaran, membuat jalan dan jembatan dan lain sebagainya.<sup>137</sup>

Pasukan TNI yang tercerai berai banyak dibantu oleh BPNK yang membuat pertahanan yang kuat di nagari-nagari. Untuk memperkuat pertahanan dan perlawanan di pedalaman, disamping didirikan dapur-dapur umum, Alim Ulama, cerdik pandai dan Penghulu yang merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat di gunakan untuk membiayai perang.<sup>138</sup>

Tetapi sebagian besar rakyat tidak memberikan 10% saja, bahkan apa yang ada mereka serahkan untuk keperluan perang. Pada beberapa tempat, di tengah-tengah rumah kosong telah tersedia makanan dalam bentuk ubi rebus. Jagung rebus dan lain-lain yang telah disiapkan



penghuninya diwaktu malam, sedangkan siang hari mereka pergi mengungsi. Makanan itu disediakan untuk para pejuang yang lewat kesana.<sup>139</sup>

Ada pula pada beberapa nagari (desa) apabila tentara atau pejuang lewat, diwaktu pergi atau pulang mereka sudah disediakan nasi bungkus atau buah-buahan. Kalau mereka baru saja makan, maka nasi bungkus atau buah-buahan itu disuruh bawa saja. Dengan demikian kemanapun tentara, para pejuang atau pemimpin sipil pergi mereka tidak akan mendapatkan kesukaran makanan, karena dimana-mana rakyat telah menyediakannya.

Apalagi pada tempat-tempat tertentu sudah disediakan makanan bagi tentara dan pejuang lainnya. Akibat serangan Belanda secara terbuka dan frontal dengan Agresi Militer ke-II nya, sempat membuat kocar-kacirnya pertahanan Republik dan untuk beberapa waktu tidak ada ketentaraan yang berfungsi secara optimal dalam menjalankan tugas pertahanan.<sup>140</sup> Akibat lebih jauh dengan cepat pasukan Belanda berhasil menyusup ke pedalaman dan menguasai sebagian besar daerah Republik. Tetapi pasukan Belanda tidak dapat secara efektif menguasai daerah-daerah tersebut.

Secara perlahan-lahan dibangun pusat-pusat pertahanan di daerah-daerah pedalaman dengan melibatkan hampir seluruh rakyat Sumatera Barat. Kekuatan-kekuatan yang terhimpun melakukan perlawanan gerilya, terhadap pertahanan musuh secara seporadis. Perlawanan terutama dikordinir oleh BPNK dan sisa-sisa TNI.<sup>141</sup> Bila dilihat selintas, Belanda secara cepat berhasil menyusup sampai ke pedalaman ke daerah Republik, namun dengan semangat rakyat membentuk barisan pertahanan ditiap-tiap nagari secara bersama sama mengandalkan kekuatan rakyat. Belanda hanya kuat mempertahankan sebagian kota yang didudukinya, tapi di luar itu TNI, BPNK dan gerilyawan yang memerintah.<sup>142</sup>

Untuk memperjelas peranan rakyat dan desa atau nagari dalam perang kemerdekaan 1945--1949 di daerah Sumatera barat, di bawah ini ada beberapa contoh kasus, seperti 'Peristiwa di Situjuh', peristiwa Cubadak Air', dan ' Pertempuran Sungai Puar'.

### 5.3 *Peristiwa di Situjuh*

Situjuh Batur sebuah desa yang terletak 13 km di Selatan kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang merupakan desa yang tak dapat dilupakan oleh rakyat Sumatera Barat. Di Situjuh Batur telah terjadi sebuah tragedi pada masa agresi Militer Belanda II yang banyak membawa korban, akibat penyerbuan tentara Belanda. Mereka yang korban ada sekitar 69 orang, termasuk pemimpin, anggota TNI dan BPNK yang ketika itu sedang mengikuti rapat militer. Rapat/musyawarah Situjuh Batur merupakan lanjutan rapat dari Koto tinggi. Koto Tinggi yang terletak  $\pm$  63 km dari Payakumbuh merupakan desa yang strategis letaknya dalam perang gerilya dan dijadikan pusat PDRI, markas Gubernur Militer Sumatera Barat.

Rapat di Koto Tinggi diadakan 10 Januari 1949 sempat terputus akibat kedatangan patroli Belanda. Rapat tersebut dihadiri oleh pemimpin Militer, sipil dan tokoh terkemuka, diantaranya Gubernur Militer Sumatera Barat Mr. S.M. Rasyid, Letkol Dahlan Ibrahim komandan Kesatuan tentara Teritorial Sumatera Barat "Banteng", Chatib Sulaiman Ketua MPRD dan lain-lainnya.<sup>143</sup>

Pada rapat tersebut dibicarakan langkah-langkah untuk menghadapi Belanda dan permasalahan lainnya. Salah satu hasil keputusannya adalah mengadakan pertemuan lanjutan dengan mengundang seluruh kekuatan tentara yang tercerai-belai.<sup>144</sup> Maka diambil inisiatif oleh puncak pimpinan militer dan sipil mencari tempat yang dianggap paling aman untuk mengadakan rapat, mengadakan tindakan selanjutnya menghadapi Belanda.<sup>145</sup> Desa Situjuh Batur dipilih menjadi tempat rapat lanjutan yang diadakan pada tanggal 15 Januari 1949. Rapat diadakan di sebuah lakuk (lurah) yang dalamnya kira-kira 20 meter dan lebar 100 meter dengan sedikit persawahan yang membentang ke arah Utara dan hanya mempunyai satu jalan masuk dan dua "jalan tikus" untuk keluar. Di sini berdiri beberapa buah bangunan yang merupakan satu kompleks perumahan, antara lain sebuah rumah, sebuah langgar dan sebuah kincir padi yang akan dipakai sebagai tempat tidur tempat peristirahatan para peserta musyawarah.<sup>146</sup>

Persiapan rapat Situjuh Batur, relatif singkat, mengerahkan ratusan rakyat, terutama untuk mempersiapkan keamanan. Kemudian diambil keputusan untuk meruntuhkan jembatan-jembatan dan jalan-jalan menuju Situjuh Batur dirusakkan. Pohon-pohon kayu dan kelapa yang tumbuh dipinggir jalan, semuanya ditebangi dan dirubahkan ke tengah jalan. Di tempat-tempat tertentu diadakan pengawalan oleh PMT-BPNK secara terus menerus.<sup>147</sup>

Peserta rapat sudah hadir pada tanggal 14 Januari 1949 dan rapat dimulai pada malam harinya, dipercepat dari rencana semula tanggal 15 Januari 1949. Rapat dipimpin oleh Chatib Sulaiman sebagai wakil Gubernur Militer Mr. S.M. Rasyid yang berhalangan hadir dan rapat baru selesai pukul 4.30 pagi dengan hasil kesimpulan :

1. Supaya diadakan koordinasi yang lebih baik.
2. Melakukan pencegahan-pencegatan yang lebih aktif terhadap patroli Belanda.
3. Merusak jalan-jalan yang mungkin dilalui patroli Belanda dan menumbangkan pohon-pohon kayu untuk dijadikan rintangan di jalan tersebut.
4. Menyiapkan pasukan-pasukan yang kuat untuk, dipergunakan pada waktu mengadakan serangan serentak, serangan umum terhadap kota-kota yang lebih diduduki Belanda.<sup>148</sup>

Sebagian peserta rapat ada yang segera pulang, sebagian lagi beristirahat sampai sembahyang Subuh. Kebanyakan pemimpin tertidur ditempat itu. Tanpa diketahui oleh pemimpin-pemimpin kita (TNI) pasukan Belanda dari Payakumbuh telah mengepung Lembah Situjuh dari empat jurusan, yaitu dari Payakumbuh :

1. Melalui Limbuan-Situjuh Bandar Dalam
2. Melalui Padang Jaring-Situjuh Godang.
3. Melalui Tangah Padang Bumbing.
4. Melalui Piladang-Tungkar,<sup>149</sup>

Pasukan TNI yang ditugaskan menjaga rapat itu tidak mengetahui sama sekali kedatangan pasukan Belanda. Karena tertipu

oleh kaki tangan Belanda yang berada di dalam tubuh TNI sendiri. Lebih kurang satu jam terjadi percampuran yang tidak berimbang, meskipun pihak TNI melawan dengan gigih. Akhirnya mereka tidak berdaya dan gugur satu persatu sebagai kesuma bangsa. Dan 69 orang yang gugur, diantaranya Chatib Sulaiman sebagai arsitek perlawanan Sumatera Barat, Letkol Munir Latif komando Residen II, Arisun St. Alamsyah bupati Militer Kabupaten Limapuluh Kota, Mayor Zainuddin (tembak), serta banyak lagi lainnya.

Pasukan Belanda meninggalkan Situjuh pada siang harinya, setelah membunuh dan membakar rumah-rumah penduduk dan membawa sekitar 60 orang tawanan. Dalam perjalanan kembali ke Payakumbuh mengantisipasi pasukan Belanda dicegat oleh pasukan Singa Harau dan BPNK, dibawah pimpinan B. Dt. Malanto.<sup>150</sup> Dalam pertempuran ini banyak pasukan Belanda yang terbunuh dan penduduk yang ditawan Belanda dapat melarikan diri.

Keberhasilan Belanda dalam peristiwa Situjuh Batur akibat persiapan yang kurang matang dari TNI dan BPNK dalam mengantisipasi serangan dan juga adanya pengkhianat dalam tubuh TNI, Letnan Kamaluddin yang dikenal dengan nama Tambiluak. Akibat peristiwa ini juga membawa dampak psikologis yang hebat terhadap pertahanan militer Sumatera Barat. Suasana panik dan kacau terjadi hanya berkat waktulah secara perlahan-lahan pemerintahan dan pertahanan berhasil dibangun kembali.

#### ***5.4 Pertempuran di Cubadak Air.***

Desa Cubadak Air yang termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Sesudah Belanda menduduki Pariaman, TNI melakukan gerilya di daerah ini antara lain di desa Cubadak Air, Limau Purut dan Sikapak. Pada tanggal 7 Maret 1949 pasukan melancarkan operasi pembersihan ke daerah luar kota yang utamanya adalah Cubadak Air, Limau Purut dan Sikapak. Satu kompi pasukan Belanda bersenjata lengkap yang dipelopori 3 buah tank dan dibantu senjata berat lainnya bergerak menuju ke Simpang Apa. Dari tempat itu Belanda melakukan gerak tipu, tanknya bergerak terus ke desa Naras, sedangkan sepertiga pasukannya menyusuri Sungai Batang Manggung menuju Cubadak

Air.<sup>151</sup> Gerakan itu di ketahui oleh Kompi Bakapak dan Barayun dan segera mengambil posisi yang strategis di Bukit Cubadak Air.

Ketika pasukan Belanda itu berjarak 50 meter, pasukan TNI melepaskan tembakan dan terjadilah pertempuran yang sangat yang mengakibatkan banyak korban di pihak Belanda. Untuk menyelamatkan sisa pasukannya, pasukan tank Belanda melepaskan tembakan dengan gencar.<sup>152</sup> Kemudian infanterinya mengundurkan diri ke tengah sawah yang padinya sedang menguning.

Setelah pertempuran itu, beberapa hari kemudian Belanda mengadakan operasi lagi ke Cubadak Air, Dukuah dan Limau Purut. Pasukan Belanda melakukan bombardemen Cubadak Air dari Udara, untuk menghindari banyak korban, pasukan gerilya tidak mengadakan perlawanan dan mengundurkan diri ke daerah Padang Alai, Compago dan kampung dalam. Pasukan Belanda melanjutkan gerakannya ke arah Naras dan di jembatan Lating dihadap oleh pasukan TNI sehingga terjadi pertempuran selama dua hari. Akibat pertempuran ini Belanda menyerahkan pasukan dari pesawat udara.

### ***5.5 Pertempuran Sungai Puar***

Nagari Sungai Puar terletak di lereng Gunung Merapi termasuk Kabupaten Agam. Penduduknya selain menjadi petani terkenal menjadi pandai besi dan pedagang. Selama perang melawan Belanda para pandai besi dari Sungai Puar sangat banyak jasanya dalam membuat senjata untuk kepentingan perjuangan, mulai dari pisau belati dan senjata-senjata tajam lainnya, mengolah bom-bom peninggalan Jepang menjadi ranjau darat dan sebagainya.<sup>153</sup> Begitu juga kaum ibu di desa ini tidak ketinggalan membantu perjuangan, terutama sekali dalam mengusahakan perbekalan, dapur umum dan Palang Merah. Dapur umum terutama membantu para pengungsi pejuang dan pemimpin pemerintahan yang berada di daerah ini. Kegiatan-kegiatan digaris belakang ini dipelopori oleh Badan Pembantu Barisan Muda (BPBM) yang dipimpin oleh Ibu Khasyiah sebagai Ketua dan Nursyam sekretaris, Asma bendahara dengan pembantu-pembantunya ditiap jorong diantaranya : Aminah, Nurmana, Nurani, Bastiar, Jarana, Rahimah, Azizah, Hasna, Gadis, Kalisyah dan Sami.

Sungai Puar adalah suatu daerah yang minus, sehingga sangat sulit untuk mengumpulkan beras, tetapi bagaimanapun juga demi perjuangan, BPBM dengan kaum ibu tetap menjalankan tugas mereka dengan sekuat kemampuannya.<sup>154</sup> Selain itu para pemuda Sungai Puar pun tidak ketinggalan menyumbangkan tenaganya, tidak saja yang ikut berperang, tapi ada juga yang menjadi kurir dalam menjalankan tugasnya tidak mengenal bahaya dari musuh.

Pada agresi Belanda ke-II Nagari Sungai Puar dijadikan basis gerilya dan menjadi sasaran serangan Belanda. Setelah Bukittinggi di bom Belanda pada 19 Desember 1948, banyak penduduk kota yang mengungsi ke nagari Sungai Puar ini, mengungsi ke nagari Sungai Puar ini, bahkan dari kota-kota lain di Sumatera Barat, sehingga Sungai Puar menjadi ramai.

Di Sungai Puar dibentuk Markas Pertahanan Rakyat Nagari (MPRN) dan pemerintahan disana oleh seorang Wali Perang Umar Datuk Garang. Pada tanggal 2 Januari 1949 pasukan Belanda mengadakan operasi ke desa Sarik dan Sungai Puar dan menembak seorang pemuda dan seorang lagi ditangkap. Dan pada tanggal 18 Maret 1949 Belanda kembali memasuki Sungai Puar dan mendapat perlawanan dari pasukan TNI dan pemuda-pemuda pejuang bersenjata lainnya. Dalam pertempuran yang terjadi 6 orang tewas dari pihak Belanda dan seorang luka-luka, sedangkan di pihak kita 4 orang gugur dan seorang luka. Selain itu pasukan Belanda merampas padi rakyat dan membunuh seorang penduduk.

Serbuan Belanda berikutnya tanggal 24 Maret 1949 menyerbu Sungai Puar. Dalam pertempuran yang dimulai pukul 16.00 sore pasukan Belanda terbunuh 16 orang dan dipihak TNI gugur 2 orang prajurit, 12 rumah terbakar, 2 orang rakyat kena tembak dan 2 orang luka-luka. Pasukan Belanda selain melancarkan operasinya, juga melakukan tembakan-tembakan dengan meriam, markas dari jarak jauh dengan membabi buta. Menurut catatan Wali Nagari Sungai Puar jumlah korban yang gugur termasuk yang hilang dalam agresi Belanda ke-II di daerah ini ada 96 orang.

### *5.6 Pertempuran Sungai Jambu dan Sikaladi*

Pasukan TNI, Resimen VI yang mundur dari Front Utara telah mengambil kedudukan di daerah Padang Panjang, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar yang berada di sekitar negeri Peninjauan-Talangtengah-Mansiro-Padangbawang-Gunung dan Simabur yang terletak di Pinggang Gunung Merapi.<sup>155</sup>

Dengan kedudukan di daerah-daerah itu kesatuan TNI dapat menguasai hubungan lalu lintas antara Padang panjang, Batu sangkar, Di daerah tersebut juga berkedudukan beberapa kesatuan lain yang mundur dari daerah Ombilin dan Kabukerambil. Mereka berasal dari Bukittinggi untuk memperkuat pertahanan TNI di daerah ini terhadap musuh yang datang dari Solok.

Selain itu terdapat juga pasukan Mayor Anas Karim dari Komandemen Sumatera di Sekitar Padangpanjang yang bersama dengan Letnan Kris Noermatias di daerah itu membentuk pertahanan rakyat dengan nama Komando Pertempuran Batipuh X Koto. Pasukan Belanda beberapa kali mencoba menembus pertahanan itu tetapi selalu gagal.

Pasukan TNI yang mengadakan patroli di daerah Sungai Jambu mendadak bertemu dengan pasukan Belanda, sehingga terjadi pertempuran. Sungai Jambu desa di kaki gunung Merapi antara Padangpanjang dan Batusangkar, tidak jauh dari desa Simabur. Dalam pertempuran ini telah gugur Letnan II Marah Julius (Atom) dari kesatuan Batalyon Kuranji dan seorang anggota pasukan TNI mendapat luka-luka, sedangkan di pihak Belanda lima orang mati ditembak.<sup>156</sup>

Sebelum pertempuran yang terjadi pada 9 Maret 1949, Julius Atom bersama Letnan Bachtiar dan Letnan Sofyan Tamala baru saja selesai menghadiri rapat dengan Kapten Sjoeib beserta camat militer dan MPRK-nya di Sungai Batai untuk membicarakan rencana mengadakan suatu serangan dan pembentukan perbekalan di Front Tanah Datar. Marah Julius (Atom) dikenal sebagai perwira dari Resimen III/ Kuranji yang gagah berani dan sudah beberapa kali melancarkan serangan-serangan terhadap pertahanan Belanda, sejak dari kota Padang dan di daerah Solok.

Begitu juga di Sikaladi sejak awal revolusi telah dijadikan tempat pencegahan terhadap iringan-iringan serdadu Jepang dibawah pimpinan Dahlan Ibrahim dan pada agresi Belanda ke-II desa Sikaladi juga telah dijadikan tempat pencegahan konvoi-konvoi Belanda. Ketika terjadi serangan umum atas kota Batu Sangkar dibawah pimpinan Letnan Sukardiman di Sikaladi pasukan TNI telah mencegat pasukan Belanda yang datang dari Padangpanjang. Sehingga terjadi pertempuran yang banyak membawa korban dipihak Belanda. Tiga truk yang berisi tentara Belanda dapat dihancurkan.<sup>157</sup>

Berita penghentian tembak menembak (cease fire) dari Jogjakarta didengar oleh PDRI dengan perantaraan radio dan juga didengar pula bahwa Bung Hatta telah terbang ke Aceh untuk menemui pemerintah darurat. Akan tetapi karena PDRI berada di Sumatera Tengah, khususnya di Sumatera Barat. tentu saja Bung Hatta tidak bisa menjumpai Mr. Safruddin.<sup>158</sup> Oleh karena itu 'pemerintah' dari Jogjakarta mengutus satu delegasi terdiri dari Moh. Natsir, Dr. Leimena, Dr. Halim, dan Agus Yaman untuk berjumpa dengan Mr. Safruddin, dan mengajak kembali ke Yogyakarta. Delegasi akhirnya bertemu dengan Safruddin di Payakumbuh.

Ada satu langkah pemerintah RI di Yogyakarta, yang sedikit banyak membuat kecewa para pimpinan PDRI. Langkah itu adalah diambilnya keputusan oleh pemerintah di Jogya untuk menerima tawaran Belanda untuk berunding, tanpa membicarakan dulu dengan pihak PDRI di Sumatera Barat.

Menurut Safrudin waktu itu, jika pemerintah di Jogya mau membicarakan dulu masalah perundingan itu, tentu hasil perundingan akan berlainan. Sebab, posisi pihak Indonesia waktu itu (di bawah PDRI) sedang berada di atas angin, dan hal ini kurang diketahui dan dipahami oleh para pemimpin RI yang ditahan di pulau Bangka. Akan tetapi sebagai pejuang sejati, para pemimpin PDRI akhirnya mengikuti pemerintah pusat. Dan Mr. Safruddin beserta kabinet daruratnya itu kembali ke Jogya dan menyerahkan kembali mandatnya kepada Bung Hatta selaku Perdana Menteri RI waktu itu.<sup>159</sup>



### *Catatan*

- 116 Audrey Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan : Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. MSI Cabang Sumatera Barat. h. 164.
- 117 *Ibid*
- 118 *Ibid*. h. 165
- 119 Angka tersebut merupakan perkiraan dari Mr. Sutan Mohammad Rasjid. *Ibid*. lihat catatan kaki no. 25, bab-5.
- 120 Keyakinan ini dikemukakan disampaikan Residen Belanda van Straten kepada utusan militer Amerika Serikat yang mengunjungi Padang pada bulan Oktober 1947. Ia mengatakan kepada delegasi Amerika itu bahwa kaum *Republikein* telah membuat suatu kekeliruan dengan menggulingkan kekuasaan adat dan menggantikan dengan otoritas partai. Lihat Mailrapporten. No. 128? Geh/47. *Algemeene Rijksarschiet*-Den Haag.
- 121 Fatimah Enar d.k.k. *Sumatera Barat, 1945--1950*. Padang : Pemerintah Daerah Sumatera Barat, 1976. h. 216--217.
- 122 Kahin. *Op.cit.* h. 197.
- 123 Mailrapporten No. 726/Geh?48., *Algemeene Rijksarchief*-Den Haag.

- 124 *Sumatera Barat 1945i-1949*. h. 262.
- 125 Kahin. *op.cit.* h. 203--204.
- 126 *Sumatera Barat 1945--1949*.
- 127 R.E. Baharuddin, "Tjerita Tentang Pemerintah Darurat Sjafruddin Di Sumatera Tengah", *Bingkisan Nasional Kenangan 10 Tahun Revolusi Indonesia, 17-8-1945/17-8-1955*. Djakarta: P.T. Upeni. h. 118.
- 128 Endri Gani, *op.cit.* hlm. 103.
- 129 *Ibid.* h. 104
- 130 MSI, *op.cit.*
- 131 Endri Gani *op.cit.*, h. 105.
- 132 *Ibid*
- 133 *Ibid*
- 134 *Ibid*
- 135 Drs. V Sardjono & Drs. GL. Marsadji, *op.cit.* h. 82
- 136 MSI, *op.cit.* h. 41.
- 137 *Ibid.* h. 31.
- 138 Endri Gani, *op.cit.* h. 107.
- 139 *Sejarah Daerah Sumatera Barat*. h. 146.
- 140 Endri Gani, *op.cit.* h. 107.
- 141 *Ibid*
- 142 *Ibid*
- 143 *Ibid.* h. 108
- 144 *Ibid*
- 145 Kumpulan Klipping, *Cahaya Kita*, 20 Agustus 1975.
- 146 Ahmad Husein et al, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Di Minangkabau/Riau 1945--1950*. Jilid II, h. 173.

- 147 Endri Gani, *op.cit.*h. 108
- 148 *Ibid.*
- 149 Drs. V. Sardjono, Drs. GL. Marsadji, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Penyelamat Negara Dan Bangsa Indonesia*. Penerbit Tinta Mas, Jakarta 1982, h. 44.
- 150 *Ibid*
- 151 *Ibid.* h. 50
- 152 *Ibid*
- 153 Ahmad Husein *at. al op cit.*
- 154 *Ibid.* h. 313
- 155 *Ibid.* h. 247
- 156 *Ibid.* h. 247
- 157 *Ibid,* h. 249
- 158 R.E. Bahruddin, *Loc.cit.*
- 159 *Ibid*
- 160 Kahin. *op cit.* h. 281--282

## BAB VI

### EPILOG

Perjuangan rakyat di daerah Sumatera Barat untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya, sebenarnya bukan suatu peristiwa yang muncul begitu saja. Seperti halnya suku lain yang tinggal di daerah lain seperti di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, perjuangan itu sudah nampak jauh sebelum munculnya gerakan Budi Utomo yang dikenal sebagai pelopor organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia.

Di Sumatera Barat misalnya, pada paruh akhir abad ke-19 telah terjadi perlawanan rakyat melawan kekuasaan Hindia Belanda di daerah itu di bawah pimpinan seorang ulama yang terkenal dengan sebutan Imam Bonjol. Meskipun mengalami kegagalan, namun pengaruh patriotismenya di kalangan masyarakat Sumatera Barat tidak dapat dikikis begitu saja bersamaan dengan dipenjarakannya tokoh tersebut. Memang pihak Belanda telah berusaha untuk memadamkan semangat yang kuat dikobarkan Imam Bonjol dan para pengikutnya. Setelah menghapuskan sistem kerajaan yang di daerah itu, Belanda mencoba menggapai hati rakyat Minangkabau terutama di daerah pedesaan, antara lain dengan berpura-pura ikut mempertahankan adat setempat. Caranya antara lain ikut berperan aktif dalam sistem pemilihan kepala negara melalui *Kerapatan Nagari-nagari* atau melalui *Minangkabau Raad*. Dengan ikut campur tangannya Belanda, lambat laun kepala nagari atau Penghulu Kepala yang terpilih umumnya

adalah orang-orang yang dapat diterima atau direstui Belanda. Otomatis kepala nagari semacam ini adalah orang-orang yang berorientasi kepada kepentingan kolonial daripada kepentingan rakyatnya sendiri.

Atas campur tangannya Belanda yang terlalu mendalam dalam adat Minangkabau itu, pada tahun 1920-an muncul 'gerakan' yang meminta agar Rakyat Minangkabau diberi keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Gerakan ini antara lain dipimpin oleh Chatib Sulaiman. Namun gerakan ini gagal. Meskipun gerakan ini gagal, namun telah menunjukkan bahwa keinginan untuk lepas dari penguasa kolonial itu tetap menyata di hati masyarakat Minangkabau.

Hal ini terbukti sewaktu tersiar adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (yang mencakup wilayah Sumatera Barat), kebanyakan masyarakat di daerah ini secara spontan menyambutnya dengan perasaan suka cita. Dukungan mereka terhadap negara Republik Indonesia yang baru merdeka itu mereka tunjukan dalam tindakan-tindakan nyata, baik semasa transisi, yaitu semasa Jepang baru saja kalah dari Sekutu, maupun sewaktu menghadapi Agresi Militer Belanda dalam tahun-tahun berikutnya.

Para alim ulama yang cukup besar pengaruhnya di kalangan masyarakat pedesaan telah mempergunakan pengaruhnya itu secara baik guna mengajak rakyat pedesaan yang umumnya beragama Islam, untuk bersama-sama berjuang melawan Belanda dan antek-anteknya, yang mencoba hendak berkuasa kembali di bumi Indonesia. Bahkan tidak sedikit para ulama yang mefatwakan bahwa berjuang melawan para penjajah sama dengan perang di jalan Allah (perang *sabillillah*). Fatwa semacam itu secara langsung telah menaikkan moril para pejuang di Sumatera barat waktu itu. Bahkan tidak sedikit penduduk desa yang menyumbangkan perhiasannya, gelang emasnya, atau benda lainnya untuk biaya perjuangan waktu itu. Dan tidak sedikit pula yang menyediakan tempat dan tenaga untuk mendirikan dapur umum bagi para pejuang itu, atau mendirikan rumah sakit bagi para pejuang dan yang lainnya, yang terluka akibat perjuangan tersebut.

Hal-hal seperti inilah yang membuat pertahanan pihak *republikein*, tidak mudah dihancurkan oleh pihak Belanda. Memang

benar pasukan TNI dan badan-badan kelasykaran lainnya berhasil dipukul oleh pasukan Belanda sampai mundur ke luar kota. Namun dengan adanya dukungan masyarakat di daerah pedesaan tadi, para pejuang yang terdiri dari pasukan TNI dan badan-badan kelasykaran tadi dapat terus bertahan dengan taktik gerilya. Pasukan *republikein* ini secara terus menerus mengganggu kedudukan pasukan Belanda, sehingga pasukan Belanda tidak dapat beristirahat secara tenang. Apalagi jika malam tiba, boleh dikatakan medan sepenuhnya dikuasai para gerilyawan Republik Indonesia.

Demikian pula pemerintahan sipilnya di daerah Sumatera Barat, seperti di nagari-nagari maupun menjalankan fungsinya secara baik. Dukungan mereka terutama terlihat jelas dalam pengumpulan dana untuk revolusi berupa iuran perang yang dikumpulkan melalui wali nagari. Dengan dana itulah antara lain diperoleh senjata baru atau amunisi. Demikian juga makanan dan Lagi para pejuang diperoleh dari para petani desa. Bahkan karena adanya dukungan para penduduk desa seperti itulah, Pemerintah Darurat Republik Indonesia pimpinan Mr. Safruddin Prawiranagari dapat berjalan dengan baik, dan selalu berhasil meloloskan diri dari kejaran dan sergapan pasukan Belanda beserta antek-anteknya, sampai akhirnya mereka menerima berita adanya gencatan senjata melalui radio pemancar yang mereka miliki.

Solidaritas masyarakat yang dipimpin sedemikian rupa sedikit banyak berasal dari kesamaan pandangan terhadap kehidupan yang tumbuh dalam masyarakat Minangkabau, berupa :

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam nyata dan juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang (Alam takambang jadi guru).
2. Kebersamaan dalam arti, seseorang, untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang (sifat gotong royong).
3. Kemakmuran yang merata.
4. Perimbangan pertentangan yakni pertentangan dihadapi secara nyata dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.
5. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah.

6. Menyesuaikan diri dengan kenyataan.
7. Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan
8. Jiwa agama dan jiwa adat mengimbangi segala kesengsaraan.

Pandangan hidup yang berasal dari adat Minangkabau tersebut adalah peraturan dan pedoman hidup yang berlaku di semua daerah di Sumatera Barat. Keberhasilan pihak Republik Indonesia dalam membangun solidaritas masyarakat pedesaan dapat dilihat antara lain dari ungkapan frustrasi Belanda yang dinyatakan berulang kali oleh Residen Belanda L.B. Van Straten dalam laporan Maret 1949. Dalam laporannya itu diuraikan secara rinci, bagaimana orang-orang Republik menetapkan pemerintahan, pajak, keamanan dan jaringan komunikasinya yang efektif. Secara gamblang ia menggambarkan kegiatan Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) sebagai berikut :

Di atas segala-galanya, di mana-mana ada Barisan Pengawal Nagari dan Kota, sehingga tidak di satu pun kampung yang memberi tempat kepada para pengkhianat atau mata-mata. Ini mengingatkan kita kepada Belanda sewaktu di bawah pendudukan Jerman, terutama sekali BPNK inilah yang mengurus perbekalan beras dari daerah yang diduduki Belanda dan mengurus pelanggaran-pelanggaran.

Perjuangan yang meluas dari garis depan ke kampung-kampung adalah refleksi yang sesungguhnya dari ide-ide Tan Malaka, yang ditulis dalam brosurnya, *Sang Gerilya* dan *Gerpolek*, yang isinya menekankan gaya Murbanya-rakyat biasa. Hal ini tidak hanya berlaku di kampung-kampung terpencil, melainkan juga di jalan-jalan utama kita seperti di koto Baru, yakni pertengahan jalan antara Padang Panjang-Bukittinggi, di mana orang-orang kota distop dan dirampas oleh pos-pos BPNK dan TNI mengumpulkan *bukti* di pasar untuk perjuangan. Kepala Nagari Parit Malintang diculik dan tidak pernah kembali lagi tidak hanya disebuah jalan utama, tetapi di bawah kepulauan asap pos militer. Kedua contoh ini, dengan selusin lainnya menggambarkan realistik suatu pernyataan yang dilontarkan di warung Padang : "Tentara

Belanda hanya cukup kuat untuk menguasai kota-kota yang diduduki; di luar itu TNI, BPNK dan gerilyalah yang berkuasa.<sup>160</sup>

Dari laporan Van Straten tadi jelaslah bawa peranan desa bukanlah sekedar penghias latar dari suatu perjuangan yang besar seperti revolusi nasional Indonesia. Di sini jelas terlihat, bagaimana pemerintah Republik tingkat keresidenan, bahkan kemudian tingkat Pusat (PDRI) dapat bertahan karena dukungan desa dengan penduduknya yang demikian fanatik. Bisa laporan Van Straten ini berlebihan dalam menggambarkan sulitnya kaum pengkhianat hidup di desa-desa atau nagari. Dengan tidak bermaksud berpolemik, paling tidak laporan tersebut menggambarkan bagaimana komitmen penduduk desa dalam mendukung revolusi nasional Indonesia. Walaupun demikian memang harus diakui pula setelah selesai melawan Belanda, tidak sedikit yang merasa kecewa karena harapan-harapannya semasa revolusi tidak tercapai pada masa damai.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdullah, Taufik, "*The Beginning of The Padri Movement*" Paper pada Seminar Sejarah Indonesia-Belanda, Leiden/ Jakarta : 1978.
- Amura, Prof. Drs. e.al. *Bahder Djohan : Pengabdian Kemanusiaan* Jakarta : P.T. Gunung Ageng, 1980
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1980.
- Bingkisan Nasional : Kenangan 10 Tahun Revolusi Indonesia, 17-8-1945/ 17-8-1955*. Djakarta : P.T. Upeni.t.t.
- Dobbin, Christine, *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah, 1784--1847*. Jakarta: INIS, 1992.
- Enar, Fatimah, d.k.k. *Sumatera Barat 1945--1950*. Padang: Pemerintah Daerah Sumatera barat, 1976.
- Gani, Enri. *Perlawanan Rakyat Sumatera Barat Pada Masa Revolusi : Dalam Persepektif Historis*. Skripsi Sarjana pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996.
- Geografi Budaya Dalam Wilayah Pembangunan Daerah Sunda Barat*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Proyek IDKD, 1986.

- Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta : Pustaka Pandji Mas, 1984.
- *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Hatta, Mohammad. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Djakarta : Tintamas, 1970.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*. Djakarta : Tinta Mas, 1960.
- Husein, Ahmad, e.al. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945--1950*.
- Kahin, Audrey, Dr. *Perjuangan Kemerdekaan : Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945--1950*. Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Sumatera Barat.
- Kahin, George Mc.T. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca : Cornell University Press, 1970
- Kartodirdjo, Sartono. *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*. Jakarta : Departemen Pertahanan dan Keamanan. Pusat Sejarah ABRI, 1973.
- , Marwati Djoened Poespoenegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta : Balai Pustaka, 1980.
- Koentjaraningrat, Prof. Dr. R.M. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* Jakarta: Jambatan, 1980.
- Leirissa, R.Z. dan Saleh As'ad Djamhari (peny.). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Republik Indonesia. Dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Disjrahnitra IDSN, 1993.
- Lukisan Revolusi 1945--1949*. Djakarta : Kementrian Penerangan Republik Indonesia.t.t.
- Mansoer, Drs, M.D. *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta : Bhatara, 1970.
- Martamin, Drs. Marjani, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945--1949) Daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Disjrahnitra Proyek IDSN, 1980.

-----, *Naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sumatera barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek IDKB, PSPB, 1979.

Masyarakat Sejarawan Indonesia, *PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Dikaji Ulang*. Jakarta : MSI, 1980.

Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia : Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Dewan Harian Angkatan '45 Sumatera Barat, 1997.

Murad, D.P. *Sungai Puar*. Djakarta : Jajasan Sungai Puar, 1966.

Nasroen, Prof. Mr. M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta : CV Pasaman.

Nasution. A.H. *Pokok-Pokok Gerilya*.

Sardjono, Drs.V., Drs. G.H. Masadji. *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Penyelamat Negara dan bangsa Indonesia*. Jakarta : Tinta Mas, 1980.

*Sejarah Daerah Sumatera Barat*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradya Paramitha, 1977.

Sukanto, Prof. Dr. SH, MA, Suryono dan Soeleman S. Tanen SH, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 1986.

*Sumatera Barat Dalam Angka 1972*. Padang : kantor Gubernur Sumatera Barat, 1972.

Sundhari, R.R. Sitti, *Pelaksanaan Dari Pemerintah PDRI di Sumatera barat 22 Desember 1948-13 Juli 1949*. (Skripsi Sarjana pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1986).

### **Surat Kabar dan Majalah**

Semangat. Agustus 1982-September 1982.

Gema Bukit Apit. No. 2, 1980.

*Haluan*. Agustus 1975.

